



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

bopenda
Menembus putaran waktu dengan inovasi Jabar

LKIP 2020 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No 528 Telp (022) 7566197-7568928
Fax: (022) 7564880 Website : www.bapenda.jabarprov.go.id e-mail :
bapenda@jabarprov.go.id
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siben dan Sandi Negara
Bandung 40286

DAFTAR ISI

IHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Tujuan Penulisan.....,.....	2
1. 3 Landasan Hukum	2
1. 4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1. 5 Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	13
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	20
2.3 Dukungan Anggaran Program Kegiatan.....	21
BAB III.....	69
AKUNTABILITAS KINERJA	69
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	70
3.2 Pencapaian target dan realisasi kinerja tahun 2020	70
3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	88
3.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	90
3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	91
3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	95
3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya,.....	120
BAB IV	130
PENUTUP	130

LAMPIRAN

- Pernyataan Telah Direviu
- Perjanjian Kinerja
- Indikator Kinerja Utama

- SK Tim Penyusun LKIP
- Mekanisme Pengumpulan Data LKIP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Renstra Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LKIP Tahun 2020 ini merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan hasil kinerja Tahun 2020 atau tahun pertama karena tahun 2018 merupakan tahun masa transisi antara Renstra 2013 – 2018 dan Renstra Tahun 2018 – 2023 dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023, disamping menyajikan faktor-faktor keberhasilan, juga memaparkan faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang amanah yang berorientasi kepuasan pelayanan publik merupakan Komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2018 – 2023, meskipun masih ada beberapa indikator sasaran yang masih belum optimal.

Untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan dan sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2010 ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. 2 (dua sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 90 – 100 (AA)
2. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 80 – 90 (A)
3. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 70 – 80 (BB)
4. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 60 – 70 (B)
5. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 50 – 60 (CC)
6. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 30 – 50 (C)
7. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 50 (D)

Pada Tahun Anggaran 2020 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp566,121,402,809.00 dengan realisasi sebesar

Rp459,267,717,307.00 tercapai sebesar (81.13%) karena balanja tunjangan insentif triwulan IV tidak diserap, dengan rincian sebagai berikut :

Biaya	Target Perubahan (Rp)	Realiasi (Rp.)	Capaian (%)
BELANJA LANGSUNG	171,356,692,661.00	162,452,645,665	94.80
BELANJA PEGAWAI	1,945,125,003.00	1,619,025,000	83.24
BELANJA BARANG DAN JASA	154,375,264,092.00	146,235,770,835	94.73
BELANJA MODAL	15,036,303,566.00	14,597,849,830	97.08
BELANJA TIDAK LANGSUNG	394,764,710,148.00	296,815,071,642	75.19
Total Belanja	566,121,402,809.00	459,267,717,307.00	81.13

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APBD maka seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI secara berturut-turut yang sembilan kali pada Tahun 2020.

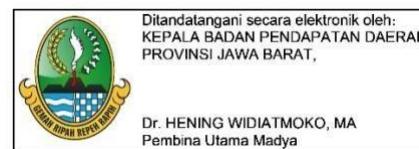
Dengan diraihnya kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka diharapkan kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang mandat pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendatang.

Bandung, 28 Februari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

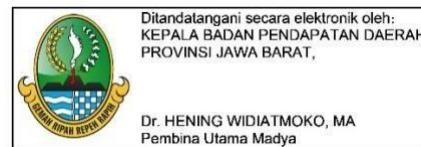
KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat memuat informasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja di tahun yang akan datang.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari SAKIP, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dituntut selalu melakukan pemberhanan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pertambuan. Capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

- Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 13. Surat Sekretariat Daerah Jawa Barat Nomor 061/92/Org Tanggal 09 Januari 2020 Perihal Penyusunan SAKIP PD.

1. 4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di bidang pendapatan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Sedangkan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Badan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Kepala, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Subbagian, 4 (empat) Kepala Bidang

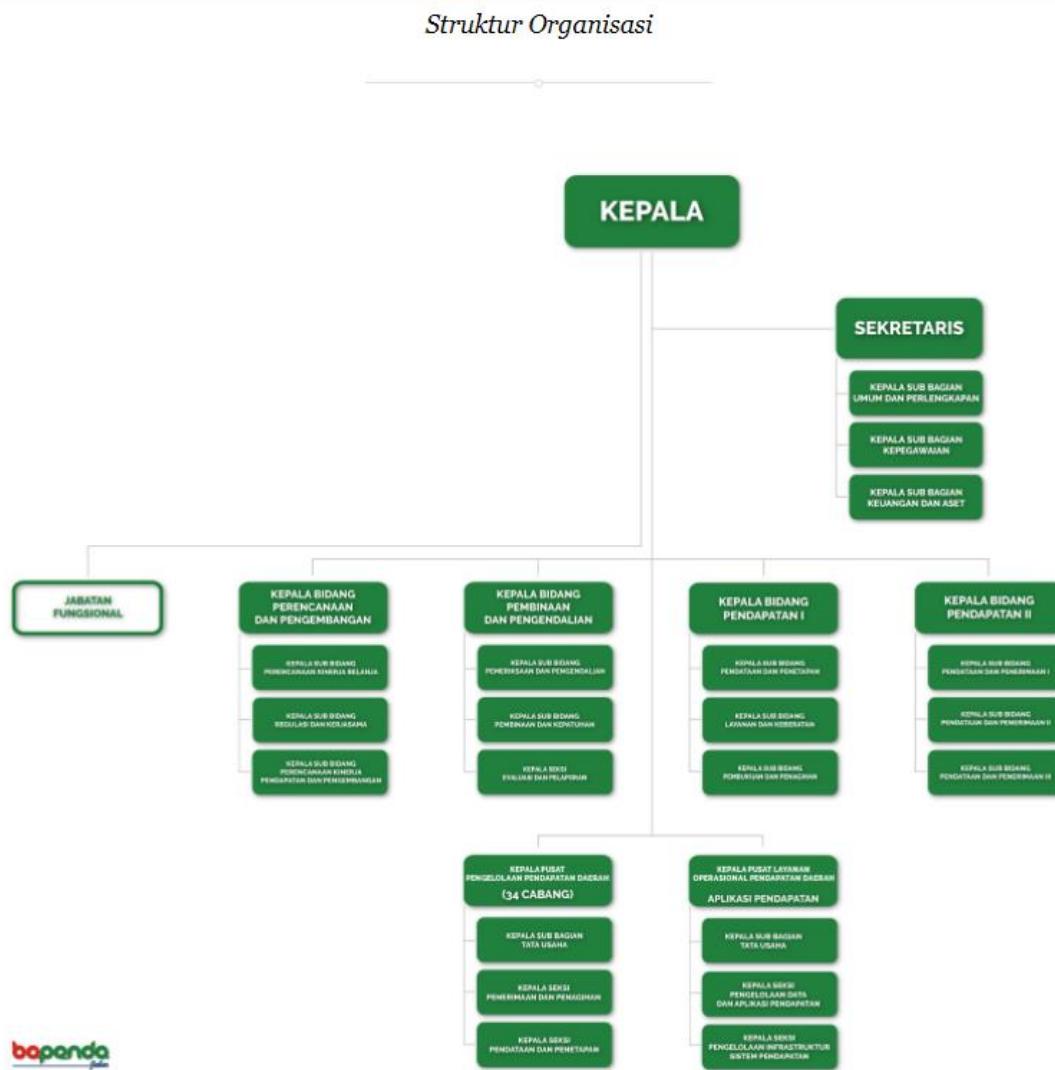
yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Subbidang, dengan susunan sebagai berikut :

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris
 - a. Subbagian Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset
 - c. Subbagian Umum dan Perlengkapan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
 - a. Subbidang Regulasi dan Kerjasama
 - b. Subbidang Perencanaan Kinerja Pendapatan dan Pengembangan Layanan
 - c. Subbidang Perencanaan Kinerja Belanja
4. Bidang Pendapatan I
 - a. Subbidang Pendapatan dan Penetapan
 - b. Subbidang Layanan dan Keberatan
 - c. Subbidang Pembukuan dan Penagihan
5. Bidang Pendapatan II
 - a. Subbidang Pendataan dan Penerimaan I
 - b. Subbidang Pendataan dan Penerimaan II
 - c. Subbidang Pendataan dan Penerimaan III
6. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
 - a. Subbidang Pembinaan dan Kepatuhan
 - b. Subbidang Pemeriksaan dan Pengendalian
 - c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Sumber : bapenda.jabarprov.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

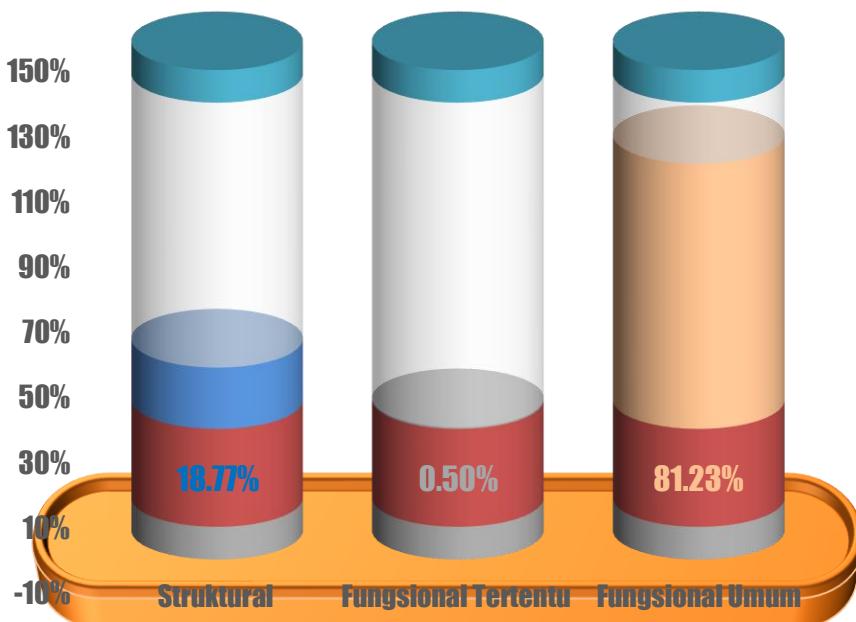
Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan memiliki kualitas pegawai cukup baik dan parameternya dapat dilihat dari proporsi pendidikan terakhir pegawai yang paling besar adalah lulusan S-1 sebanyak 329 orang (41,23%), S-2 sebanyak 210 orang (26,32%), SLTA sebanyak 180 orang (22,56%), S-3 sebanyak 3 orang (0,38%), D-III sebanyak 29 orang (3.42%) namun demikian memang masih ada pegawai yang masih setingkat SMP sebanyak 6 orang (0,75%) dan SD sebanyak 7 orang (0,88%) yang akan terus didorong untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Data Pegawai dengan klarifikasi berdasarkan jabatan, pendidikan, jenis kelamin dan usia diuraikan sebagai berikut :

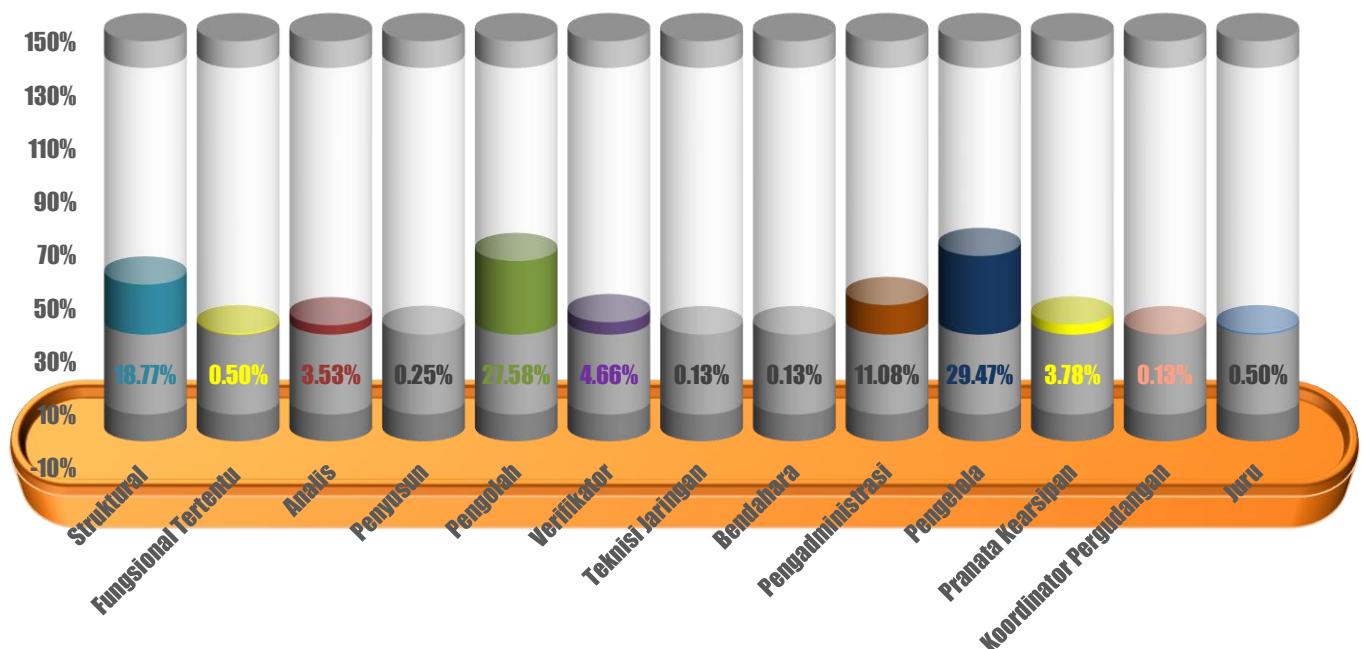
1. Berdasarkan Jabatan Secara Umum

NO.	JABATAN	POSISI PER 31 DES 2020	%
1.	Struktural	149	18.77%
2.	Fungsional Tertentu	4	0.50%
3.	Fungsional Umum	645	81.23%
	Jumlah	798	100,00%



Berdasarkan Jabatan Secara Rinci

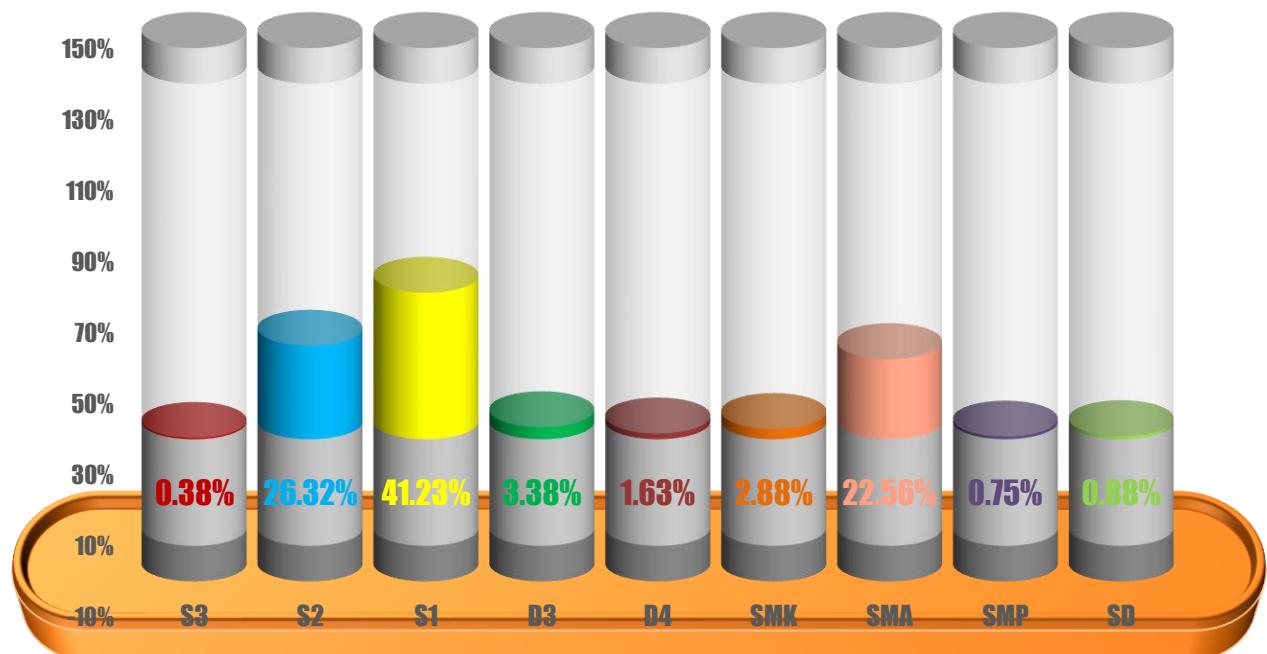
NO.	JABATAN	POSI PADA 31 DES 2020	%
1.	Struktural	149	18.77%
2.	Fungsional Tertentu	4	0.50%
3.	Analisis	28	3.53%
4.	Penyusun	2	0.25%
5.	Pengolah	219	27.58%
6.	Verifikator	37	4.66%
7.	Teknisi Jaringan	1	0.13%
8.	Bendahara	1	0.13%
9.	Pengadministrasi	88	11.08%
10.	Pengelola	234	29.47%
11.	Pranata Kearsipan	30	3.78%
12.	Koordinator Pergudangan	1	0.13%
13.	Juru	4	0.50%
	Jumlah	798	100%



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

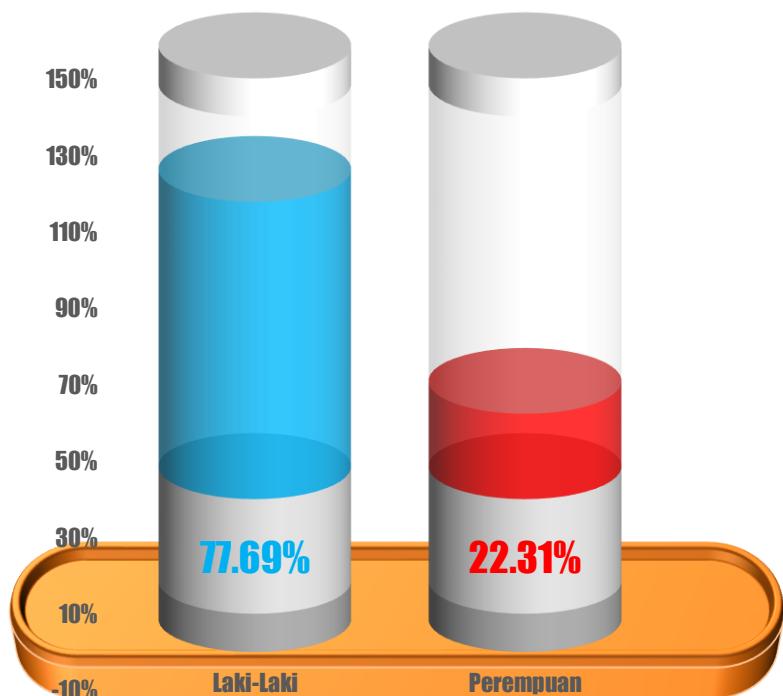
No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	S3	3	0.38%
2.	S2	210	26.32%
3.	S1	329	41.23%
4.	D3	27	3.38%
5.	D4	13	1.63%
6.	SMK	23	2.88%
7.	SMA	180	22.56%
8.	SMP	6	0.75%
9.	SD	7	0.88%
12.	Jumlah	798	100%



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Pria	620	77.69%
2.	Wanita	178	22.31%
	Jumlah	798	100,00%



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Berdasarkan Golongan

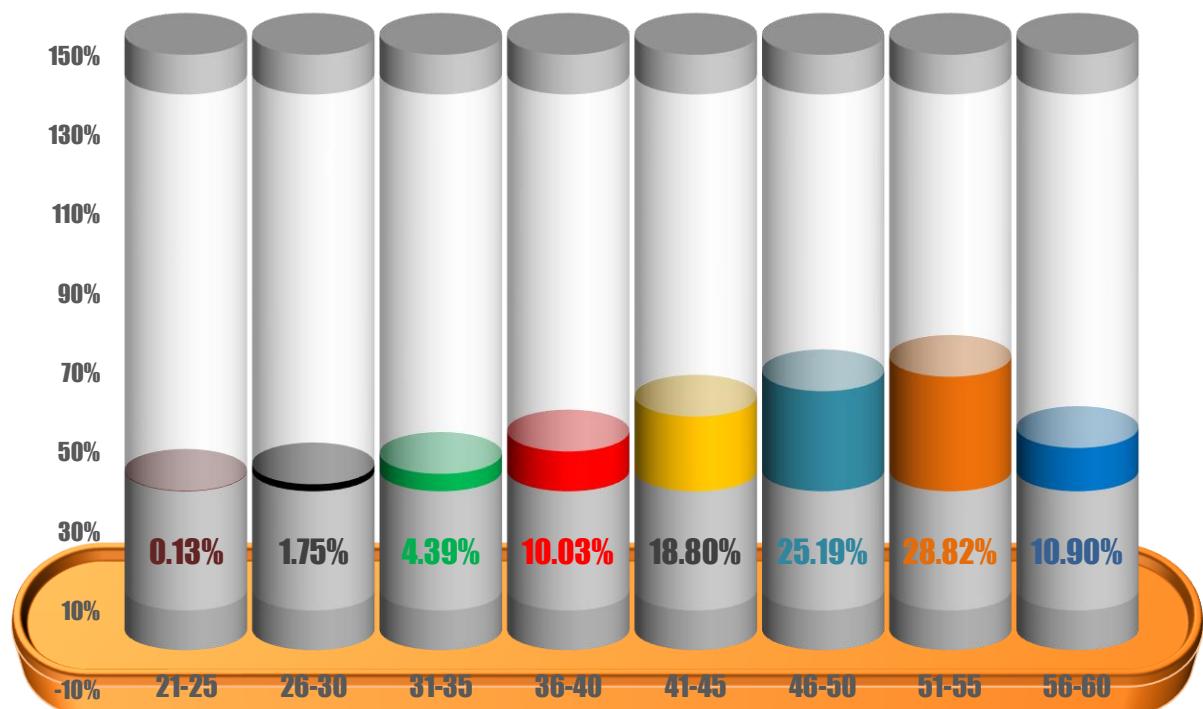
No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1.	Golongan IV/d	1	0.13%
2.	Golongan IV/c	0	0.00%
3.	Golongan IV/b	19	2.38%
4.	Golongan IV/a	77	9.65%
5.	Golongan III/d	165	20.68%
6.	Golongan III/c	150	18.80%
7.	Golongan III/b	139	17.42%
8.	Golongan III/a	65	8.15%
9.	Golongan II/d	77	9.65%
10.	Golongan II/c	52	6.52%
11.	Golongan II/b	31	3.88%
12.	Golongan II/a	14	1.75%
13.	Golongan I/d	5	0.63%
14.	Golongan I/c	1	0.13%
15.	Golongan I/b	2	0.25%
16.	Golongan I/a	0	0.00%
	Jumlah	798	100.00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Posisi (31 Des) Orang	%
1	16 sd 20 Tahun	0	0.00%
2	21 sd 25 Tahun	2	0.24%
3	26 sd 30 Tahun	10	1.21%
4	31 sd 35 Tahun	45	5.45%
5	36 sd 40 Tahun	77	9.32%
6	41 sd 45 Tahun	143	17.31%
7	46 sd 50 Tahun	217	26.27%
8	51 sd 55 Tahun	241	29.18%
9	56 sd 60 Tahun	91	11.02%
10	61 sd 65 Tahun	0	0.00%
11	> 65 Tahun	0	0.00%
	Jumlah	826	100.00%



1.6 Sistematika Penulisan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

- Bab I PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Capaian Kinerja Organisasi;
2. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2020;
3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
4. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses adalah pendekatan politis. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Penelaahan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan untuk mengetahui arah pembangunan Provinsi Jawa Barat sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat hasil Pilkada Serentak Tahun 2018 yang telah dijabarkan kedalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut memiliki makna sebagai berikut:

- ❖ **Jawa Barat Juara Lahir Batin:** pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.
- ❖ **Inovasi:** pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
- ❖ **Kolaborasi:** perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa** melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban;
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif** melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelaanjutan** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan;
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan yang hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelaanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Tujuan , Sasaran dan Indikator Sasaran

Tugas Pokok Bapenda	Visi RPJMD	Misi ke-5	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah	Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang makin Efektif, Andal, dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perentase Pendapatan Asli D terhadap Pendapatan Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Karena itu, selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta harus dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

“Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang makin Efektif, Andal, dan Akuntabel”

Pernyataan Tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Terwujudnya: menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

Tata Kelola Pendapatan Daerah: tata cara pengelolaan Pendapatan Daerah yang merupakan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Makin: kian bertambah. Menunjukkan semangat untuk mencapai kinerja yang berkemajuan, terutama untuk terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2018 berada di angka 3,150 poin.

Efektif: mangkus/berhasil guna, untuk menggambarkan kemampuan Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.

Andal: dapat dipercaya. Tidak dipungkiri bahwa hingga saat ini masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap instansi pemerintah, karena instansi pemerintah masih identik dengan kumpulan birokrat yang ingin dilayani bukan melayani, pelayanan yang masih lamban, prosedur yang berbelit-belit dan aparatur yang tidak profesional bahkan cenderung koruptif. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berpotensi menjadikan masyarakat resisten terhadap kewajiban perpajakan. Karena itu, untuk mengubah persepsi negatif masyarakat, instansi pemerintah harus mampu menjalankan agenda reformasi birokrasi secara optimal, antara lain dalam sektor pelayanan publik yang harus berorientasi kepada *customer satisfaction* (kepuasan masyarakat pengguna layanan), dengan cara menghadirkan inovasi-inovasi pelayanan yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai manifestasi dari paradigma “birokrasi yang melayani”. Pada saat yang sama, untuk membangun kepercayaan masyarakat, pemerintah harus terbuka (transparan) dengan cara menyediakan informasi publik serta menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan melalui kanal-kanal informasi, baik media massa, media luar ruang, maupun *platform* media sosial.

Sasaran

Dengan hadirnya birokrasi yang melayani dan transparan itulah, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat, sehingga pada gilirannya terbangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing, antara lain kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat prosedur.

Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Secara umum, akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi,

sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan itulah, mutlak hadirnya spirit ilahiah selain mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan tugas, sehingga roda organisasi senantiasa berada dalam koridor perundang-undangan dan bermuara pada tercapainya target kinerja organisasi yang telah direncanakan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari APBN. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (*public service delivery*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Pada tahun 2019, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 59,26 persen, dan ditargetkan pada akhir periode Renstra yaitu tahun 2023 persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah bisa mencapai 61,59 persen.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sangat penting, karena pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini antara lain terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Jika tidak ditangani dengan baik, hal itu dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, seiring dengan

kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai unit penyelenggara pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga dapat bermuara pada terwujudnya *zero complain* dalam pelayanan publik.

Salah satu cara mengukur kualitas pelayanan publik adalah melalui survey kepuasan masyarakat, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan sekaligus menjadi masukan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik yang diberikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Terdapat 9 (sembilan) Unsur Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu:

a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

d. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

g. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.1.1 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan strategi dan kebijakan operasional yang tepat dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi serta analisis atas perkiraan perubahan lingkungan yang akan terus berkembang selama kurun tahun 2018-2023 hingga kondisi sumber daya organisasi yang tersedia, telah dirumuskan sejumlah strategi berikut :

3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi unsur-unsur penunjang pelayanan publik, meliputi: Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan; Waktu Penyelesaian pelayanan; Biaya/Tarif pelayanan; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana atau Aplikasi pelayanan; Perilaku Pelaksana atau Aplikasi pelayanan; Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; serta Sarana dan Prasarana pelayanan.
4. Mengoptimalkan Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja serta Pembinaan dan Pengendalian Internal.
5. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja serta kompetensi dan kinerja aparatur.

2. Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah

kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

Strategi 1: Meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Arah Kebijakan:

1. Mendorong kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, terutama yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU);
2. Mendorong dilakukannya balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya;
3. Mendorong kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan;
4. Mendorong kepemilikan SIPPDA bagi para pelaku usaha yang memanfaatkan air permukaan;
5. Mengoptimalkan layanan pajak daerah menuju *zero complain*;
6. Meningkatkan akurasi basis data kendaraan bermotor;
7. Meningkatkan akurasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
8. Meningkatkan akurasi realisasi Dana Perimbangan;
9. Memastikan semua Badan Usaha PBBKB yang ada di Jawa Barat menjadi Wajib Pungut;
10. Mengoptimalkan pendayagunaan Aset Daerah untuk menghasilkan PAD;
11. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil dan instansi terkait yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah;
12. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan *stakeholders* yang terkait dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pendapatan dan pelayanan;
13. Mengoptimalkan Pendataan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Berbasis *Mobile Sistem*.

Strategi 2: Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi unsur-unsur penunjang pelayanan publik.

Arah Kebijakan:

1. Melakukan simplifikasi dan perbaikan terhadap Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat pengguna layanan; Meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan yang berlaku;

2. Membangun maklumat pelayanan yang memuat komitmen penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan prima;
3. Memberikan jaminan kepastian serta transparansi waktu dan biaya pelayanan; Meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* aparatur pemberi layanan;
4. Mengembangkan Kreativitas dan Inovasi Pelayanan serta Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Teknologi Informasi;
5. Mengoptimalkan penanganan atas pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat;
6. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana untuk kenyamanan masyarakat pengguna layanan;
7. Menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala.

Strategi 3: Mengoptimalkan Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja serta Pembinaan dan Pengendalian Internal.

Arah Kebijakan:

1. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen Rencana Strategis;
2. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen Rencana Kerja;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja pendapatan daerah;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja belanja;
5. Meningkatkan kajian pengembangan layanan pendapatan daerah;

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53Tahun 2014tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka akan terwujud komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. PK ini juga merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2020.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Murni	Target Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,66 persen	57,14 persen
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	83,30 poin	83,17 poin

Didukung oleh 102 (seratus dua) program sebagai berikut :

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5	6
1	3.02.02.179.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah	9,086,613,414.00	8,834,614,000	97.23
2	3.02.02.181.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Pendapatan Daerah	53,549,344,993.00	50,878,704,381	95.01
3	3.02.02.183.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	3,652,378,360.00	3,083,680,061	84.43
4	3.02.02.184.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Bandung Barat	1,962,863,755.00	1,819,639,558	92.70
5	3.02.02.185.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Bandung I Rancaekek	2,459,431,848.00	2,387,697,263	97.08
6	3.02.02.186.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Bandung II Soreang	2,501,046,075.00	2,445,517,709	97.78
7	3.02.02.187.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Bekasi	3,652,638,400.00	3,518,427,569	96.33
8	3.02.02.188.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Bogor	3,904,797,365.00	3,530,939,345	90.43
9	3.02.02.189.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Ciamis	1,596,925,067.00	1,531,306,610	95.89
10	3.02.02.190.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Cianjur	2,319,883,827.00	2,179,068,709	93.93
11	3.02.02.191.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Cirebon I Sumber	2,290,741,524.00	2,211,118,659	96.52
12	3.02.02.192.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Cirebon II Ciledug	1,455,113,284.00	1,348,210,867	92.65

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5	6
13	3.02.02.193.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Garut	2,306,322,792.00	2,247,909,990	97.47
14	3.02.02.194.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Indramayu I	2,713,700,723.00	2,627,812,373	96.84
15	3.02.02.195.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Indramayu II Haurgeulis	1,826,311,194.00	1,800,672,023	98.60
16	3.02.02.196.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Karawang	2,651,375,400.00	2,507,954,267	94.59
17	3.02.02.197.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Kuningan	1,720,197,606.00	1,557,553,445	90.55
18	3.02.02.198.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Majalengka	1,502,845,325.00	1,444,396,427	96.11
19	3.02.02.199.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Pangandaran	2,065,601,094.00	2,036,003,769	98.57
20	3.02.02.200.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Purwakarta	2,292,937,377.00	2,259,354,443	98.54
21	3.02.02.201.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Subang	1,577,549,471.00	1,492,296,496	94.60
22	3.02.02.202.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Sukabumi I Cibadak	1,951,843,312.00	1,896,100,318	97.14
23	3.02.02.203.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Sukabumi II Pelabuhan Ratu	1,821,721,891.00	1,694,010,620	92.99
24	3.02.02.204.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Sumedang	2,075,954,167.00	1,919,081,279	92.44
25	3.02.02.205.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Tasikmalaya	1,700,099,526.00	1,508,854,225	88.75
26	3.02.02.206.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Bandung I Pajajaran	2,569,023,346.00	2,556,363,637	99.51
27	3.02.02.207.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Bandung II Kawaluyaan	3,659,095,607.00	3,502,555,540	95.72
28	3.02.02.208.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Bandung III Soekarno Hatta	1,944,929,376.00	1,898,183,980	97.60
29	3.02.02.209.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Banjar	1,338,724,309.00	1,263,948,854	94.41
30	3.02.02.210.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Bekasi	4,314,334,535.00	4,056,207,934	94.02
31	3.02.02.211.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Bogor	2,127,701,359.00	2,005,885,714	94.27
32	3.02.02.212.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Cimahi	1,451,455,135.00	1,432,369,699	98.69

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5	6
33	3.02.02.213.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Cirebon	1,658,195,294.00	1,591,693,973	95.99
34	3.02.02.214.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Depok I	2,665,113,155.00	2,274,292,791	85.34
35	3.02.02.215.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Depok II Cinere	2,020,399,048.00	1,891,293,352	93.61
36	3.02.02.216.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Sukabumi	1,369,498,254.00	1,354,783,221	98.93
37	3.02.02.217.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Tasikmalaya	1,370,122,028.00	1,258,554,994	91.86
38	3.02.02.218.	Program Pembinaan Dan Pengendalian Unit Kerja Bapenda	747,634,224.00	746,637,063	99.87
39	3.02.02.222.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah I	742,443,200.00	639,695,650	86.16
40	3.02.02.223.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah II	395,370,000.00	369,697,586	93.51
41	3.02.02.226.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	821,976,706.00	714,809,999	86.96
42	3.02.02.227.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Indramayu I	445,107,156.00	441,565,000	99.20
43	3.02.02.229.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Bandung Barat	167,766,528.00	166,334,200	99.15
44	3.02.02.230.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Bandung I Rancaekek	316,952,098.00	312,020,000	98.44
45	3.02.02.231.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Bandung II Soreang	278,975,000.00	277,000,000	99.29
46	3.02.02.232.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Bekasi	178,426,363.00	175,945,000	98.61
47	3.02.02.233.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Bogor	515,368,500.00	465,578,000	90.34
48	3.02.02.235.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Cianjur	368,840,840.00	340,689,899	92.37
49	3.02.02.236.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Cirebon I Sumber	502,742,474.00	496,236,900	98.71
50	3.02.02.237.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Cirebon II Ciledug	7,000,000.00	7,000,000	100.00
51	3.02.02.238.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Garut	450,000.00	425,000	94.44
52	3.02.02.239.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Karawang	11,000,000.00	9,600,000	87.27

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5	6
53	3.02.02.244.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Subang	14,550,000.00	-	-
54	3.02.02.245.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Sukabumi I Cibadak	34,356,500.00	30,458,050	88.65
55	3.02.02.247.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Sumedang	223,462,688.00	222,149,000	99.41
56	3.02.02.248.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Tasikmalaya	459,580,000.00	456,670,000	99.37
57	3.02.02.249.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Bandung Ii Kawaluyaan	290,232,798.00	276,543,120	95.28
58	3.02.02.250.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Bandung I Pajajaran	77,050,000.00	75,650,000	98.18
59	3.02.02.251.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Bandung Iii Soekarno Hatta	77,050,000.00	76,450,000	99.22
60	3.02.02.252.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Banjar	84,450,000.00	83,420,000	98.78
61	3.02.02.253.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Bekasi	680,988,711.00	642,611,640	94.36
62	3.02.02.254.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Bogor	84,050,000.00	81,030,000	96.41
63	3.02.02.255.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Cimahi	198,577,120.00	196,098,200	98.75
64	3.02.02.257.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Depok I	77,050,000.00	76,200,000	98.90
65	3.02.02.258.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Depok Ii Cinere	77,050,000.00	68,050,000	88.32
66	3.02.02.259.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Sukabumi	212,620,000.00	211,895,000	99.66
67	3.02.02.261.	Program Perencanaan Kinerja, Pengembangan Layanan, Regulasi Dan Kerja Sama Pendapatan Daerah	1,555,470,098.00	1,405,395,790	90.35
68	3.02.02.262.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Data Dan Aplikasi Serta Infrastruktur Sistem Pendapatan Daerah	1,586,437,341.00	1,556,706,450	98.13
69	3.02.02.263.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Bandung Barat	393,440,000.00	362,646,100	92.17
70	3.02.02.264.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Bandung I Rancaekek	817,020,000.00	794,310,000	97.22
71	3.02.02.265.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Bandung Ii Soreang	651,074,650.00	622,933,100	95.68

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5	6
72	3.02.02.266.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Bekasi	597,415,000.00	538,551,472	90.15
73	3.02.02.267.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Bogor	397,124,000.00	392,489,500	98.83
74	3.02.02.268.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Ciamis	440,169,000.00	432,579,000	98.28
75	3.02.02.269.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Cianjur	504,995,000.00	484,042,500	95.85
76	3.02.02.270.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Cirebon I Sumber	450,484,000.00	440,774,000	97.84
77	3.02.02.271.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Cirebon II Ciledug	296,280,000.00	288,328,000	97.32
78	3.02.02.272.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Garut	632,076,000.00	608,054,000	96.20
79	3.02.02.273.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Indramayu I	681,410,000.00	653,346,500	95.88
80	3.02.02.274.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis	469,530,000.00	437,441,500	93.17
81	3.02.02.275.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Karawang	1,003,744,800.00	976,790,000	97.31
82	3.02.02.276.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Kuningan	354,150,000.00	283,446,200	80.04
83	3.02.02.277.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Majalengka	456,930,100.00	426,018,750	93.23
84	3.02.02.278.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Pangandaran	430,813,300.00	430,813,300	100.00
85	3.02.02.279.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Purwakarta	797,120,000.00	722,034,500	90.58
86	3.02.02.280.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Subang	715,120,000.00	687,448,000	96.13
87	3.02.02.281.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Sukabumi I Cibadak	667,218,132.00	638,635,750	95.72
88	3.02.02.282.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Sukabumi II Pelabuhan Ratu	535,113,003.00	500,193,000	93.47
89	3.02.02.283.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Sumedang	612,468,000.00	592,072,200	96.67
90	3.02.02.284.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Tasikmalaya	396,560,000.00	298,870,000	75.37

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5	6
91	3.02.02.285.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	700,670,000.00	669,882,500	95.61
92	3.02.02.286.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	683,008,000.00	641,711,400	93.95
93	3.02.02.287.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	1,749,908,000.00	1,714,129,400	97.96
94	3.02.02.288.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	255,291,000.00	242,041,000	94.81
95	3.02.02.289.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	644,405,000.00	594,399,500	92.24
96	3.02.02.290.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	389,810,000.00	378,750,600	97.16
97	3.02.02.291.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	383,211,250.00	377,143,250	98.42
98	3.02.02.292.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	231,215,000.00	228,839,000	98.97
99	3.02.02.293.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	560,700,000.00	534,092,501	95.25
100	3.02.02.294.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	537,710,000.00	454,196,000	84.47
101	3.02.02.295.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	220,981,845.00	220,431,000	99.75
102	3.02.02.296.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	339,670,000.00	315,592,500	92.91
	5.2.	BELANJA LANGSUNG	171,356,692,661.00	162,452,645,665	94.80
	5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1,945,125,003.00	1,619,025,000	83.24
	5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154,375,264,092.00	146,235,770,835	94.73
	5.2.3.	BELANJA MODAL	15,036,303,566.00	14,597,849,830	97.08

Berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam rencana strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 berikut anggaran yang tersedia untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 disusun Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang mencakup sasaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

berikut indikator kinerjanya, program dan kegiatan yang dilaksanakan berikut indikator kinerja serta targetnya. Dari 2 Sasaran Strategis ditetapkan 2 Sasaran Strategis yang merupakan Program Unggulan yang dipenjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020.

1.3 Dukungan Anggaran Program Kegiatan

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang danganngan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung maupun tidak langsung dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang didanai dari Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 102 (Program) Program dan 475 (empat ratus tujuh puluh tujuh lima) kegiatan pada anggaran murni dan 424 (empat ratus dua puluh empat) kegiatan pada anggaran perubahan dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.179.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah	9,086,613,414.00	8,834,614,000	97.23
3.02.02.179.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	9,086,613,414.00	8,834,614,000	97.23
3.02.02.181.	Program Dukungan Manajemen Badan Perkantoran Pendapatan Daerah	53,549,344,993.00	50,878,704,381	95.01
3.02.02.181.011.	Penyediaan Langganan Kantor	25,788,935,055.00	24,322,551,559	94.31
3.02.02.181.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	2,184,569,000.00	2,170,745,355	99.37
3.02.02.181.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	5,254,821,000.00	5,099,140,987	97.04
3.02.02.181.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	9,238,405,691.00	8,711,961,241	94.30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.181.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	7,450,678,834.00	7,161,261,767	96.12
3.02.02.181.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	894,574,100.00	861,908,480	96.35
3.02.02.181.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	2,469,611,313.00	2,283,384,992	92.46
3.02.02.181.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	51,950,000.00	51,950,000	100.00
3.02.02.181.019.	Penyediaan Diklat, Kursus Singkat Dan Bimtek Aparatur	215,800,000.00	215,800,000	100.00
3.02.02.183.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	3,652,378,360.00	3,083,680,061	84.43
3.02.02.183.010.	Penyediaan Langganan Kantor	220,000,000.00	165,836,567	75.38
3.02.02.183.011.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	557,590,000.00	452,034,876	81.07
3.02.02.183.013.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	444,051,220.00	355,504,894	80.06
3.02.02.183.014.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,139,573,140.00	1,125,540,480	98.77
3.02.02.183.015.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	233,094,000.00	148,337,673	63.64
3.02.02.183.016.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	998,070,000.00	799,575,571	80.11
3.02.02.183.017.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	60,000,000.00	36,850,000	61.42
3.02.02.184.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	1,962,863,755.00	1,819,639,558	92.70
3.02.02.184.011.	Penyediaan Langganan Kantor	17,820,000.00	13,250,000	74.35
3.02.02.184.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	118,913,000.00	98,844,300	83.12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.184.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	16,200,000.00	14,932,000	92.17
3.02.02.184.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	207,542,255.00	202,935,645	97.78
3.02.02.184.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,005,978,000.00	971,793,950	96.60
3.02.02.184.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	294,691,000.00	223,001,463	75.67
3.02.02.184.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	300,219,500.00	293,382,200	97.72
3.02.02.184.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	1,500,000.00	1,500,000	100.00
3.02.02.185.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	2,459,431,848.00	2,387,697,263	97.08
3.02.02.185.011.	Penyediaan Langganan Kantor	28,200,000.00	26,602,020	94.33
3.02.02.185.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	136,297,000.00	129,217,700	94.81
3.02.02.185.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	53,500,000.00	52,716,950	98.54
3.02.02.185.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	219,837,414.00	217,601,140	98.98
3.02.02.185.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,207,114,684.00	1,195,548,139	99.04
3.02.02.185.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	186,641,000.00	159,723,676	85.58
3.02.02.185.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	617,341,750.00	595,787,638	96.51
3.02.02.185.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	10,500,000.00	10,500,000	100.00
3.02.02.186.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,501,046,075.00	2,445,517,709	97.78

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
	Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang			
3.02.02.186.011.	Penyediaan Langganan Kantor	8,380,000.00	6,378,600	76.12
3.02.02.186.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	144,154,800.00	140,226,680	97.28
3.02.02.186.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	11,500,000.00	10,665,000	92.74
3.02.02.186.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	244,132,323.00	238,597,800	97.73
3.02.02.186.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,407,192,545.00	1,400,766,450	99.54
3.02.02.186.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	201,065,000.00	176,502,309	87.78
3.02.02.186.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	475,621,407.00	463,380,870	97.43
3.02.02.186.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	9,000,000.00	9,000,000	100.00
3.02.02.187.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	3,652,638,400.00	3,518,427,569	96.33
3.02.02.187.011.	Penyediaan Langganan Kantor	25,104,000.00	18,813,248	74.94
3.02.02.187.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	313,545,800.00	277,037,192	88.36
3.02.02.187.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	251,480,000.00	245,932,000	97.79
3.02.02.187.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	278,880,000.00	273,299,900	98.00
3.02.02.187.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	2,327,543,557.00	2,326,470,067	99.95
3.02.02.187.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	222,035,043.00	165,875,162	74.71
3.02.02.187.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	223,550,000.00	205,750,000	92.04

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.187.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	10,500,000.00	5,250,000	50.00
3.02.02.188.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	3,904,797,365.00	3,530,939,345	90.43
3.02.02.188.011.	Penyediaan Langganan Kantor	41,004,260.00	34,995,859	85.35
3.02.02.188.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	281,255,300.00	275,806,872	98.06
3.02.02.188.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	425,500,000.00	319,950,000	75.19
3.02.02.188.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	414,091,505.00	404,033,390	97.57
3.02.02.188.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	2,202,014,550.00	1,961,178,224	89.06
3.02.02.188.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	305,471,000.00	302,365,000	98.98
3.02.02.188.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	233,960,750.00	231,110,000	98.78
3.02.02.188.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	1,500,000.00	1,500,000	100.00
3.02.02.189.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	1,596,925,067.00	1,531,306,610	95.89
3.02.02.189.011.	Penyediaan Langganan Kantor	35,530,000.00	28,478,868	80.15
3.02.02.189.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	123,825,500.00	110,181,100	88.98
3.02.02.189.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	97,000,000.00	93,500,000	96.39
3.02.02.189.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	174,377,792.00	170,585,730	97.83
3.02.02.189.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	895,577,775.00	871,677,612	97.33

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.189.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	165,614,000.00	158,403,300	95.65
3.02.02.189.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	96,000,000.00	89,980,000	93.73
3.02.02.189.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	9,000,000.00	8,500,000	94.44
3.02.02.190.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	2,319,883,827.00	2,179,068,709	93.93
3.02.02.190.011.	Penyediaan Langganan Kantor	10,200,000.00	9,498,800	93.13
3.02.02.190.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	137,260,000.00	135,731,930	98.89
3.02.02.190.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	1,189,000,000.00	1,084,750,000	91.23
3.02.02.190.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	173,729,281.00	168,735,090	97.13
3.02.02.190.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	639,987,046.00	616,285,554	96.30
3.02.02.190.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	118,057,500.00	116,462,335	98.65
3.02.02.190.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	48,500,000.00	44,455,000	91.66
3.02.02.190.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	3,150,000.00	3,150,000	100.00
3.02.02.191.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	2,290,741,524.00	2,211,118,659	96.52
3.02.02.191.011.	Penyediaan Langganan Kantor	22,926,000.00	20,533,760	89.57
3.02.02.191.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	296,013,900.00	288,108,137	97.33

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.191.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	299,500,000.00	299,500,000	100.00
3.02.02.191.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	192,626,084.00	189,680,100	98.47
3.02.02.191.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	949,007,540.00	897,563,459	94.58
3.02.02.191.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	171,518,000.00	161,805,107	94.34
3.02.02.191.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	348,500,000.00	343,278,096	98.50
3.02.02.191.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	10,650,000.00	10,650,000	100.00
3.02.02.192.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug	1,455,113,284.00	1,348,210,867	92.65
3.02.02.192.011.	Penyediaan Langganan Kantor	3,195,000.00	2,917,500	91.31
3.02.02.192.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	196,430,000.00	188,247,088	95.83
3.02.02.192.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	15,000,000.00	14,970,000	99.80
3.02.02.192.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	75,792,564.00	72,474,030	95.62
3.02.02.192.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	900,468,720.00	854,834,185	94.93
3.02.02.192.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	89,573,000.00	76,543,064	85.45
3.02.02.192.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	165,654,000.00	129,225,000	78.01
3.02.02.192.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	9,000,000.00	9,000,000	100.00
3.02.02.193.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	2,306,322,792.00	2,247,909,990	97.47

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.193.011.	Penyediaan Langganan Kantor	7,415,269.00	5,972,527	80.54
3.02.02.193.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	193,752,732.00	177,244,150	91.48
3.02.02.193.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	41,550,000.00	41,550,000	100.00
3.02.02.193.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	234,299,289.00	219,340,900	93.62
3.02.02.193.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	799,561,400.00	793,609,587	99.26
3.02.02.193.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	138,613,000.00	133,008,931	95.96
3.02.02.193.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	871,631,102.00	857,683,895	98.40
3.02.02.193.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	19,500,000.00	19,500,000	100.00
3.02.02.194.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	2,713,700,723.00	2,627,812,373	96.84
3.02.02.194.011.	Penyediaan Langganan Kantor	77,210,000.00	63,201,500	81.86
3.02.02.194.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	346,068,300.00	333,951,000	96.50
3.02.02.194.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	45,025,000.00	45,025,000	100.00
3.02.02.194.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	232,556,270.00	225,370,700	96.91
3.02.02.194.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	880,185,150.00	858,335,650	97.52
3.02.02.194.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	257,776,001.00	244,775,223	94.96
3.02.02.194.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	841,230,002.00	825,003,300	98.07
3.02.02.194.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	33,650,000.00	32,150,000	95.54

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.195.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	1,826,311,194.00	1,800,672,023	98.60
3.02.02.195.011.	Penyediaan Langganan Kantor	27,750,000.00	23,861,430	85.99
3.02.02.195.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	336,324,250.00	334,902,500	99.58
3.02.02.195.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	24,000,000.00	24,000,000	100.00
3.02.02.195.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	199,884,044.00	190,574,300	95.34
3.02.02.195.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	855,732,900.00	852,700,694	99.65
3.02.02.195.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	149,920,000.00	145,878,099	97.30
3.02.02.195.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	209,200,000.00	207,730,000	99.30
3.02.02.195.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	23,500,000.00	21,025,000	89.47
3.02.02.196.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	2,651,375,400.00	2,507,954,267	94.59
3.02.02.196.011.	Penyediaan Langganan Kantor	21,078,200.00	17,965,144	85.23
3.02.02.196.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	178,197,000.00	152,880,500	85.79
3.02.02.196.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	407,500,000.00	364,954,499	89.56
3.02.02.196.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	258,750,850.00	249,697,900	96.50
3.02.02.196.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,421,480,350.00	1,421,070,624	99.97

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.196.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	189,719,000.00	147,196,200	77.59
3.02.02.196.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	159,050,000.00	138,589,400	87.14
3.02.02.196.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	15,600,000.00	15,600,000	100.00
3.02.02.197.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	1,720,197,606.00	1,557,553,445	90.55
3.02.02.197.011.	Penyediaan Langganan Kantor	56,340,000.00	46,986,638	83.40
3.02.02.197.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	187,280,500.00	170,786,114	91.19
3.02.02.197.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	24,000,000.00	23,893,000	99.55
3.02.02.197.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	56,930,212.00	53,298,600	93.62
3.02.02.197.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	804,095,300.00	778,204,404	96.78
3.02.02.197.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	177,391,000.00	130,762,424	73.71
3.02.02.197.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	404,660,594.00	349,272,265	86.31
3.02.02.197.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	9,500,000.00	4,350,000	45.79
3.02.02.198.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	1,502,845,325.00	1,444,396,427	96.11
3.02.02.198.011.	Penyediaan Langganan Kantor	24,184,000.00	22,912,905	94.74
3.02.02.198.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	210,857,000.00	199,691,710	94.70

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.198.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	14,000,000.00	13,500,000	96.43
3.02.02.198.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	71,635,350.00	58,349,550	81.45
3.02.02.198.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	860,568,975.00	852,579,539	99.07
3.02.02.198.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	90,687,000.00	81,133,423	89.47
3.02.02.198.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	218,313,000.00	206,329,300	94.51
3.02.02.198.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	12,600,000.00	9,900,000	78.57
3.02.02.199.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	2,065,601,094.00	2,036,003,769	98.57
3.02.02.199.011.	Penyediaan Langganan Kantor	15,080,000.00	14,879,270	98.67
3.02.02.199.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	280,526,000.00	278,450,000	99.26
3.02.02.199.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	17,485,000.00	17,440,000	99.74
3.02.02.199.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	133,789,025.00	133,539,800	99.81
3.02.02.199.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	788,902,500.00	781,057,856	99.01
3.02.02.199.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	138,798,400.00	131,627,943	94.83
3.02.02.199.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	688,270,169.00	676,258,900	98.25
3.02.02.199.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	2,750,000.00	2,750,000	100.00
3.02.02.200.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,292,937,377.00	2,259,354,443	98.54

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
	Wilayah Kabupaten Purwakarta			
3.02.02.200.011.	Penyediaan Langganan Kantor	23,567,395.00	21,848,195	92.71
3.02.02.200.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	272,960,550.00	269,933,350	98.89
3.02.02.200.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	26,200,000.00	26,200,000	100.00
3.02.02.200.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	167,656,888.00	159,409,450	95.08
3.02.02.200.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,229,172,144.00	1,221,614,148	99.39
3.02.02.200.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	191,342,000.00	188,033,400	98.27
3.02.02.200.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	375,588,400.00	365,865,900	97.41
3.02.02.200.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	6,450,000.00	6,450,000	100.00
3.02.02.201.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	1,577,549,471.00	1,492,296,496	94.60
3.02.02.201.011.	Penyediaan Langganan Kantor	24,783,000.00	19,354,340	78.10
3.02.02.201.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	172,711,000.00	168,470,471	97.54
3.02.02.201.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	68,350,000.00	67,810,000	99.21
3.02.02.201.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	63,525,361.00	61,774,700	97.24
3.02.02.201.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	913,808,910.00	913,324,650	99.95
3.02.02.201.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	195,471,200.00	169,494,135	86.71
3.02.02.201.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	132,600,000.00	85,768,200	64.68

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.201.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	6,300,000.00	6,300,000	100.00
3.02.02.202.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	1,951,843,312.00	1,896,100,318	97.14
3.02.02.202.011.	Penyediaan Langganan Kantor	13,110,000.00	11,935,000	91.04
3.02.02.202.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	225,186,600.00	224,208,000	99.57
3.02.02.202.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	55,290,000.00	54,790,000	99.10
3.02.02.202.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	113,962,938.00	111,002,500	97.40
3.02.02.202.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,181,671,170.00	1,137,961,800	96.30
3.02.02.202.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	118,931,200.00	115,819,018	97.38
3.02.02.202.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	243,691,404.00	240,384,000	98.64
3.02.02.203.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	1,821,721,891.00	1,694,010,620	92.99
3.02.02.203.011.	Penyediaan Langganan Kantor	26,708,000.00	16,801,030	62.91
3.02.02.203.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	185,295,025.00	182,870,500	98.69
3.02.02.203.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	97,000,000.00	97,000,000	100.00
3.02.02.203.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	71,805,894.00	70,311,500	97.92
3.02.02.203.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,235,626,172.00	1,125,738,950	91.11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.203.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	172,286,800.00	168,318,640	97.70
3.02.02.203.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	33,000,000.00	32,970,000	99.91
3.02.02.204.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	2,075,954,167.00	1,919,081,279	92.44
3.02.02.204.011.	Penyediaan Langganan Kantor	30,278,000.00	23,200,891	76.63
3.02.02.204.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	128,388,800.00	128,332,500	99.96
3.02.02.204.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	19,500,000.00	19,480,000	99.90
3.02.02.204.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	66,721,251.00	63,942,450	95.84
3.02.02.204.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,618,700,620.00	1,512,002,427	93.41
3.02.02.204.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	144,726,500.00	113,661,011	78.54
3.02.02.204.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	62,288,996.00	53,112,000	85.27
3.02.02.204.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	5,350,000.00	5,350,000	100.00
3.02.02.205.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1,700,099,526.00	1,508,854,225	88.75
3.02.02.205.011.	Penyediaan Langganan Kantor	41,464,126.00	29,906,001	72.13
3.02.02.205.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	194,692,800.00	159,273,500	81.81
3.02.02.205.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	67,000,000.00	61,000,000	91.04
3.02.02.205.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	59,843,500.00	46,400,750	77.54

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.205.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	815,997,100.00	804,610,074	98.60
3.02.02.205.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	232,652,000.00	134,933,900	58.00
3.02.02.205.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	271,250,000.00	264,780,000	97.61
3.02.02.205.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	17,200,000.00	7,950,000	46.22
3.02.02.206.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	2,569,023,346.00	2,556,363,637	99.51
3.02.02.206.011.	Penyediaan Langganan Kantor	76,165,920.00	71,307,657	93.62
3.02.02.206.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	86,616,000.00	86,155,887	99.47
3.02.02.206.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	483,050,000.00	482,934,080	99.98
3.02.02.206.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	182,438,576.00	182,310,400	99.93
3.02.02.206.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,440,055,700.00	1,436,620,313	99.76
3.02.02.206.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	93,230,750.00	90,119,688	96.66
3.02.02.206.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	170,716,400.00	170,167,112	99.68
3.02.02.206.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	36,750,000.00	36,748,500	100.00
3.02.02.207.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	3,659,095,607.00	3,502,555,540	95.72
3.02.02.207.011.	Penyediaan Langganan Kantor	90,712,540.00	68,087,364	75.06

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.207.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	84,261,400.00	81,636,600	96.88
3.02.02.207.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	495,000,000.00	456,857,000	92.29
3.02.02.207.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	232,658,992.00	225,217,690	96.80
3.02.02.207.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,256,845,775.00	1,245,240,576	99.08
3.02.02.207.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	147,712,000.00	125,458,800	84.93
3.02.02.207.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	1,326,954,900.00	1,290,557,510	97.26
3.02.02.207.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	24,950,000.00	9,500,000	38.08
3.02.02.208.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	1,944,929,376.00	1,898,183,980	97.60
3.02.02.208.011.	Penyediaan Langganan Kantor	24,461,540.00	21,433,377	87.62
3.02.02.208.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	98,029,250.00	96,604,750	98.55
3.02.02.208.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	175,000,000.00	175,000,000	100.00
3.02.02.208.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	200,505,436.00	196,638,856	98.07
3.02.02.208.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,156,713,150.00	1,154,241,848	99.79
3.02.02.208.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	108,220,000.00	93,785,867	86.66
3.02.02.208.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	180,500,000.00	158,979,282	88.08
3.02.02.208.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	1,500,000.00	1,500,000	100.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.209.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	1,338,724,309.00	1,263,948,854	94.41
3.02.02.209.011.	Penyediaan Langganan Kantor	9,190,000.00	8,622,500	93.82
3.02.02.209.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	163,871,000.00	157,830,000	96.31
3.02.02.209.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	8,762,000.00	8,670,500	98.96
3.02.02.209.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	128,934,573.00	127,073,600	98.56
3.02.02.209.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	884,848,936.00	832,424,204	94.08
3.02.02.209.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	112,542,800.00	99,598,050	88.50
3.02.02.209.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	27,575,000.00	26,980,000	97.84
3.02.02.209.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	3,000,000.00	2,750,000	91.67
3.02.02.210.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	4,314,334,535.00	4,056,207,934	94.02
3.02.02.210.011.	Penyediaan Langganan Kantor	46,406,540.00	44,495,257	95.88
3.02.02.210.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	153,874,100.00	122,026,750	79.30
3.02.02.210.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	5,000,000.00	4,940,000	98.80
3.02.02.210.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	141,221,083.00	138,575,860	98.13
3.02.02.210.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	3,113,262,512.00	2,963,977,805	95.20
3.02.02.210.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	151,800,000.00	116,144,937	76.51

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.210.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	677,320,300.00	640,597,325	94.58
3.02.02.210.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	25,450,000.00	25,450,000	100.00
3.02.02.211.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	2,127,701,359.00	2,005,885,714	94.27
3.02.02.211.011.	Penyediaan Langganan Kantor	40,714,500.00	34,392,326	84.47
3.02.02.211.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	158,288,000.00	148,681,529	93.93
3.02.02.211.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	82,000,000.00	82,000,000	100.00
3.02.02.211.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	114,959,334.00	106,877,050	92.97
3.02.02.211.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,519,118,375.00	1,438,152,181	94.67
3.02.02.211.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	130,766,350.00	115,340,628	88.20
3.02.02.211.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	65,204,800.00	63,792,000	97.83
3.02.02.211.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	16,650,000.00	16,650,000	100.00
3.02.02.212.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	1,451,455,135.00	1,432,369,699	98.69
3.02.02.212.011.	Penyediaan Langganan Kantor	10,900,000.00	10,865,000	99.68
3.02.02.212.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	104,604,950.00	100,628,750	96.20
3.02.02.212.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	30,800,000.00	30,764,000	99.88
3.02.02.212.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	152,435,665.00	152,435,665	100.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.212.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	835,539,780.00	833,334,934	99.74
3.02.02.212.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	79,584,500.00	74,909,350	94.13
3.02.02.212.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	184,390,240.00	176,232,000	95.58
3.02.02.212.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	53,200,000.00	53,200,000	100.00
3.02.02.213.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	1,658,195,294.00	1,591,693,973	95.99
3.02.02.213.011.	Penyediaan Langganan Kantor	48,430,000.00	31,333,846	64.70
3.02.02.213.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	319,250,000.00	311,788,082	97.66
3.02.02.213.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	182,500,000.00	177,925,000	97.49
3.02.02.213.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	131,117,494.00	121,594,900	92.74
3.02.02.213.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	774,569,800.00	773,847,590	99.91
3.02.02.213.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	111,228,000.00	91,882,055	82.61
3.02.02.213.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	36,800,000.00	29,760,000	80.87
3.02.02.213.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	54,300,000.00	53,562,500	98.64
3.02.02.214.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	2,665,113,155.00	2,274,292,791	85.34
3.02.02.214.011.	Penyediaan Langganan Kantor	15,021,500.00	11,184,940	74.46
3.02.02.214.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	296,247,200.00	254,778,739	86.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.214.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	129,800,000.00	91,008,680	70.11
3.02.02.214.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	423,062,525.00	368,475,440	87.10
3.02.02.214.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,598,381,930.00	1,355,879,250	84.83
3.02.02.214.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	104,800,000.00	96,873,242	92.44
3.02.02.214.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	97,800,000.00	96,092,500	98.25
3.02.02.215.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	2,020,399,048.00	1,891,293,352	93.61
3.02.02.215.011.	Penyediaan Langganan Kantor	22,432,965.00	16,563,228	73.83
3.02.02.215.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	300,779,000.00	269,069,000	89.46
3.02.02.215.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	11,000,000.00	10,900,000	99.09
3.02.02.215.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	118,566,958.00	117,863,000	99.41
3.02.02.215.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	1,389,690,125.00	1,310,412,317	94.30
3.02.02.215.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	105,230,000.00	93,810,807	89.15
3.02.02.215.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	52,200,000.00	52,175,000	99.95
3.02.02.215.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	20,500,000.00	20,500,000	100.00
3.02.02.216.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	1,369,498,254.00	1,354,783,221	98.93
3.02.02.216.011.	Penyediaan Langganan Kantor	3,000,000.00	3,000,000	100.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.216.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	148,788,600.00	148,067,000	99.52
3.02.02.216.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	24,750,000.00	24,750,000	100.00
3.02.02.216.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	176,318,754.00	172,635,250	97.91
3.02.02.216.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	957,240,900.00	948,235,271	99.06
3.02.02.216.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	54,100,000.00	52,995,700	97.96
3.02.02.216.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	5,300,000.00	5,100,000	96.23
3.02.02.217.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	1,370,122,028.00	1,258,554,994	91.86
3.02.02.217.011.	Penyediaan Langganan Kantor	12,928,000.00	12,262,000	94.85
3.02.02.217.012.	Penyediaan Makan Minum, Akomodasi Dan Rapat Luar Kantor	130,008,000.00	126,898,000	97.61
3.02.02.217.013.	Penyediaan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor	14,500,000.00	14,500,000	100.00
3.02.02.217.014.	Penyediaan Bahan Dan Alat Pakai Habis	112,437,928.00	112,324,400	99.90
3.02.02.217.015.	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Dan Perlengkapannya	715,315,100.00	624,815,294	87.35
3.02.02.217.016.	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	143,183,000.00	134,675,700	94.06
3.02.02.217.017.	Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor	228,100,000.00	227,802,100	99.87
3.02.02.217.018.	Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olahraga	13,650,000.00	5,277,500	38.66
3.02.02.218.	Program Pembinaan Dan Pengendalian Unit Kerja Bapenda	747,634,224.00	746,637,063	99.87

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.218.001.	Kegiatan Evaluasi Hasil Kinerja Dan Pelaporan Internal Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat	63,064,274.00	62,787,563	99.56
3.02.02.218.003.	Kegiatan Pemeriksaan, Pemutahiran Dan Pendampingan Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat	684,569,950.00	683,849,500	99.89
3.02.02.222.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah I	742,443,200.00	639,695,650	86.16
3.02.02.222.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pkb Dan Pap	108,510,000.00	102,579,050	94.53
3.02.02.222.002.	Kegiatan Layanan Pajak Daerah	304,247,000.00	254,428,500	83.63
3.02.02.222.003.	Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pajak Daerah Lingkup Pendapatan I	70,632,200.00	50,958,200	72.15
3.02.02.222.004.	Kegiatan Pendataan Dan Penetapan Pkb, Bbnkb Dan Pap Di Wilayah Provinsi Jawa Barat	259,054,000.00	231,729,900	89.45
3.02.02.223.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah II	395,370,000.00	369,697,586	93.51
3.02.02.223.001.	Kegiatan Intensifikasi Pbbkb Dan Lainlain Pad Yang Sah	112,875,250.00	107,688,860	95.41
3.02.02.223.002.	Kegiatan Intensifikasi/Ekstensifikasi Pendapatan Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	125,703,500.00	114,935,100	91.43
3.02.02.223.003.	Kegiatan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	81,845,500.00	74,747,796	91.33
3.02.02.223.004.	Kegiatan Monitoring Penerimaan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah	1,400,000.00	1,384,900	98.92
3.02.02.223.005.	Kegiatan Monitoring Penerimaan Pajak Rokok	47,185,750.00	46,554,500	98.66
3.02.02.223.006.	Kegiatan Pendataan Dan Monitoring Pbbkb Dan Lainlain Pad Yang Sah	26,360,000.00	24,386,430	92.51

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.226.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	821,976,706.00	714,809,999	86.96
3.02.02.226.002.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	248,215,000.00	230,424,999	92.83
3.02.02.226.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	573,761,706.00	484,385,000	84.42
3.02.02.227.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	445,107,156.00	441,565,000	99.20
3.02.02.227.002.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	189,803,310.00	188,540,000	99.33
3.02.02.227.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	255,303,846.00	253,025,000	99.11
3.02.02.229.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	167,766,528.00	166,334,200	99.15
3.02.02.229.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	167,766,528.00	166,334,200	99.15

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.230.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	316,952,098.00	312,020,000	98.44
3.02.02.230.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	316,952,098.00	312,020,000	98.44
3.02.02.231.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	278,975,000.00	277,000,000	99.29
3.02.02.231.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	278,975,000.00	277,000,000	99.29
3.02.02.232.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	178,426,363.00	175,945,000	98.61
3.02.02.232.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	178,426,363.00	175,945,000	98.61
3.02.02.233.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	515,368,500.00	465,578,000	90.34
3.02.02.233.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	515,368,500.00	465,578,000	90.34

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor			
3.02.02.235.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	368,840,840.00	340,689,899	92.37
3.02.02.235.001.	Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	126,611,430.00	121,961,728	96.33
3.02.02.235.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	242,229,410.00	218,728,171	90.30
3.02.02.236.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	502,742,474.00	496,236,900	98.71
3.02.02.236.001.	Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	75,800,000.00	75,440,000	99.53
3.02.02.236.002.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	419,942,474.00	413,796,900	98.54
3.02.02.236.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	7,000,000.00	7,000,000	100.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.237.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug	7,000,000.00	7,000,000	100.00
3.02.02.237.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon Ii Ciledug	7,000,000.00	7,000,000	100.00
3.02.02.238.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	450,000.00	425,000	94.44
3.02.02.238.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	450,000.00	425,000	94.44
3.02.02.239.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	11,000,000.00	9,600,000	87.27
3.02.02.239.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	11,000,000.00	9,600,000	87.27
3.02.02.244.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	14,550,000.00	-	-
3.02.02.244.002.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	14,550,000.00	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.245.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	34,356,500.00	30,458,050	88.65
3.02.02.245.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	34,356,500.00	30,458,050	88.65
3.02.02.247.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	223,462,688.00	222,149,000	99.41
3.02.02.247.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	223,462,688.00	222,149,000	99.41
3.02.02.248.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	459,580,000.00	456,670,000	99.37
3.02.02.248.002.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	459,580,000.00	456,670,000	99.37
3.02.02.249.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	290,232,798.00	276,543,120	95.28
3.02.02.249.002.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	177,049,650.00	169,518,120	95.75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.249.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	113,183,148.00	107,025,000	94.56
3.02.02.250.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	77,050,000.00	75,650,000	98.18
3.02.02.250.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	77,050,000.00	75,650,000	98.18
3.02.02.251.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	77,050,000.00	76,450,000	99.22
3.02.02.251.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	77,050,000.00	76,450,000	99.22
3.02.02.252.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	84,450,000.00	83,420,000	98.78
3.02.02.252.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	84,450,000.00	83,420,000	98.78
3.02.02.253.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan	680,988,711.00	642,611,640	94.36

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
	Daerah Wilayah Kota Bekasi			
3.02.02.253.002.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	396,203,250.00	376,156,640	94.94
3.02.02.253.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	284,785,461.00	266,455,000	93.56
3.02.02.254.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	84,050,000.00	81,030,000	96.41
3.02.02.254.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	84,050,000.00	81,030,000	96.41
3.02.02.255.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	198,577,120.00	196,098,200	98.75
3.02.02.255.002.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	87,927,120.00	87,248,200	99.23
3.02.02.255.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	110,650,000.00	108,850,000	98.37
3.02.02.257.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	77,050,000.00	76,200,000	98.90

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.257.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	77,050,000.00	76,200,000	98.90
3.02.02.258.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	77,050,000.00	68,050,000	88.32
3.02.02.258.003.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	77,050,000.00	68,050,000	88.32
3.02.02.259.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	212,620,000.00	211,895,000	99.66
3.02.02.259.002.	Kegiatan Pengadaan Konstruksi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	212,620,000.00	211,895,000	99.66
3.02.02.261.	Program Perencanaan Kinerja, Pengembangan Layanan, Regulasi Dan Kerja Sama Pendapatan Daerah	1,555,470,098.00	1,405,395,790	90.35
3.02.02.261.001.	Kegiatan Pengembangan Potensi, Kolaborasi Dan Inovasi Layanan Pendapatan Daerah	445,695,550.00	402,091,350	90.22
3.02.02.261.002.	Kegiatan Pengembangan Regulasi Dan Kerjasama Pendapatan	314,100,048.00	295,286,250	94.01
3.02.02.261.003.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendapatan Dan Pengembangan Pengayaan Instrumen Pelayanan Pendapatan	372,336,000.00	310,665,650	83.44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.261.004.	Kegiatan Penyusunan Rencana Dan Penganggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	423,338,500.00	397,352,540	93.86
3.02.02.262.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Data Dan Aplikasi Serta Infrastruktur Sistem Pendapatan Daerah	1,586,437,341.00	1,556,706,450	98.13
3.02.02.262.006.	Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sistem Pendapatan	987,246,884.00	978,337,200	99.10
3.02.02.262.007.	Kegiatan Pengembangan Integrasi System	65,915,582.00	63,743,250	96.70
3.02.02.262.010.	Kegiatan Penyusunan Dan Pengembangan Aplikasi Pendapatan	479,558,524.00	462,878,400	96.52
3.02.02.262.011.	Kegiatan Penyusunan Dan Pengembangan Data Ware House	53,716,351.00	51,747,600	96.33
3.02.02.263.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	393,440,000.00	362,646,100	92.17
3.02.02.263.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	224,050,000.00	204,186,100	91.13
3.02.02.263.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	169,390,000.00	158,460,000	93.55
3.02.02.264.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	817,020,000.00	794,310,000	97.22
3.02.02.264.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah	286,050,000.00	279,650,000	97.76

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
	Kabupaten Bandung I Rancaekek			
3.02.02.264.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	530,970,000.00	514,660,000	96.93
3.02.02.265.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	651,074,650.00	622,933,100	95.68
3.02.02.265.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	206,674,650.00	204,143,100	98.78
3.02.02.265.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	433,850,000.00	408,390,000	94.13
3.02.02.265.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	10,550,000.00	10,400,000	98.58
3.02.02.266.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	597,415,000.00	538,551,472	90.15
3.02.02.266.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	496,915,000.00	446,961,472	89.95
3.02.02.266.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	100,500,000.00	91,590,000	91.13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.267.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	397,124,000.00	392,489,500	98.83
3.02.02.267.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	246,700,000.00	243,430,000	98.67
3.02.02.267.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	148,164,000.00	146,848,500	99.11
3.02.02.267.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	2,260,000.00	2,211,000	97.83
3.02.02.268.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	440,169,000.00	432,579,000	98.28
3.02.02.268.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	244,169,000.00	242,569,000	99.34
3.02.02.268.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	196,000,000.00	190,010,000	96.94
3.02.02.269.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	504,995,000.00	484,042,500	95.85
3.02.02.269.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	271,000,000.00	267,275,000	98.63
3.02.02.269.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah	223,495,000.00	207,220,000	92.72

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
	Wilayah Kabupaten Cianjur			
3.02.02.269.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	10,500,000.00	9,547,500	90.93
3.02.02.270.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	450,484,000.00	440,774,000	97.84
3.02.02.270.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	213,224,000.00	203,779,000	95.57
3.02.02.270.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	228,050,000.00	227,925,000	99.95
3.02.02.270.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten I Sumber	9,210,000.00	9,070,000	98.48
3.02.02.271.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	296,280,000.00	288,328,000	97.32
3.02.02.271.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	175,100,000.00	169,130,000	96.59
3.02.02.271.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	112,250,000.00	110,688,000	98.61

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.271.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	8,930,000.00	8,510,000	95.30
3.02.02.272.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	632,076,000.00	608,054,000	96.20
3.02.02.272.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	323,896,000.00	301,490,000	93.08
3.02.02.272.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	297,780,000.00	296,404,000	99.54
3.02.02.272.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	10,400,000.00	10,160,000	97.69
3.02.02.273.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	681,410,000.00	653,346,500	95.88
3.02.02.273.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	388,700,000.00	363,199,000	93.44
3.02.02.273.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	292,710,000.00	290,147,500	99.12
3.02.02.274.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	469,530,000.00	437,441,500	93.17

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.274.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	268,280,000.00	265,030,000	98.79
3.02.02.274.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	162,500,000.00	147,185,000	90.58
3.02.02.274.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	38,750,000.00	25,226,500	65.10
3.02.02.275.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	1,003,744,800.00	976,790,000	97.31
3.02.02.275.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	352,444,800.00	345,350,000	97.99
3.02.02.275.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	651,300,000.00	631,440,000	96.95
3.02.02.276.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	354,150,000.00	283,446,200	80.04
3.02.02.276.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	164,200,000.00	127,100,000	77.41
3.02.02.276.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah	189,950,000.00	156,346,200	82.31

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
	Wilayah Kabupaten Kuningan			
3.02.02.277.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	456,930,100.00	426,018,750	93.23
3.02.02.277.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	266,840,000.00	253,135,000	94.86
3.02.02.277.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	168,290,100.00	151,750,000	90.17
3.02.02.277.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	21,800,000.00	21,133,750	96.94
3.02.02.278.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	430,813,300.00	430,813,300	100.00
3.02.02.278.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	240,313,300.00	240,313,300	100.00
3.02.02.278.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	190,500,000.00	190,500,000	100.00
3.02.02.279.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	797,120,000.00	722,034,500	90.58
3.02.02.279.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan	280,830,000.00	278,217,500	99.07

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
	Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta			
3.02.02.279.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	516,290,000.00	443,817,000	85.96
3.02.02.280.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	715,120,000.00	687,448,000	96.13
3.02.02.280.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	379,150,000.00	360,998,000	95.21
3.02.02.280.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	328,240,000.00	318,720,000	97.10
3.02.02.280.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	7,730,000.00	7,730,000	100.00
3.02.02.281.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	667,218,132.00	638,635,750	95.72
3.02.02.281.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	265,406,132.00	242,463,750	91.36
3.02.02.281.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	381,612,000.00	376,572,000	98.68

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.281.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	20,200,000.00	19,600,000	97.03
3.02.02.282.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	535,113,003.00	500,193,000	93.47
3.02.02.282.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhanratu	128,755,000.00	128,555,000	99.84
3.02.02.282.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	330,458,003.00	310,088,000	93.84
3.02.02.282.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	75,900,000.00	61,550,000	81.09
3.02.02.283.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	612,468,000.00	592,072,200	96.67
3.02.02.283.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	342,918,000.00	323,647,200	94.38
3.02.02.283.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	245,300,000.00	245,300,000	100.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.283.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	24,250,000.00	23,125,000	95.36
3.02.02.284.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	396,560,000.00	298,870,000	75.37
3.02.02.284.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	194,110,000.00	177,610,000	91.50
3.02.02.284.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	27,950,000.00	27,150,000	97.14
3.02.02.284.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	174,500,000.00	94,110,000	53.93
3.02.02.285.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	700,670,000.00	669,882,500	95.61
3.02.02.285.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	452,965,000.00	424,335,000	93.68
3.02.02.285.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	247,705,000.00	245,547,500	99.13
3.02.02.286.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	683,008,000.00	641,711,400	93.95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.286.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	181,250,000.00	172,740,000	95.30
3.02.02.286.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	501,758,000.00	468,971,400	93.47
3.02.02.287.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	1,749,908,000.00	1,714,129,400	97.96
3.02.02.287.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	648,238,000.00	643,680,000	99.30
3.02.02.287.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	1,093,570,000.00	1,063,349,400	97.24
3.02.02.287.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	8,100,000.00	7,100,000	87.65
3.02.02.288.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	255,291,000.00	242,041,000	94.81
3.02.02.288.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	184,050,000.00	174,800,000	94.97
3.02.02.288.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	62,191,000.00	58,191,000	93.57

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.288.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	9,050,000.00	9,050,000	100.00
3.02.02.289.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	644,405,000.00	594,399,500	92.24
3.02.02.289.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	278,000,000.00	275,495,000	99.10
3.02.02.289.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	366,405,000.00	318,904,500	87.04
3.02.02.290.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	389,810,000.00	378,750,600	97.16
3.02.02.290.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	216,760,000.00	206,161,000	95.11
3.02.02.290.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	173,050,000.00	172,589,600	99.73
3.02.02.291.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	383,211,250.00	377,143,250	98.42
3.02.02.291.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	238,651,250.00	235,663,250	98.75
3.02.02.291.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	144,560,000.00	141,480,000	97.87

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.292.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	231,215,000.00	228,839,000	98.97
3.02.02.292.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	128,555,000.00	126,179,000	98.15
3.02.02.292.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	92,700,000.00	92,700,000	100.00
3.02.02.292.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	9,960,000.00	9,960,000	100.00
3.02.02.293.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	560,700,000.00	534,092,501	95.25
3.02.02.293.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	418,950,000.00	395,902,501	94.50
3.02.02.293.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	141,750,000.00	138,190,000	97.49
3.02.02.294.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	537,710,000.00	454,196,000	84.47
3.02.02.294.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	178,060,000.00	174,616,000	98.07
3.02.02.294.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	359,650,000.00	279,580,000	77.74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI DESEMBER	%
1	2	3	4	5
3.02.02.295.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	220,981,845.00	220,431,000	99.75
3.02.02.295.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	155,070,000.00	155,070,000	100.00
3.02.02.295.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	65,911,845.00	65,361,000	99.16
3.02.02.296.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	339,670,000.00	315,592,500	92.91
3.02.02.296.001.	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	242,720,000.00	224,330,000	92.42
3.02.02.296.002.	Kegiatan Pendataan Pendapatan Asli Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	95,270,000.00	89,582,500	94.03
3.02.02.296.003.	Kegiatan Peningkatan Layanan Pendapatan Daerah Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	1,680,000.00	1,680,000	100.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan/percepatan atau kegagalan/perlambatan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 - 2023, RKT Tahun 2020, RKPD Tahun 2020 dan PK Tahun 2020.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*Performance improvement*).

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Business Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

= _____
 = _____

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	> 91-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	> 80-90	Memuaskan	A
3.	> 70-80	Sangat Baik	BB
4.	> 60-70	Baik	B
5.	> 50-60	Cukup	CC
6.	> 30-50	Kurang	C
7.	> 0-30	Sangat Kurang	D

Sumber : esakip.jabarprov.go.id/new

Implementasi Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) TA 2019 mencakup 2 sasaran dengan 2 indikator sasaran, Dari penilaian sendiri (*self assesment*) berdasarkan metode kerja tersebut diatas, semua sasaran berhasil dicapai dengan baik,

Capaian kinerja masing-masing sasaran untuk Tahun 2020 dapat diuktisarkan sebagai berikut :

1. 2 (dua) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 90 – 100 (AA)
2. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 80 – 90 (A)
3. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 70 – 80 (BB)
4. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 60 – 70 (B)
5. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 50 – 60 (CC)
6. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai > 30 – 50 (C)
7. 0 (nol) sasaran berhasil dicapai dengan nilai < 50 (D)

3.2 Pencapaian target dan realisasi kinerja Tahun 2020;

Evaluasi dan Analisis Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran

kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan yaitu menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2018 – 2023, dalam pelaksanaannya memiliki 2 (dua) indikator sasaran, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Nilai Capaian Kinerja 2019	Predikat
			Target (%)	Realisasi (%)			
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	57,14	54,04	94,57	AA	Sangat Memuaskan

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

URAIAN PENDAPATAN		TARGET PERUBAHAN TAHUN 2020	REALISASI (UNAUDIT)	%	KET.
PENDAPATAN DAERAH		38,180,645,671,617	34,777,470,830,693	91.09%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH		21,797,637,140,899	18,795,077,303,417	86.23%	Target Bapenda
PAJAK DAERAH		20,369,971,020,250	17,036,012,249,118	83.63%	
1	PKB	10,146,043,771,250	7,610,389,477,417	75.01%	
2	BBNKB	4,501,252,000,000	3,902,583,887,500	86.70%	
3	PBBKB	2,593,277,978,000	2,274,681,301,388	87.71%	
4	PAJAK AIR	50,000,000,000	58,848,052,798	117.70%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

5	PAJAK ROKOK	3,079,397,271,000	3,189,509,530,015	103.58%	
	RETRIBUSI DAERAH	34,551,610,670	40,235,423,478	116.45%	
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	399,717,085,961	401,703,315,844	100.50%	
	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	993,397,424,018	1,317,126,314,977	132.59%	
	DANA PERIMBANGAN	16,279,590,195,996	15,881,415,189,271	97.55%	
1	Dana Bagi Hasil Pajak /Hasil Bukan Pajak	2,086,455,243,173	2,063,105,718,266	98.88%	
2	Dana Alokasi Umum	2,994,344,725,000	2,964,612,155,000	99.01%	
3	Dana Alokasi Khusus	11,198,790,227,823	10,853,697,316,005	96.92%	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	103,418,334,722	100,978,338,005	97.64%	

Tabel 3.3.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020

Sumber : Kaspro (data diolah)

Kemandirian keuangan dapat diukur dari persentasi PAD terhadap pendapatan daerah, semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, realiasnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2020}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah 2020}} \times 100\%$$

$$= \frac{18.795.077.303.416,00}{34.777.470.830.692,00} \times 100\% \\ = 54,04\%$$

$$\text{Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020} = \frac{\text{Realisasi 2020}}{\text{Target 2020}} \times 100\%$$

$$= \frac{54,04\%}{57,14\%} \times 100\% \\ = 94,58\%$$

Tabel 3.1.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Nilai Capaian Kinerja 2019	Predikat
			Target (%)	Realisasi (%)			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	%	83,18	89,20	107,24	AA	Sangat Memuaskan

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di seluruh Pusat Pelayanan Pendapatan Daerah se-Jawa Barat dilaksanakan 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| Survey ke-1 Tahun 2020 | : 85,39 point Predikat "B" |
| Survey ke-2 Tahun 2020 | : 86,90 point Predikat "B" |
| Survey ke-3 Tahun 2020 | : 86,90 point Predikat "B" |
| Survey ke-4 Tahun 2020 | : 89,20 point Predikat "B" |

Berdasarkan hasil tersebut, nilai IKM Period ke-4 adalah nilai yang menjadi nilai akhir penilaian survey IKM Tahun 2020, terdapat penambahan jumlah responden yang cukup signifikan sejak survey kepuasan masyarakat dilaksanakan melalui aplikasi SKM berbasis website, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat/eajib pajak yang dilibatkan dalam pengukuran tingkat kepuasan penyelenggaraan layanan publik kesamsatan di 34 P3DW semakin meningkat.

Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2020

 <p>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BANDAR PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jalan Soekarno Hatta No. 529 Telepon : (022) 7566197 Faxcom : (022) 7564880 Website : bapenda.jabarprov.go.id e-mail : bapenda@jabarprov.go.id BANDUNG - 40266</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>Nomor : 973/1812-P1 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas Penhal : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Kedua Tahun 2020</p> </td> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>Yth. Kepada : Gubernur Jawa Barat cc. Kepala Biro Organisasi di</p> </td> <td style="width: 80%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>Bandung, 16 September 2020 TEMPAT</p> </td> </tr> </table> <p>Menindaklanjuti surat Nomor : 973/1420-P1 tanggal 14 Juli 2020 terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020, bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui 34 Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah di 27 kabupaten/kota se Jawa Barat, pada tahun 2020 merencanakan pelaksanaan SKM sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Periode Kedua (Januari sd Juni), berbasis konvensional melalui penyebaran kuesioner dengan responden 13.600 orang (400 orang per PPPD) dengan hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,39 dan Mutu Pelayanan B (Baik); Periode Ketiga (Juli sd Agustus), menggunakan Aplikasi SKM berbasis Website, dengan responden minimal 400 orang per PPPD; Periode Keempat (September sd Oktober), menggunakan Aplikasi SKM berbasis Website, dengan responden minimal 400 orang per PPPD; Periode Kelima (November sd Desember), menggunakan Aplikasi SKM berbasis Website, dengan responden minimal 400 orang per PPPD; <p>Berkenaan hal tersebut, dengan hormat disampaikan Hasil Pelaksanaan SKM Periode Kedua Tahun 2020 (Juli sd Agustus) yang dilaksanakan melalui Aplikasi SKM Berbasis Website di 34 PPPD se Jawa Barat (rincian IKM 34 PPPD sebagaimana terlampir) dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) BAPENDA Provinsi Jawa Barat sebesar 86,90 dan Mutu Pelayanan B (Baik) dengan jumlah responden 15.833 orang. Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut naik sebesar 1,51 dari IKM Semester I Tahun 2020 dengan nilai 85,39.</p> <p>Demikian, atas perhatiannya diaturkan terima kasih.</p>	<p>Nomor : 973/1812-P1 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas Penhal : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Kedua Tahun 2020</p>	<p>Yth. Kepada : Gubernur Jawa Barat cc. Kepala Biro Organisasi di</p>	<p>Bandung, 16 September 2020 TEMPAT</p>																																										
<p>Nomor : 973/1812-P1 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas Penhal : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Kedua Tahun 2020</p>	<p>Yth. Kepada : Gubernur Jawa Barat cc. Kepala Biro Organisasi di</p>	<p>Bandung, 16 September 2020 TEMPAT</p>																																												
<p>Lampiran Surat Nomor : 973/1812-P1 Tanggal : 16 September 2020</p> <p>LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PERIODE KEDUA (JULI SD AGUSTUS 2020) BANDAR PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</p>																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">URAIAN PPPD / KODE WILAYAH</th> <th rowspan="2">USIRU LAYANAN YANG DINILAI (9 Untuk sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)</th> <th rowspan="2">NILAI RATA RATA TERIMBANG</th> <th rowspan="2">NILAI IKM</th> <th colspan="10">JUMLAH RESPONDEN</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>PRIA</th> <th>WANITA</th> <th>Jumlah</th> <th>SD</th> <th>SMP</th> <th>SMA</th> <th>D 8</th> <th>S 1</th> <th>S 2</th> <th>S 3</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table>			NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	USIRU LAYANAN YANG DINILAI (9 Untuk sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEN										KETERANGAN	PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 8	S 1	S 2	S 3	Jumlah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	USIRU LAYANAN YANG DINILAI (9 Untuk sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)						NILAI RATA RATA TERIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEN										KETERANGAN																										
			PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP			SMA	D 8	S 1	S 2	S 3	Jumlah																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">1 KOTA DEPOK</td> <td style="width: 85%; text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td>Kode Wilayah 20100</td> <td>88.58</td> </tr> <tr> <td>1 Persyaratan</td> <td>0.395</td> </tr> <tr> <td>2 Sistem Mekanisme dan Prosedur</td> <td>0.392</td> </tr> <tr> <td>3 Waktu Penyelesaian</td> <td>0.393</td> </tr> <tr> <td>4 Biaya/Tarif</td> <td>0.393</td> </tr> <tr> <td>5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan</td> <td>0.396</td> </tr> <tr> <td>6 Kompetensi Pelaksana</td> <td>0.390</td> </tr> <tr> <td>7 Perilaku Pelaksana</td> <td>0.404</td> </tr> <tr> <td>8 Sarana dan Prasarana</td> <td>0.383</td> </tr> <tr> <td>9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.417</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>1.543 "SANGAT BAIK"</td> </tr> </tbody> </table>			1 KOTA DEPOK	A	Kode Wilayah 20100	88.58	1 Persyaratan	0.395	2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.392	3 Waktu Penyelesaian	0.393	4 Biaya/Tarif	0.393	5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan	0.396	6 Kompetensi Pelaksana	0.390	7 Perilaku Pelaksana	0.404	8 Sarana dan Prasarana	0.383	9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.417	Jumlah	1.543 "SANGAT BAIK"																				
1 KOTA DEPOK	A																																													
Kode Wilayah 20100	88.58																																													
1 Persyaratan	0.395																																													
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.392																																													
3 Waktu Penyelesaian	0.393																																													
4 Biaya/Tarif	0.393																																													
5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan	0.396																																													
6 Kompetensi Pelaksana	0.390																																													
7 Perilaku Pelaksana	0.404																																													
8 Sarana dan Prasarana	0.383																																													
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.417																																													
Jumlah	1.543 "SANGAT BAIK"																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">2 KOTA DEPOK II CIREB</td> <td style="width: 85%; text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td>Kode Wilayah 20110</td> <td>97.35</td> </tr> <tr> <td>1 Persyaratan</td> <td>0.428</td> </tr> <tr> <td>2 Sistem Mekanisme dan Prosedur</td> <td>0.431</td> </tr> <tr> <td>3 Waktu Penyelesaian</td> <td>0.436</td> </tr> <tr> <td>4 Biaya/Tarif</td> <td>0.430</td> </tr> <tr> <td>5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan</td> <td>0.435</td> </tr> <tr> <td>6 Kompetensi Pelaksana</td> <td>0.434</td> </tr> <tr> <td>7 Perilaku Pelaksana</td> <td>0.437</td> </tr> <tr> <td>8 Sarana dan Prasarana</td> <td>0.432</td> </tr> <tr> <td>9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.431</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>1.894 "SANGAT BAIK"</td> </tr> </tbody> </table>			2 KOTA DEPOK II CIREB	A	Kode Wilayah 20110	97.35	1 Persyaratan	0.428	2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.431	3 Waktu Penyelesaian	0.436	4 Biaya/Tarif	0.430	5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan	0.435	6 Kompetensi Pelaksana	0.434	7 Perilaku Pelaksana	0.437	8 Sarana dan Prasarana	0.432	9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.431	Jumlah	1.894 "SANGAT BAIK"																				
2 KOTA DEPOK II CIREB	A																																													
Kode Wilayah 20110	97.35																																													
1 Persyaratan	0.428																																													
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.431																																													
3 Waktu Penyelesaian	0.436																																													
4 Biaya/Tarif	0.430																																													
5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan	0.435																																													
6 Kompetensi Pelaksana	0.434																																													
7 Perilaku Pelaksana	0.437																																													
8 Sarana dan Prasarana	0.432																																													
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.431																																													
Jumlah	1.894 "SANGAT BAIK"																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">3 KABUPATEN BOGOR</td> <td style="width: 85%; text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td>Kode Wilayah 10200</td> <td>84.30</td> </tr> <tr> <td>1 Persyaratan</td> <td>0.367</td> </tr> <tr> <td>2 Sistem Mekanisme dan Prosedur</td> <td>0.380</td> </tr> <tr> <td>3 Waktu Penyelesaian</td> <td>0.359</td> </tr> <tr> <td>4 Biaya/Tarif</td> <td>0.390</td> </tr> <tr> <td>5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan</td> <td>0.364</td> </tr> <tr> <td>6 Kompetensi Pelaksana</td> <td>0.388</td> </tr> <tr> <td>7 Perilaku Pelaksana</td> <td>0.365</td> </tr> <tr> <td>8 Sarana dan Prasarana</td> <td>0.375</td> </tr> <tr> <td>9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.384</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>3.172 "BAIK"</td> </tr> </tbody> </table>			3 KABUPATEN BOGOR	B	Kode Wilayah 10200	84.30	1 Persyaratan	0.367	2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.380	3 Waktu Penyelesaian	0.359	4 Biaya/Tarif	0.390	5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan	0.364	6 Kompetensi Pelaksana	0.388	7 Perilaku Pelaksana	0.365	8 Sarana dan Prasarana	0.375	9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.384	Jumlah	3.172 "BAIK"																				
3 KABUPATEN BOGOR	B																																													
Kode Wilayah 10200	84.30																																													
1 Persyaratan	0.367																																													
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.380																																													
3 Waktu Penyelesaian	0.359																																													
4 Biaya/Tarif	0.390																																													
5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan	0.364																																													
6 Kompetensi Pelaksana	0.388																																													
7 Perilaku Pelaksana	0.365																																													
8 Sarana dan Prasarana	0.375																																													
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.384																																													
Jumlah	3.172 "BAIK"																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">4 KOTA BOGOR</td> <td style="width: 85%; text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td>Kode Wilayah 10300</td> <td>77.43</td> </tr> <tr> <td>1 Persyaratan</td> <td>0.341</td> </tr> <tr> <td>2 Sistem Mekanisme dan Prosedur</td> <td>0.341</td> </tr> <tr> <td>3 Waktu Penyelesaian</td> <td>0.323</td> </tr> <tr> <td>4 Biaya/Tarif</td> <td>0.374</td> </tr> <tr> <td>5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan</td> <td>0.342</td> </tr> <tr> <td>6 Kompetensi Pelaksana</td> <td>0.345</td> </tr> <tr> <td>7 Perilaku Pelaksana</td> <td>0.349</td> </tr> <tr> <td>8 Sarana dan Prasarana</td> <td>0.293</td> </tr> <tr> <td>9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.391</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>3.097 "BAIK"</td> </tr> </tbody> </table>			4 KOTA BOGOR	B	Kode Wilayah 10300	77.43	1 Persyaratan	0.341	2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.341	3 Waktu Penyelesaian	0.323	4 Biaya/Tarif	0.374	5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan	0.342	6 Kompetensi Pelaksana	0.345	7 Perilaku Pelaksana	0.349	8 Sarana dan Prasarana	0.293	9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.391	Jumlah	3.097 "BAIK"																				
4 KOTA BOGOR	B																																													
Kode Wilayah 10300	77.43																																													
1 Persyaratan	0.341																																													
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.341																																													
3 Waktu Penyelesaian	0.323																																													
4 Biaya/Tarif	0.374																																													
5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan	0.342																																													
6 Kompetensi Pelaksana	0.345																																													
7 Perilaku Pelaksana	0.349																																													
8 Sarana dan Prasarana	0.293																																													
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.391																																													
Jumlah	3.097 "BAIK"																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">5 KOTA SUKABUMI</td> <td style="width: 85%; text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td>Kode Wilayah 10400</td> <td>85.50</td> </tr> <tr> <td>1 Persyaratan</td> <td>0.368</td> </tr> <tr> <td>2 Sistem Mekanisme dan Prosedur</td> <td>0.376</td> </tr> <tr> <td>3 Waktu Penyelesaian</td> <td>0.367</td> </tr> <tr> <td>4 Biaya/Tarif</td> <td>0.393</td> </tr> <tr> <td>5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan</td> <td>0.373</td> </tr> <tr> <td>6 Kompetensi Pelaksana</td> <td>0.376</td> </tr> <tr> <td>7 Perilaku Pelaksana</td> <td>0.381</td> </tr> <tr> <td>8 Sarana dan Prasarana</td> <td>0.351</td> </tr> <tr> <td>9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.435</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>3.420 "BAIK"</td> </tr> </tbody> </table>			5 KOTA SUKABUMI	B	Kode Wilayah 10400	85.50	1 Persyaratan	0.368	2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.376	3 Waktu Penyelesaian	0.367	4 Biaya/Tarif	0.393	5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan	0.373	6 Kompetensi Pelaksana	0.376	7 Perilaku Pelaksana	0.381	8 Sarana dan Prasarana	0.351	9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.435	Jumlah	3.420 "BAIK"																				
5 KOTA SUKABUMI	B																																													
Kode Wilayah 10400	85.50																																													
1 Persyaratan	0.368																																													
2 Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.376																																													
3 Waktu Penyelesaian	0.367																																													
4 Biaya/Tarif	0.393																																													
5 Produk/Spesifikasi Jenis Layanan	0.373																																													
6 Kompetensi Pelaksana	0.376																																													
7 Perilaku Pelaksana	0.381																																													
8 Sarana dan Prasarana	0.351																																													
9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.435																																													
Jumlah	3.420 "BAIK"																																													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNDUH LAYANAN YANG DINILAI (9 Untuk sesuai PERMENDAM dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERTIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEEN									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Average	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	KABUPATEN SUKABUMI I OBRAK	1. Penyiaran 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif Kode Wilayah 10500	0.351 0.394 0.388 0.398 0.392 0.389 0.392 0.390 0.406	88.50	341	76	417	10	51	250	61	41	3	1	417	-	
		Jumlah	3.540		A												
7	KABUPATEN SUKABUMI II PALABUHAN RATU	1. Penyiaran 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif Kode Wilayah 10510	0.384 0.404 0.407 0.411 0.420 0.416 0.421 0.417 0.443	93.08	338	316	654	28	97	326	62	141	-	-	654	-	
		Jumlah	3.723		A												
8	KABUPATEN CIANJUR	1. Penyiaran 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif Kode Wilayah 10700	0.361 0.363 0.346 0.385 0.368 0.369 0.373	83.00	283	121	404	26	56	190	34	85	5	0	404	-	
		Jumlah	3.366		D												

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNDUH LAYANAN YANG DINILAI (9 Untuk sesuai PERMENDAM dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERTIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEEN									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Average	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	KOTA BEKASI	1. Penyiaran 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif Kode Wilayah 20800	0.375 0.374 0.360 0.378 0.373 0.362 0.373 0.377 0.394	84.15	242	158	400	2	67	195	-	115	21	-	400	-	
		Jumlah	3.366		B												
10	KABUPATEN BEKASI	1. Penyiaran 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif Kode Wilayah 20900	0.365 0.364 0.367 0.410 0.372 0.374 0.365 0.364 0.403	84.60	233	215	438	16	29	155	104	125	9	0	438	-	
		Jumlah	3.384		B												
11	KABUPATEN KARAWANG	1. Penyiaran 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif Kode Wilayah 11000	0.388 0.388 0.385 0.392 0.395 0.396 0.397 0.392 0.401	88.40	196	204	400	2	26	131	62	157	21	1	400	-	
		Jumlah	3.431		A												

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNDUH LAYANAN YANG DINILAI (9 Untuk sesuai PERMENDAM dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERTIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEEN									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Average	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	KABUPATEN PURWAKARTA	1. Penyiaran 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif Kode Wilayah 11100	0.395 0.396 0.385 0.388 0.396 0.397 0.397 0.392 0.401	87.95	168	232	400	4	11	186	-	188	11	-	400	-	
		Jumlah	3.518		B												
13	KABUPATEN SUBANG	1. Penyiaran 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif Kode Wilayah 11200	0.380 0.383 0.370 0.401 0.379 0.381 0.383 0.353 0.401	85.78	333	204	537	46	62	274	31	102	18	4	537	-	
		Jumlah	3.431		B												
14	KOTA CIREBON	1. Penyiaran 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif Kode Wilayah 11300	0.377 0.380 0.374 0.382 0.382 0.383 0.382 0.355 0.387	84.05	297	101	400	16	67	174	29	88	26	-	400	-	
		Jumlah	3.362		B												

Page 5 of 13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (B) Uraian resmi PEMERINTAH dan RB Nomor 14 Tahun 2017)			NILAI RATA RATA TERTIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEEN						JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEEN						KETERANGAN
		1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2
15	KABUPATEN CIREBON I SUMBER	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif	0.378 0.378 0.378 0.397	86.18	284	173	457	14	25	232	61	119	5	1	457	-			
Kode Wilayah	11400	5 Kompetensi Pelaksana 6 Perilaku Pelaksana 7 Sarana dan Prasarana 8 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.375 0.375 0.378 0.378	B	Jumlah	3.647	"BAIK"												
16	KABUPATEN CIREBON II GELENG	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif	0.389 0.394 0.387 0.393	87.33	256	151	407	48	57	241	80	83	0	0	407	-			
Kode Wilayah	11410	5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Perilaku Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana	0.387 0.384 0.384 0.392	B	Jumlah	3.893	"BAIK"												
17	KABUPATEN INDRA MULIA	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif	0.372 0.374 0.352 0.386	83.93	254	146	400	30	104	180	83	3	400	-					
Kode Wilayah	11400	5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Perilaku Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana	0.364 0.370 0.370 0.364	B	Jumlah	3.512	"BAIK"												
18	KABUPATEN INDRAGIRI II HAUREGEUL	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif	0.398 0.394 0.393 0.396	87.80	328	211	560	17	49	299	98	93	21	0	560	-			
Kode Wilayah	11810	5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Perilaku Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana	0.392 0.393 0.386 0.392	B	Jumlah	3.577	"BAIK"												
19	KABUPATEN KUNINGAN	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif	0.395 0.390 0.396 0.396	88.95	242	158	400	8	34	274	-	88	-	-	400	-			
Kode Wilayah	11800	5 Kompetensi Pelaksana 6 Perilaku Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana	0.387 0.386 0.393 0.399	A	Jumlah	3.554	"SANGAT BAIK"												
20	KABUPATEN MAJALENGKA	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif	0.380 0.380 0.360 0.383	84.50	252	148	400	40	37	215	-	103	5	400	-				
Kode Wilayah	11900	5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Perilaku Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana	0.427 0.397 0.380 0.427	B	Jumlah	3.499	"BAIK"												
21	KOTA BANDUNG I PARAJAAN	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif	0.394 0.390 0.380 0.404	87.93	271	174	445	1	18	261	41	110	14	0	445	-			
Kode Wilayah	12000	5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana	0.393 0.392 0.386 0.367	B	Jumlah	3.513	"BAIK"												
22	KOTA BANDUNG II KARALUYAAN	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif	0.349 0.349 0.367 0.367	87.20	255	148	403	6	19	206	115	51	5	1	403	-			
Kode Wilayah	12100	5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana	0.390 0.386 0.393 0.386	B	Jumlah	3.499	"BAIK"												
23	KOTA BANDUNG I SOEKARNO HUTTA	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif	0.397 0.387 0.378 0.387	88.95	239	162	401	3	30	153	62	109	37	7	401	-			
Kode Wilayah	12410	5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Perilaku Pelaksana 7 Sarana dan Prasarana	0.375 0.387 0.371	B	Jumlah	3.330	"BAIK"												
24	KABUPATEN BANDUNG BARAT	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif	0.397 0.373 0.356 0.384	83.25	444	148	592	7	23	268	25	264	5	-	592	-			
Kode Wilayah	12300	5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana	0.350 0.361 0.359 0.371	B	Jumlah	3.330	"BAIK"												
25	KABUPATEN BANDUNG I RANCASEKEK	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif	0.380 0.384 0.382 0.389	86.75	421	137	558	18	75	242	103	94	21	5	558	-			
Kode Wilayah	12400	5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana	0.381 0.387 0.382 0.382	B	Jumlah	3.410	"BAIK"												
26	KABUPATEN BANDUNG II SOREANG	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif	0.380 0.380 0.380 0.390	86.23	253	149	400	38	78	187	16	72	7	2	400	-			
Kode Wilayah	12410	5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana	0.380 0.380 0.389 0.389	B	Jumlah	3.449	"BAIK"												

Page 9 of 13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSIR LAYANAN YANG DINILAI (B) Untuk sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)			NILAI RATA RATA TERHITUNG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEEN									KETERANGAN
		1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
27	KABUPATEN SUMEDANG	1. Perparatan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Pemanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kode Wilayah 12500	0.398 0.395 0.395 0.400 0.400 0.399 0.404 0.404 0.422	90.60	A	647	321	968	59	116	376	137	216	23	1	968	-	
28	KABUPATEN GARUT	1. Perparatan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Pemanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kode Wilayah 12600	0.367 0.408 0.377 0.417 0.404 0.414 0.423 0.423 0.420	90.85	A	148	270	418	0	31	314	6	88	7	0	418	-	
29	KOTA TAGALMALAYA	1. Perparatan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian	Kode Wilayah	0.420 0.404 0.407	92.98	B	292	109	401	1	8	104	22	258	8	-	401	-	
30	KABUPATEN TASIKMALAYA	1. Perparatan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Pemanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kode Wilayah 12800	0.353 0.359 0.362 0.360 0.343 0.405 0.406 0.406 0.405	84.98	B	209	191	400	29	49	170	-	123	29	-	400	-	
31	KABUPATEN CIAMIS	1. Perparatan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Pemanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kode Wilayah 12900	0.391 0.399 0.398 0.397 0.398 0.390 0.391 0.391 0.402	88.03	B	273	181	454	0	14	234	17	189	20	0	454	-	
32	KABUPATEN PANGANDARAN	1. Perparatan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Pemanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kode Wilayah 12910	0.394 0.392 0.390 0.401 0.400 0.382 0.394 0.391 0.406	88.90	A	297	103	400	12	23	295	25	36	9	-	400	-	
33	KOTA CIMAHI	1. Perparatan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Pemanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kode Wilayah 13100	0.367 0.356 0.355 0.370 0.367 0.367 0.362 0.362 0.370	82.10	B	272	131	403	5	29	220	20	120	9	0	403	-	
34	KOTA BANJAR	1. Perparatan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Pemanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kode Wilayah 13300	0.340 0.361 0.377 0.354 0.368 0.369 0.362 0.362 0.390	84.70	B	280	164	433	23	56	229	2	117	4	2	433	-	
	RIM. BAPENDA	3. Perparatan 4. Sistem Mekanisme dan Prosedur 5. Waktu Penyelesaian 6. Biaya/Tarif 7. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 8. Sarana dan Prasarana 9. Pemanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		0.360 0.364 0.376 0.371 0.364 0.365 0.366 0.363 0.403	86.90	B	5,685	6,148	15,833	527	1,472	7,745	3,589	4,078	381	25	15,833	-	

KETERANGAN:
 Jumlah PPPD dengan nilai IKM "A" (SANGAT BAIK) : **11**
 Jumlah PPPD dengan nilai IKM "B" (BAIK) : **23**

REPLIA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 DR. HENRY WIDATHONO, MM
 Pembina Upaya Monev
 NIP. 1963111219851008

Page 13 of 13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2020

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Soekarno Hatta No. 528 Telepon : (022) 7566197 Faksimili : (022) 7564580 Website : bapenda.jabarprov.go.id e-mail : bapenda@jabarprov.go.id BANDUNG - 40298</p>	<p style="text-align: center;">Bandung, 27 Oktober 2020</p> <p>Nomor : 973/AIII-PI Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Ketiga Tahun 2020</p> <p>Yth. Kepada : Gubernur Jawa Barat c.c. Kepala Biro Organisasi di TEMPAT</p> <p>Menindaklanjuti surat Nomor : 973/1420-P1 Tanggal 14 Juli 2020 terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020, bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui 34 Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPDA) di 27 kabupaten/kota se Jawa Barat pada tahun 2020 merencanakan pelaksanaan SKM sebanyak 4 (empat) kali. Berkenaan hal dimaksud, dengan hormat disampaikan laporan pelaksanaan SKM dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk sebagian periode survei sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Periode Survei</th> <th>Jumlah Responden (orang)</th> <th>Nilai IKM</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Januari sd Juni</td> <td>13.600</td> <td>85,39</td> <td>Konvensional</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Juli sd Agustus</td> <td>15.833</td> <td>86,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>September sd Oktober</td> <td>19.907</td> <td>86,78</td> <td>Menggunakan Aplikasi SKM Berbasis Website</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>November sd Desember</td> <td>(Dilaksanakan mulai tanggal 2 November 2020)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan hasil tersebut, terdapat penambahan jumlah responden yang cukup signifikan sejak survei kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SKM berbasis website. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat/Wajib Pajak yang dilibatkan dalam pengukuran tingkat kepuasan menyelenggarakan layanan publik kesesuaian di 34 PPPDA semakin meningkat. Nilai IKM Periode Ketiga (September sd Oktober) sebesar 86,78 meningkat 0,00 point dari periode kedua sebesar 86,69.</p> <p>Lampiran Surat Nomor : 973/AIII-PI Tanggal : 27 Oktober 2020</p> <p style="text-align: center;">LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PERIODE KETIGA (SEPTEMBER SD OKTOBER 2020) BANDAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">URAIAN PPPD / KODE WILAYAH</th> <th rowspan="2">UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPEN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)</th> <th rowspan="2">NILAI RATA RATA TERIMBANG</th> <th rowspan="2">NILAI IKM</th> <th rowspan="2">JUMLAH RESPONDEŃ</th> <th colspan="10">JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEŃ</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>PRIA</th> <th>WANITA</th> <th>Jumlah</th> <th>SD</th> <th>SMP</th> <th>SMA</th> <th>D.3</th> <th>S.1</th> <th>S.2</th> <th>S.3</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th> <th>14</th> <th>15</th> <th>16</th> <th>17</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>KOTA DEPOK</td> <td>1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.407 0.405 0.407 0.405 0.404 0.402 0.407 0.399 0.415</td> <td>91.28</td> <td>A</td> <td>3.651</td> <td>SANGAT BAIK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KOTA DEPOK II CINERE</td> <td>1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.357 0.359 0.359 0.357 0.359 0.358 0.360 0.360 0.360</td> <td>80.88</td> <td>B</td> <td>3.235</td> <td>BAIK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>KABUPATEN BOGOR</td> <td>1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.343 0.358 0.347 0.358 0.356 0.360 0.360 0.358 0.354</td> <td>79.85</td> <td>B</td> <td>3.194</td> <td>BAIK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>KOTA BOGOR</td> <td>1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.396 0.398 0.398 0.413 0.402 0.402 0.410 0.401 0.412</td> <td>91.30</td> <td>A</td> <td>3.652</td> <td>SANGAT BAIK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>KOTA SUKABUMI</td> <td>1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.402 0.401 0.395 0.399 0.401 0.403 0.406 0.383 0.422</td> <td>90.30</td> <td>A</td> <td>3.632</td> <td>SANGAT BAIK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Periode Survei	Jumlah Responden (orang)	Nilai IKM	Keterangan	1.	Januari sd Juni	13.600	85,39	Konvensional	2.	Juli sd Agustus	15.833	86,69		3.	September sd Oktober	19.907	86,78	Menggunakan Aplikasi SKM Berbasis Website	4.	November sd Desember	(Dilaksanakan mulai tanggal 2 November 2020)			NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPEN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEŃ	JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEŃ										KETERANGAN	PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D.3	S.1	S.2	S.3	Jumlah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1.	KOTA DEPOK	1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.407 0.405 0.407 0.405 0.404 0.402 0.407 0.399 0.415	91.28	A	3.651	SANGAT BAIK											2.	KOTA DEPOK II CINERE	1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.357 0.359 0.359 0.357 0.359 0.358 0.360 0.360 0.360	80.88	B	3.235	BAIK											3.	KABUPATEN BOGOR	1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.343 0.358 0.347 0.358 0.356 0.360 0.360 0.358 0.354	79.85	B	3.194	BAIK											4.	KOTA BOGOR	1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.396 0.398 0.398 0.413 0.402 0.402 0.410 0.401 0.412	91.30	A	3.652	SANGAT BAIK											5.	KOTA SUKABUMI	1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.402 0.401 0.395 0.399 0.401 0.403 0.406 0.383 0.422	90.30	A	3.632	SANGAT BAIK										
No	Periode Survei	Jumlah Responden (orang)	Nilai IKM	Keterangan																																																																																																																																																													
1.	Januari sd Juni	13.600	85,39	Konvensional																																																																																																																																																													
2.	Juli sd Agustus	15.833	86,69																																																																																																																																																														
3.	September sd Oktober	19.907	86,78	Menggunakan Aplikasi SKM Berbasis Website																																																																																																																																																													
4.	November sd Desember	(Dilaksanakan mulai tanggal 2 November 2020)																																																																																																																																																															
NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPEN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEŃ	JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEŃ										KETERANGAN																																																																																																																																																	
						PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D.3	S.1	S.2	S.3		Jumlah																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																	
1.	KOTA DEPOK	1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.407 0.405 0.407 0.405 0.404 0.402 0.407 0.399 0.415	91.28	A	3.651	SANGAT BAIK																																																																																																																																																										
2.	KOTA DEPOK II CINERE	1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.357 0.359 0.359 0.357 0.359 0.358 0.360 0.360 0.360	80.88	B	3.235	BAIK																																																																																																																																																										
3.	KABUPATEN BOGOR	1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.343 0.358 0.347 0.358 0.356 0.360 0.360 0.358 0.354	79.85	B	3.194	BAIK																																																																																																																																																										
4.	KOTA BOGOR	1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.396 0.398 0.398 0.413 0.402 0.402 0.410 0.401 0.412	91.30	A	3.652	SANGAT BAIK																																																																																																																																																										
5.	KOTA SUKABUMI	1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.402 0.401 0.395 0.399 0.401 0.403 0.406 0.383 0.422	90.30	A	3.632	SANGAT BAIK																																																																																																																																																										
<p>Tembusa 1. Yth.</p>	<p>Page 2</p>																																																																																																																																																																

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI [9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017]	NILAI RATA RATA TERTIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEEN									KETERANGAN																						
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																							
10	KABUPATEN SUKABUMI I OBADAK	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian Kode Wilayah 10500	0.401 0.401 0.402 0.407	92.40	445	78	523	9	38	340	55	71	9	1	523	A																							
		Jumlah	3.696		SANGAT BAIK																																		
11	KABUPATEN SUKABUMI II PALABUHAN RATU	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian Kode Wilayah 10510	0.405 0.408 0.402 0.405	91.28	332	56	388	41	148	192	103	132	9	6	388	A																							
		Jumlah	3.651		SANGAT BAIK																																		
12	KABUPATEN CIANJUR	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian Kode Wilayah 10700	0.401 0.400 0.374 0.407	89.03	290	54	342	47	76	193	42	80	9	1	342	A																							
		Jumlah	3.426		SANGAT BAIK																																		
13	KOTA BEKASI	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian Kode Wilayah 20800	0.382 0.382 0.365 0.390	85.08	268	103	363	5	28	149	105	169	15	1	363	B																							
		Jumlah	3.403		BAIK																																		
14	KABUPATEN BEKASI	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian Kode Wilayah 20900	0.369 0.376 0.376 0.394	85.58	274	247	521	10	54	185	125	123	18	6	521	B																							
		Jumlah	3.423		BAIK																																		
15	KABUPATEN KARAWANG	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian Kode Wilayah 11000	0.399 0.397 0.397 0.396	89.78	329	277	506	42	48	137	111	111	35	6	506	A																							
		Jumlah	3.404		BAIK																																		
16	KABUPATEN PURWAKARTA	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian Kode Wilayah 11100	0.362 0.377 0.380 0.384	86.18	312	100	312	76	50	114	77	94	2	2	312	B																							
		Jumlah	3.447		BAIK																																		
17	KABUPATEN SUBANG	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian Kode Wilayah 11200	0.360 0.361 0.354 0.365	80.90	362	285	747	51	80	422	31	126	18	4	747	B																							
		Jumlah	3.236		BAIK																																		
18	KOTA CIREBON	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian Kode Wilayah 11300	0.404 0.405 0.404 0.404	90.08	301	171	472	1	2	231	31	31	2	2	472	A																							
		Jumlah	3.603		SANGAT BAIK																																		

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)			NILAI RATA RATA TERITIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEEN								KETERANGAN
		3	4	5			6	7	8	9	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah
1	2																	
13	KABUPATEN CIREBON I SUMBER	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.352 0.356 0.345 0.403 0.354 0.367 0.365 0.365 0.422	83.23	B	501	213	758	88	93	381	62	332	6	0	758		
		Jumlah	3.329															
14	KABUPATEN CIREBON II OLEUDUG	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.389 0.385 0.385 0.384 0.387 0.385 0.391 0.389 0.430	88.13	B	254	182	416	80	47	248	43	81	0	0	416		
		Jumlah	3.525															
15	KABUPATEN INDRAMAYU I HAUREGIUS	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.339 0.345 0.331 0.345 0.345 0.342 0.347 0.349 0.360	77.58	B	548	508	1.315	20	378	808	44	77	4	3	1.315		
		Jumlah	3.103															

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)			NILAI RATA RATA TERITIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEEN								KETERANGAN
		3	4	5			6	7	8	9	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah
16	KABUPATEN INDRAMAYU II HAUREGIUS	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.368 0.375 0.369 0.377 0.372 0.374 0.376 0.388 0.422	83.88	B	386	892	1.889	15	67	407	73	67	7	0	686		
		Jumlah	3.355															
17	KABUPATEN KUNINGAN	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.400 0.396 0.368 0.390 0.395 0.393 0.397 0.388 0.422	88.73	A	216	178	424	18	20	273	15	98	4	3	424		
		Jumlah	3.549															
18	KABUPATEN MAJALENGKA	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.375 0.372 0.385 0.393 0.399 0.394 0.410 0.393 0.414	88.38	A	109	315	421	12	33	209	29	55	2	0	424		
		Jumlah	3.535															

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)			NILAI RATA RATA TERITIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEEN								KETERANGAN
		3	4	5			6	7	8	9	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah
21	KOTA BANDUNG I PAJAJARAN	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.398 0.391 0.397 0.393 0.400 0.392 0.401 0.394 0.418	89.60	A	125	174	609	10	371	237	320	120	31	3	607		
		Jumlah	3.584															
22	KOTA BANDUNG II KAHALUYAAN	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.353 0.395 0.365 0.407 0.372 0.388 0.392 0.396 0.426	87.60	B	141	119	600	5	18	297	75	97	16	0	600		
		Jumlah	3.504															
23	KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.393 0.394 0.390 0.402 0.413 0.418 0.417 0.422 0.424	91.83	A	252	165	417	10	19	105	84	177	34	3	417		
		Jumlah	3.673															

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI [9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017]	NILAI RATA RATA TERTIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEEN				JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEEN								KETERANGAN										
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5																							
43	KABUPATEN TASIKMALAYA Kode Wilayah 12900	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.371 0.379 0.383 0.387 0.379 0.409 0.411 0.411 0.405	88.38	A	245	274	519	31	37	269	51	54	7	0	419											
		Jumlah	3.535		SANGAT BAIK																						
43	KABUPATEN CIAMIS Kode Wilayah 12900	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.385 0.393 0.388 0.406 0.388 0.411 0.411 0.411 0.405	88.73	A	205	169	474	30	34	216	35	159	24	2	479											
		Jumlah	3.549		SANGAT BAIK																						
43	KABUPATEN PANGANDARAN Kode Wilayah 12910	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.384 0.386 0.373 0.395 0.382 0.373 0.378 0.362 0.418	86.60	B	310	343	653	62	130	359	80	31	3	0	573											
		Jumlah	3.464		BAIK																						

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI [9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017]	NILAI RATA RATA TERTIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEEN				JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEEN								KETERANGAN										
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	KOTA CIMAHI Kode Wilayah 13100	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.362 0.367 0.348 0.382 0.363 0.367 0.373 0.362 0.411	83.28	B	273	198	471	3	31	201	36	129	22	1	472											
		Jumlah	3.331		BAIK																						
43	KOTA BANJAR Kode Wilayah 13300	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.343 0.373 0.379 0.347 0.386 0.397 0.395 0.385 0.388	84.83	B	390	349	728	35	53	205	4	541	5	31	428											
		Jumlah	3.193		BAIK																						

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI [9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017]	NILAI RATA RATA TERTIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEEN				JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEEN								KETERANGAN											
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	IKM BAPENDA	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3767 0.3818 0.3773 0.3877 0.3835 0.3851 0.3895 0.3854 0.4043	86.78	B	12,263	7,644	39,907	602	1,757	10,778	2,333	3,994	404	39	19,507												
		Jumlah	8.4713		BAIK																							

KETERANGAN :
 Jumlah PPPD dengan nilai IKM "A" (SANGAT BAIK) **16**
 Jumlah PPPD dengan nilai IKM "B" (BAIK) **18**

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PROVINSI JAWA BARAT
 SURABAYA
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
 DPTB
 PENGADILAN NEGERI
 DR. H. FIRMAN ADAMAS, S.I., M.M.Pd
 Perwakilan
 Telp. (031) 501 1005

Page 13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan IV Tahun 2020

<p>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BANDAR PENDAPATAN DAERAH Jalan Soekarno Hatta No. 52B Telepon : (022) 799197 Faksimil : (022) 755488 Website : bapenda.jabarprov.go.id E-mail : bapenda@jabarprov.go.id Survei Kepuasan Masyarakat Periode Keempat Tahun 2020</p> <p>Nomor Surat : 973/PB-19 -P1 Tgl : 23 Desember 2020 Lampiran : 1 (satu) berkas Yth : Gubernur Jawa Barat Drs. Khofifah Indar Parawansa, M.Pd. Kepala Biro Organisasi Oleh : TEMPAT</p> <p>Menindaklanjuti surat Nomor : 973/14/20-P1, tanggal 14 Juli 2020 terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020, bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui 34 Pusat Pengelolaan Perdagangan dan Perusahaan (PPP) di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat pada triwulan IV tahun 2020 menerapkan pelaksanaan SKM sebanyak 4 (empat) kali. Berkenaan hal dimaksud, dengan hormat disampaikan laporan pelaksanaan SKM dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai dengan periode keempat sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Periode Survei</th> <th>Jumlah Responden (orang)</th> <th>Nilai IKM</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Juni sd Juli</td> <td>13.600</td> <td>95,39</td> <td>Konvensional</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Juli sd Agustus</td> <td>15.833</td> <td>86,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>September sd Oktober</td> <td>19.367</td> <td>86,78</td> <td>Henggaran Agih SKM Berbasis Webstore</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>November sd Desember</td> <td>17.382</td> <td>89,30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan hasil tersebut, terdapat penambahan jumlah responden yang cukup signifikan sejurus kepuasan masyarakat dikenakan metode aplikasi PPP berbasis webstore. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat/Wabup/Raja yang dituju dalam survei ini memang mengikuti pelaksanaan penyelesaian layanan publik kesiapanan di 34 PPP semakin meningkat.</p> <p>Nilai IKM Periode Keempat (November sd Desember 2020) adalah 89,30 dengan Indeks Mutu "A" ("Sangat Baik") dan jumlah PPP dengan Indeks Mutu "C" ("Cukup Baik") bertambah menjadi 34 PPP, sedangkan PPP dengan Indeks Mutu "B" ("Baik") sejumlah 15 PPP sehingga mencapai tertinggi.</p> <p>Demikian, atas perhatiannya diharapkan teman-teman hasil:</p> <p style="text-align: right;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH <i>(Tanda tangan)</i> PROVINSI JAWA BARAT, 23 DESEMBER 2020</p>	No	Periode Survei	Jumlah Responden (orang)	Nilai IKM	Keterangan	1.	Juni sd Juli	13.600	95,39	Konvensional	2.	Juli sd Agustus	15.833	86,69		3.	September sd Oktober	19.367	86,78	Henggaran Agih SKM Berbasis Webstore	4.	November sd Desember	17.382	89,30		<p>Lampiran Surat Nomor : 973/2518-P1 Tanggal : 23 Desember 2020</p> <p>LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PERIODE KEEMPAT (NOVEMBER SD DESEMBER 2020) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">URAIAN PPP / KODE WILAYAH</th> <th rowspan="2">UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)</th> <th rowspan="2">NILAI RATA RATA TERITIMBANG</th> <th rowspan="2">NILAI IKM</th> <th colspan="10">JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEK</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>PRIA</th> <th>WANITA</th> <th>Jumlah</th> <th>SD</th> <th>SMP</th> <th>SMA</th> <th>D 3</th> <th>S 1</th> <th>S 2</th> <th>S 3</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td colspan="18">1. KOTA DEPOK</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">Kode Wilayah 20100</td> <td>1. Persyaratan</td> <td>0.3926</td> <td rowspan="10">91.06</td> <td rowspan="10">A</td> <td rowspan="10">395</td> <td rowspan="10">134</td> <td rowspan="10">529</td> <td rowspan="10">0</td> <td rowspan="10">11</td> <td rowspan="10">412</td> <td rowspan="10">59</td> <td rowspan="10">47</td> <td rowspan="10">0</td> <td rowspan="10">0</td> <td rowspan="10">529</td> <td rowspan="10">-</td> </tr> <tr> <td>2. Sistem Mekanisme dan Prosedur</td> <td>0.4018</td> </tr> <tr> <td>3. Waktu Penyelesaian</td> <td>0.4142</td> </tr> <tr> <td>4. Biaya/Tarif</td> <td>0.4001</td> </tr> <tr> <td>5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan</td> <td>0.3995</td> </tr> <tr> <td>6. Kompetensi Pelaksana</td> <td>0.4083</td> </tr> <tr> <td>7. Perilaku Pelaksana</td> <td>0.4138</td> </tr> <tr> <td>8. Sarana dan Prasarana</td> <td>0.3959</td> </tr> <tr> <td>9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.4155</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>3.6423</td> </tr> <tr> <td colspan="18">2. KOTA DEPOK II CINERE</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">Kode Wilayah 20110</td> <td>1. Persyaratan</td> <td>0.4316</td> <td rowspan="10">97.50</td> <td rowspan="10">A</td> <td rowspan="10">1.012</td> <td rowspan="10">200</td> <td rowspan="10">1.212</td> <td rowspan="10">0</td> <td rowspan="10">5</td> <td rowspan="10">642</td> <td rowspan="10">401</td> <td rowspan="10">149</td> <td rowspan="10">14</td> <td rowspan="10">1</td> <td rowspan="10">1.212</td> <td rowspan="10">-</td> </tr> <tr> <td>2. Sistem Mekanisme dan Prosedur</td> <td>0.4322</td> </tr> <tr> <td>3. Waktu Penyelesaian</td> <td>0.4336</td> </tr> <tr> <td>4. Biaya/Tarif</td> <td>0.4336</td> </tr> <tr> <td>5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan</td> <td>0.4336</td> </tr> <tr> <td>6. Kompetensi Pelaksana</td> <td>0.4347</td> </tr> <tr> <td>7. Perilaku Pelaksana</td> <td>0.4340</td> </tr> <tr> <td>8. Sarana dan Prasarana</td> <td>0.4343</td> </tr> <tr> <td>9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.4324</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>3.9000</td> </tr> <tr> <td colspan="18">3. KABUPATEN BOGOR</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">Kode Wilayah 10200</td> <td>1. Persyaratan</td> <td>0.3610</td> <td rowspan="10">86.43</td> <td rowspan="10">B</td> <td rowspan="10">162</td> <td rowspan="10">239</td> <td rowspan="10">401</td> <td rowspan="10">0</td> <td rowspan="10">13</td> <td rowspan="10">278</td> <td rowspan="10">64</td> <td rowspan="10">42</td> <td rowspan="10">3</td> <td rowspan="10">1</td> <td rowspan="10">401</td> <td rowspan="10">-</td> </tr> <tr> <td>2. Sistem Mekanisme dan Prosedur</td> <td>0.3903</td> </tr> <tr> <td>3. Waktu Penyelesaian</td> <td>0.3828</td> </tr> <tr> <td>4. Biaya/Tarif</td> <td>0.3903</td> </tr> <tr> <td>5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan</td> <td>0.3870</td> </tr> <tr> <td>6. Kompetensi Pelaksana</td> <td>0.3939</td> </tr> <tr> <td>7. Perilaku Pelaksana</td> <td>0.3911</td> </tr> <tr> <td>8. Sarana dan Prasarana</td> <td>0.3789</td> </tr> <tr> <td>9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.3817</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>3.4570</td> </tr> <tr> <td colspan="18">4. KOTA BOGOR</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">Kode Wilayah 10300</td> <td>1. Persyaratan</td> <td>0.3845</td> <td rowspan="10">89.52</td> <td rowspan="10">A</td> <td rowspan="10">207</td> <td rowspan="10">226</td> <td rowspan="10">433</td> <td rowspan="10">3</td> <td rowspan="10">3</td> <td rowspan="10">62</td> <td rowspan="10">150</td> <td rowspan="10">200</td> <td rowspan="10">15</td> <td rowspan="10">0</td> <td rowspan="10">433</td> <td rowspan="10">-</td> </tr> <tr> <td>2. Sistem Mekanisme dan Prosedur</td> <td>0.3907</td> </tr> <tr> <td>3. Waktu Penyelesaian</td> <td>0.3914</td> </tr> <tr> <td>4. Biaya/Tarif</td> <td>0.3991</td> </tr> <tr> <td>5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan</td> <td>0.3971</td> </tr> <tr> <td>6. Kompetensi Pelaksana</td> <td>0.4007</td> </tr> <tr> <td>7. Perilaku Pelaksana</td> <td>0.4017</td> </tr> <tr> <td>8. Sarana dan Prasarana</td> <td>0.4053</td> </tr> <tr> <td>9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.4104</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>3.5809</td> </tr> <tr> <td colspan="18">5. KOTA SUKABUMI</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">Kode Wilayah 10400</td> <td>1. Persyaratan</td> <td>0.4012</td> <td rowspan="10">90.79</td> <td rowspan="10">A</td> <td rowspan="10">320</td> <td rowspan="10">134</td> <td rowspan="10">454</td> <td rowspan="10">4</td> <td rowspan="10">17</td> <td rowspan="10">254</td> <td rowspan="10">85</td> <td rowspan="10">94</td> <td rowspan="10">0</td> <td rowspan="10">0</td> <td rowspan="10">454</td> <td rowspan="10">-</td> </tr> <tr> <td>2. Sistem Mekanisme dan Prosedur</td> <td>0.3980</td> </tr> <tr> <td>3. Waktu Penyelesaian</td> <td>0.3897</td> </tr> <tr> <td>4. Biaya/Tarif</td> <td>0.4041</td> </tr> <tr> <td>5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan</td> <td>0.4010</td> </tr> <tr> <td>6. Kompetensi Pelaksana</td> <td>0.4076</td> </tr> <tr> <td>7. Perilaku Pelaksana</td> <td>0.4080</td> </tr> <tr> <td>8. Sarana dan Prasarana</td> <td>0.3949</td> </tr> <tr> <td>9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</td> <td>0.4269</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>3.6314</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN PPP / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERITIMBANG	NILAI IKM	JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEK										KETERANGAN	PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1. KOTA DEPOK																		Kode Wilayah 20100	1. Persyaratan	0.3926	91.06	A	395	134	529	0	11	412	59	47	0	0	529	-	2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.4018	3. Waktu Penyelesaian	0.4142	4. Biaya/Tarif	0.4001	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	0.3995	6. Kompetensi Pelaksana	0.4083	7. Perilaku Pelaksana	0.4138	8. Sarana dan Prasarana	0.3959	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4155	Jumlah	3.6423	2. KOTA DEPOK II CINERE																		Kode Wilayah 20110	1. Persyaratan	0.4316	97.50	A	1.012	200	1.212	0	5	642	401	149	14	1	1.212	-	2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.4322	3. Waktu Penyelesaian	0.4336	4. Biaya/Tarif	0.4336	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	0.4336	6. Kompetensi Pelaksana	0.4347	7. Perilaku Pelaksana	0.4340	8. Sarana dan Prasarana	0.4343	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4324	Jumlah	3.9000	3. KABUPATEN BOGOR																		Kode Wilayah 10200	1. Persyaratan	0.3610	86.43	B	162	239	401	0	13	278	64	42	3	1	401	-	2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.3903	3. Waktu Penyelesaian	0.3828	4. Biaya/Tarif	0.3903	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	0.3870	6. Kompetensi Pelaksana	0.3939	7. Perilaku Pelaksana	0.3911	8. Sarana dan Prasarana	0.3789	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3817	Jumlah	3.4570	4. KOTA BOGOR																		Kode Wilayah 10300	1. Persyaratan	0.3845	89.52	A	207	226	433	3	3	62	150	200	15	0	433	-	2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.3907	3. Waktu Penyelesaian	0.3914	4. Biaya/Tarif	0.3991	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	0.3971	6. Kompetensi Pelaksana	0.4007	7. Perilaku Pelaksana	0.4017	8. Sarana dan Prasarana	0.4053	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4104	Jumlah	3.5809	5. KOTA SUKABUMI																		Kode Wilayah 10400	1. Persyaratan	0.4012	90.79	A	320	134	454	4	17	254	85	94	0	0	454	-	2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.3980	3. Waktu Penyelesaian	0.3897	4. Biaya/Tarif	0.4041	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	0.4010	6. Kompetensi Pelaksana	0.4076	7. Perilaku Pelaksana	0.4080	8. Sarana dan Prasarana	0.3949	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4269	Jumlah	3.6314
No	Periode Survei	Jumlah Responden (orang)	Nilai IKM	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1.	Juni sd Juli	13.600	95,39	Konvensional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2.	Juli sd Agustus	15.833	86,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3.	September sd Oktober	19.367	86,78	Henggaran Agih SKM Berbasis Webstore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4.	November sd Desember	17.382	89,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NO	URAIAN PPP / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERITIMBANG	NILAI IKM	JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEK										KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3		Jumlah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1. KOTA DEPOK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kode Wilayah 20100	1. Persyaratan	0.3926	91.06	A	395	134	529	0	11	412	59	47	0	0	529	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.4018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3. Waktu Penyelesaian	0.4142																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	4. Biaya/Tarif	0.4001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	0.3995																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	6. Kompetensi Pelaksana	0.4083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	7. Perilaku Pelaksana	0.4138																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	8. Sarana dan Prasarana	0.3959																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Jumlah	3.6423																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2. KOTA DEPOK II CINERE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kode Wilayah 20110	1. Persyaratan	0.4316	97.50	A	1.012	200	1.212	0	5	642	401	149	14	1	1.212	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.4322																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3. Waktu Penyelesaian	0.4336																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	4. Biaya/Tarif	0.4336																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	0.4336																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	6. Kompetensi Pelaksana	0.4347																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	7. Perilaku Pelaksana	0.4340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	8. Sarana dan Prasarana	0.4343																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4324																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Jumlah	3.9000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3. KABUPATEN BOGOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kode Wilayah 10200	1. Persyaratan	0.3610	86.43	B	162	239	401	0	13	278	64	42	3	1	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.3903																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3. Waktu Penyelesaian	0.3828																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	4. Biaya/Tarif	0.3903																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	0.3870																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	6. Kompetensi Pelaksana	0.3939																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	7. Perilaku Pelaksana	0.3911																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	8. Sarana dan Prasarana	0.3789																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3817																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Jumlah	3.4570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4. KOTA BOGOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kode Wilayah 10300	1. Persyaratan	0.3845	89.52	A	207	226	433	3	3	62	150	200	15	0	433	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.3907																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3. Waktu Penyelesaian	0.3914																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	4. Biaya/Tarif	0.3991																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	0.3971																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	6. Kompetensi Pelaksana	0.4007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	7. Perilaku Pelaksana	0.4017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	8. Sarana dan Prasarana	0.4053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Jumlah	3.5809																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5. KOTA SUKABUMI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Kode Wilayah 10400	1. Persyaratan	0.4012	90.79	A	320	134	454	4	17	254	85	94	0	0	454	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	0.3980																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3. Waktu Penyelesaian	0.3897																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	4. Biaya/Tarif	0.4041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	0.4010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	6. Kompetensi Pelaksana	0.4076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	7. Perilaku Pelaksana	0.4080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	8. Sarana dan Prasarana	0.3949																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4269																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Jumlah	3.6314																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERITMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDE									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3670 0.3750 0.3634 0.3750 0.3772 0.3813 0.4048 0.3871 0.3901	85.52	326	76	402	1	12	297	35	50	7	0	402	-	
	Kode Wilayah 10500	Jumlah	3.421	BAIK	B												
7	KABUPATEN SUKABUMI II PALABUHAN RATU	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4064 0.4053 0.4049 0.4187 0.4082 0.4076 0.4064 0.3945 0.4144	91.66	167	403	570	18	137	361	32	21	1	0	570	-	
	Kode Wilayah 10510	Jumlah	3.6663	SANGAT BAIK	A												
8	KABUPATEN CIANJUR	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3887 0.3849 0.3727 0.3874 0.3860 0.3898 0.3973 0.3671 0.4127	87.17	338	190	528	34	113	243	38	95	5	0	528	-	
	Kode Wilayah 10700	Jumlah	3.4866	BAIK	B												

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERITMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDE									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	KOTA BEKASI	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3987 0.3912 0.3917 0.3992 0.3915 0.3914 0.3912 0.3973 0.3892	88.14	226	394	620	74	34	228	78	158	48	0	620	-	
	Kode Wilayah 20800	Jumlah	3.5255	BAIK	B												
10	KABUPATEN BEKASI	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3613 0.3588 0.3646 0.3995 0.3665 0.3753 0.3704 0.3586 0.3991	83.68	315	89	404	2	6	312	43	37	4	0	404	-	
	Kode Wilayah 20900	Jumlah	3.3471	BAIK	B												
11	KABUPATEN KARAWANG	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3874 0.4061 0.3623 0.3869 0.4101 0.3992 0.4170 0.4120 0.4152	89.81	151	265	416	14	15	223	77	80	7	0	416	-	
	Kode Wilayah 11000	Jumlah	3.5922	SANGAT BAIK	A												

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERITMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDE									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	KABUPATEN PURWAKARTA	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3602 0.3754 0.3890 0.3957 0.4024 0.4034 0.3997 0.4050 0.3997	88.16	287	129	416	3	23	318	33	36	3	0	416	-	
	Kode Wilayah 11100	Jumlah	3.5265	BAIK	B												
13	KABUPATEN SUBANG	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4054 0.3852 0.3879 0.3842 0.3925 0.3810 0.3930 0.3894 0.3891	87.19	236	215	451	3	32	361	13	40	2	0	451	-	
	Kode Wilayah 11200	Jumlah	3.4877	BAIK	B												
14	KOTA CIREBON	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4042 0.4034 0.4029 0.4026 0.3995 0.3998 0.3990 0.3990 0.4005	90.27	296	133	429	1	1	294	99	33	1	0	429	-	
	Kode Wilayah 11300	Jumlah	3.6109	SANGAT BAIK	A												

Page 5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsus sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEN									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
15	KABUPATEN CIREBON I	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3626 0.3673 0.3552 0.4169 0.3656 0.3736 0.3695 0.3700 0.4218	85.06	247	158	405	57	47	185	30	76	10	0	405	-	B
		Jumlah	3.4025	BAIK													
16	KABUPATEN CIREBON II	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3965 0.3912 0.3962 0.3860 0.3944 0.3863 0.3910 0.3878 0.4031	88.31	249	174	423	26	48	267	38	43	1	0	423	-	A
		Jumlah	3.5325	SANGAT BAIK													
17	KABUPATEN INDRAMAYU I	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3920 0.3886 0.3826 0.3919 0.3939 0.3916 0.3923 0.3831 0.3968	87.85	557	415	972	18	105	548	159	135	6	1	972	-	B
		Jumlah	3.5138	BAIK													

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsus sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEN									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
18	KABUPATEN INDRAMAYU II	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4195 0.3964 0.3964 0.3959 0.3988 0.3959 0.4007 0.4042 0.4083	90.40	316	97	413	5	34	323	18	27	6	0	413	-	A
		Jumlah	3.6161	SANGAT BAIK													
19	KABUPATEN KUNINGAN	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4125 0.4052 0.3894 0.4120 0.4027 0.4070 0.4085 0.4022 0.4279	91.69	220	221	441	7	47	264	4	118	1	0	441	-	A
		Jumlah	3.6674	SANGAT BAIK													
20	KABUPATEN MAJALENGKA	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3745 0.3656 0.3528 0.4123 0.4151 0.4228 0.4225 0.3775 0.4001	88.58	303	173	476	28	35	294	29	89	1	0	476	-	A
		Jumlah	3.5432	SANGAT BAIK													

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsus sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEN									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
21	KOTA BANDUNG I	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3855 0.3839 0.3893 0.3847 0.3974 0.3898 0.3971 0.3893 0.4117	88.22	315	97	412	16	76	189	64	57	10	0	412	-	B
		Jumlah	3.5287	BAIK													
22	KOTA BANDUNG II	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3683 0.4002 0.3899 0.4035 0.3964 0.4076 0.4019 0.4098 0.4309	90.21	275	131	406	8	14	184	89	88	23	0	406	-	A
		Jumlah	3.6085	SANGAT BAIK													
23	KOTA BANDUNG III	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3937 0.3890 0.3845 0.3996 0.4072 0.4114 0.4166 0.4150 0.4279	91.12	288	182	470	0	11	193	140	91	34	1	470	-	A
		Jumlah	3.6449	SANGAT BAIK													

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERTIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEK									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
24	KABUPATEN BANDUNG BARAT	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3588 0.3688 0.3547 0.3807 0.3605 0.3753 0.3777 0.3672 0.4182	84.05	417	95	512	34	64	308	27	72	6	1	512	-	
		Jumlah	3.3619	BAIK													
25	KABUPATEN BANDUNG I RANCABEK	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3820 0.3814 0.3838 0.3825 0.3822 0.3840 0.3879 0.3635 0.4030	86.26	358	75	433	15	20	194	112	86	6	0	433	-	
		Jumlah	3.4503	BAIK													
26	KABUPATEN BANDUNG II SOREANG	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3847 0.3759 0.3694 0.3808 0.3806 0.3765 0.3770 0.3683 0.3724	84.64	245	163	406	3	22	286	35	58	1	1	406	-	
		Jumlah	3.3856	BAIK													

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERTIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEK									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
27	KABUPATEN SUMEDANG	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.4272 0.4272 0.4258 0.4260 0.4291 0.4299 0.4303 0.4314 0.4316	96.46	345	327	672	27	163	216	66	193	7	0	672	-	
		Jumlah	3.8585	SAANGAT BAIK													
28	KABUPATEN GARUT	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3704 0.3845 0.3924 0.3965 0.3918 0.3952 0.4043 0.4140 0.4330	89.55	743	362	1.105	3	41	512	102	390	56	1	1.105	-	
		Jumlah	3.5821	SAANGAT BAIK													
29	KOTA TASIKMALAYA	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3522 0.3945 0.3828 0.4027 0.3900 0.3995 0.4030 0.4038 0.4400	89.21	259	158	417	0	0	145	23	245	4	0	417	-	
		Jumlah	3.5685	SAANGAT BAIK													

NO	URAIAN PPPD / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERTIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEN			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEK									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
30	KABUPATEN TASIKMALAYA	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3753 0.3855 0.3904 0.3939 0.3898 0.3995 0.4063 0.4092 0.4057	88.89	243	169	412	58	57	134	95	62	6	0	412	-	
		Jumlah	3.5556	SAANGAT BAIK													
31	KABUPATEN CIAMIS	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3809 0.3949 0.3913 0.4148 0.3838 0.3845 0.3880 0.3854 0.4269	88.76	291	177	468	0	10	266	6	172	11	3	468	-	
		Jumlah	3.5505	SAANGAT BAIK													
32	KABUPATEN PANGANDARAN	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3989 0.3965 0.3918 0.3957 0.3941 0.3918 0.3957 0.3894 0.3968	88.77	259	164	423	41	61	216	19	72	14	0	423	-	
		Jumlah	3.5507	SANGAT BAIK													

NO	URAIAN PPP / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEŃ			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEŃ									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
33	KOTA CIMAHI	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3703 0.3708 0.3594 0.3792 0.3689 0.3689 0.3753 0.3665 0.4004	83.99	B												
		Jumlah	3.3597	BAIK													
34	KOTA BANJAR	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3474 0.3662 0.3781 0.3546 0.3871 0.3989 0.4028 0.3861 0.3835	85.12	B												
		Jumlah	3.4047	BAIK													

NO	URAIAN PPPP / KODE WILAYAH	UNSUR LAYANAN YANG DINILAI (9 Unsur sesuai PERMENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017)	NILAI RATA RATA TERIMBANG	NILAI IKM	JUMLAH RESPONDEŃ			JENJANG PENDIDIKAN RESPONDEŃ									KETERANGAN
					PRIA	WANITA	Jumlah	SD	SMP	SMA	D 3	S 1	S 2	S 3	Jumlah		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	IKM BAPENDA	1 Persyaratan 2 Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Waktu Penyelesaian 4 Biaya/Tarif 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 6 Kompetensi Pelaksana 7 Perilaku Pelaksana 8 Sarana dan Prasarana 9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0.3881 0.3917 0.3886 0.3985 0.3959 0.3981 0.4014 0.3945 0.4112	89.20	A												
		Jumlah	3.5680	SANGAT BAIK													

KETERANGAN :

Jumlah PPPD dengan nilai IKM "A" (SANGAT BAIK) **19**

Jumlah PPPD dengan nilai IKM "B" (BAIK) **15**



Page 13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Nilai Capaian Kinerja 2020
			Target (%)	Realisasi (%)			
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	57,52	54,04	93,95	100,68	AA

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 digambarkan dalam table berikut :

URAIAN PENDAPATAN		TARGET PERUBAHAN TAHUN 2019	REALISASI (AUDITED)	%	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2020	REALISASI (UNAUDIT)	%	KENAIKAN/ PENURUNAN REALISASI(Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN REALISASI (%)
PENDAPATAN DAERAH		36.127.118.512.463,00	36.037.894.762.460,70	99,75	38.180.645.671.617	34.777.470.830.693	91,09%	- 1.260.423.931.768,05	-3,50%
PENDAPATAN ASLI DAERAH		20.933.819.874.978,00	21.244.266.598.017,70	101,48	21.797.637.140.899	18.795.077.303.417	86,23%	- 449.189.294.601,06	-11,53%
PAJAK DAERAH		19.223.000.942.000,00	19.626.352.311.765,00	102,10	20.369.971.020.250	17.036.012.249.118	83,63%	- 590.340.062.647,00	-13,20%
1.	PKB	8.034.519.000.000,00	8.174.357.408.900,00	101,74	10.146.043.771.250	7.610.389.477.417	75,01%	- 563.967.931.483,00	-6,90%
2.	BBNKB	6.026.074.000.000,00	6.300.781.441.900,00	104,56	4.501.252.000.000	3.902.583.887.500	86,70%	- 2.398.197.554.400,00	-38,06%
3.	PBBKB	2.563.169.934.000,00	2.616.034.041.920,00	102,06	2.593.277.978.000	2.274.681.301.388	87,71%	- 341.352.740.532,00	-13,05%
4.	PAJAK AIR	60.000.000.000,00	55.711.190.736,00	92,85	50.000.000.000	58.848.052.798	117,70%	3.136.862.062,00	5,63%
5.	PAJAK ROKOK	2.539.238.008.000,00	2.479.468.228.309,00	97,65	3.079.397.271.000	3.189.509.530.015	103,58%	710.041.301.706,00	28,64%
RETRIBUSI DAERAH		53.183.796.175,00	56.222.370.756,00	105,71	34.551.610.670	40.235.423.478	116,45%	- 15.986.947.278,00	-28,44%
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		387.109.923.387,00	386.442.976.038,00	99,83	399.717.085.961	401.703.315.844	100,50%	15.260.339.806,00	3,95%
LAIN-LAIN PAD YANG SAH		1.270.525.213.416,00	1.175.248.939.458,66	92,50	993.397.424.018	1.317.126.314.977	132,59%	141.877.375.517,94	12,07%
DANA PERIMBANGAN		15.115.298.993.485,00	14.715.372.046.649,00	97,35	16.279.590.195.996	15.881.415.189.271	97,55%	1.166.043.142.622,00	7,92%
DANA BAGI HASIL PAJAK /HASIL BUKAN PAJAK		1.553.530.410.384,00	1.483.785.231.865,00	95,51	2.086.455.243.173	2.063.105.718.266	98,88%	579.320.486.401,00	39,04%
2.	Dana Alokasi Umum	3.212.647.404.000,00	3.212.647.404.000,00	100,00	2.994.344.725.000	2.964.612.155.000	99,01%	- 248.035.249.000,00	-7,72%
3.	Dana Alokasi Khusus	10.349.121.179.101,00	10.018.939.410.784,00	96,81	11.198.790.227.823	10.853.697.316.005	96,92%	834.757.905.221,00	8,33%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		77.999.644.000,00	78.256.117.794,00	100,33	103.418.334.722	100.978.338.005	97,64%	22.722.220.211,00	29,04%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan
oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar **1,260Triliyun** atau **(-3,50%)** minus tiga koma lima puluh persen, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah juga mengalami **penurunan sebesar (-11,53%)** atau sebesar **449Miliar**

3.4 Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap RPJMD 2023 yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	REALISASI SD TAHUN 2020 (3)	TARGET RPJMD 2023 (4)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 TERHADAP RPJMD 2023 (5)
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	54,04	61,59	87,74%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	89,20	84,80	105,19%

3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

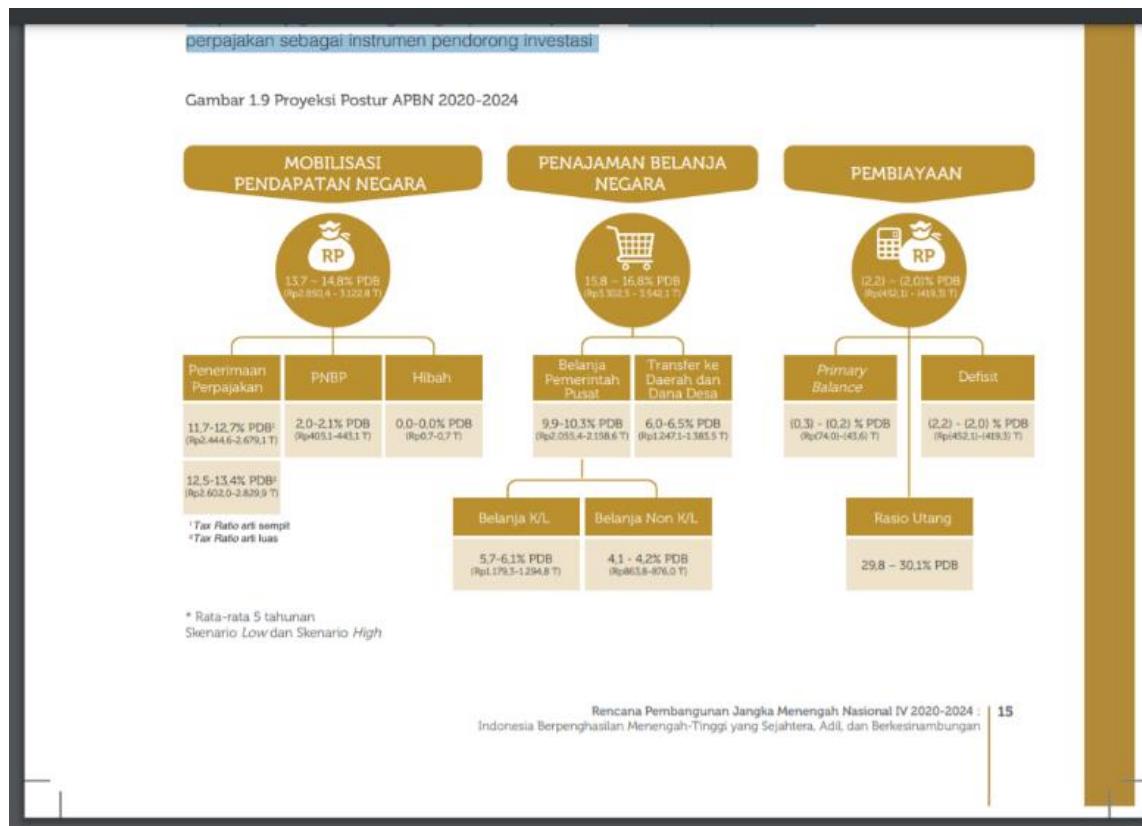
Berdasarkan Dokumen RPJMN bahwa untuk menjaga kesinambungan fiskal Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan dorongan stimulus terhadap perekonomian. Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi rata-rata 13,7 – 14,8 persen PDB per tahun, dengan rasio perpajakan mencapai rata-rata 11,7 – 12,7 persen PDB per tahun. Hal ini dicapai melalui perbaikan yang bersifat berkelanjutan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan. Dari sisi administrasi, akan terus dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dari sisi kebijakan, pemerintah akan terus melakukan penggalian potensi penerimaan, antara lain potensi yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negara dan ekstensifikasi barang kena cukai. Adapun, kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital). Dorongan stimulus terhadap perekonomian lainnya juga dilakukan dengan penajaman belanja negara.

Berikut ini perbandingan dengan Standar Nasional berdasarkan RPJMN

Uraian	Tahun 2021
Rata - Rata Kenaikan Pendapatan Negara	13.70%
Rata - Rata Kenaikan Pendapatan Daerah	5.68%
Rasio perpajakan Nasional	11.70%
Rasio Perpanjakan Daerah	5.97%



Berdasarkan data di atas perkembangan kenaikan target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat masih berada dibawah standar Nasional berdasarkan RPJMN Tahun



2020 sd 2024 namun berdasarkan Rata-rata rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi se-Indonesia Jawa Barat menunjukkan tingkat kemandirian yang makin baik dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROVINSI	PAD TAHUN 2019	PD TAHUN 2020	% PAD thd PD
1	DKI Jakarta	50.624.330.154.000	74.776.745.638.000	67,70%
2	Banten	7.344.821.273.000	11.831.983.760.000	62,08%
3	B a l i	3.587.699.211.000	6.323.498.505.000	56,74%
4	Jawa Barat	19.765.448.937.000	34.882.308.945.000	56,66%
5	Jawa Tengah	14.112.159.378.000	25.965.581.322.000	54,35%
6	Jawa Timur	16.825.138.567.000	31.927.102.732.000	52,70%
7	Kalimantan Selatan	3.647.605.586.000	6.966.945.853.000	52,36%
8	Kalimantan Timur	5.452.964.353.000	10.549.624.013.000	51,69%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

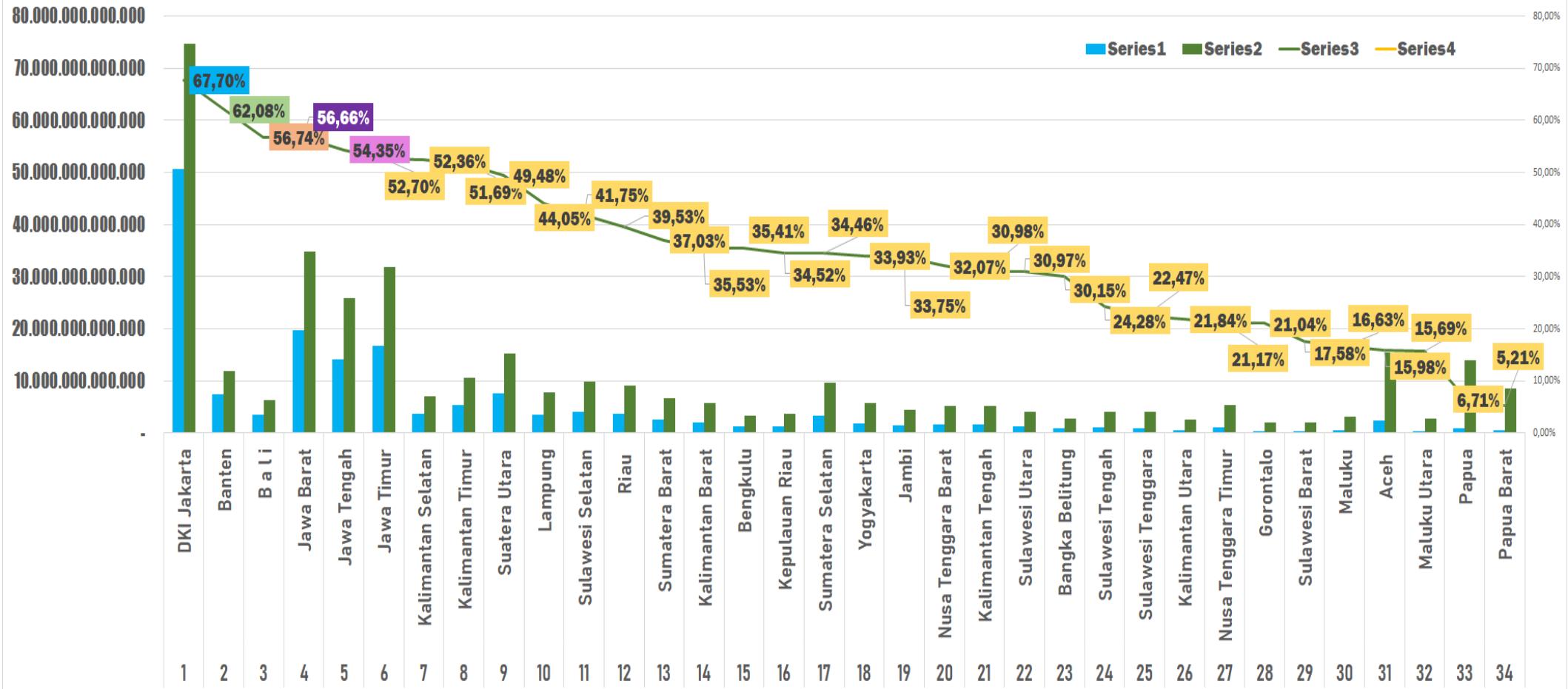
NO.	PROVINSI	PAD TAHUN 2019	PD TAHUN 2020	% PAD thd PD
9	Suatera Utara	7.583.849.755.000	15.327.752.518.000	49,48%
10	Lampung	3.423.635.941.000	7.772.923.450.000	44,05%
11	Sulawesi Selatan	4.133.010.825.000	9.899.896.556.000	41,75%
12	Riau	3.609.065.922.000	9.129.049.317.000	39,53%
13	Sumatera Barat	2.491.393.000.000	6.728.868.629.000	37,03%
14	Kalimantan Barat	2.046.976.954.000	5.760.665.710.000	35,53%
15	Bengkulu	1.188.157.368.000	3.355.171.247.000	35,41%
16	Kepulauan Riau	1.252.765.640.000	3.629.564.171.000	34,52%
17	Sumatera Selatan	3.329.244.877.000	9.660.923.646.000	34,46%
18	Yogyakarta	1.921.564.734.000	5.663.778.511.000	33,93%
19	Jambi	1.524.642.944.000	4.517.553.135.000	33,75%
20	Nusa Tenggara Barat	1.682.135.490.000	5.244.782.852.000	32,07%
21	Kalimantan Tengah	1.594.702.206.000	5.147.443.692.000	30,98%
22	Sulawesi Utara	1.269.244.160.000	4.098.657.797.000	30,97%
23	Bangka Belitung	817.000.397.000	2.709.871.337.000	30,15%
24	Sulawesi Tengah	1.007.404.152.000	4.149.229.912.000	24,28%
25	Sulawesi Tenggara	905.235.112.000	4.029.396.384.000	22,47%
26	Kalimantan Utara	560.761.385.000	2.568.161.043.000	21,84%
27	Nusa Tenggara Timur	1.131.943.379.000	5.347.158.022.000	21,17%
28	Gorontalo	411.531.175.000	1.955.666.594.000	21,04%
29	Sulawesi Barat	370.109.976.000	2.104.832.041.000	17,58%
30	Maluku	532.803.031.000	3.203.799.760.000	16,63%
31	Aceh	2.481.629.034.000	15.524.911.890.000	15,98%
32	Maluku Utara	430.157.211.000	2.742.085.743.000	15,69%
33	Papua	938.055.365.000	13.978.117.822.000	6,71%
34	Papua Barat	441.617.184.000	8.479.203.287.000	5,21%

Sumber dari BPS.go.id

Rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (PD) Provinsi Jawa Barat yaitu berada pada posisi ke-4 (keempat) di bawah DKI Jakarta, Banten dan Bali, meskipun jumlah PD & PAD Jawa Barat berada pada posisi ke-2 (ke-

dua) dibawah DKI Jakarta yang memang merupakan Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SE-INDONESIA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan
oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

3.6.1 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam melakukan penilaian kinerja pendapatan Tahun 2020, tidak akan terlepas dari penilaian asumsi-asumsi yang melandasi penyusunan target pendapatan daerah, terutama yang telah disepakati bersama DPRD sejak APBD murni hingga koreksinya pada perubahan APBD 2020 lalu.

Kondisi lingkungan yang melandasi penyusunan target pendapatan daerah di murni maupun perubahan 2020, antara lain kondisi ekonomi makro nasional, kebijakan dana transfer dalam APBN Perubahan 2020, alokasi kuota BBM serta kebijakan harga BBM yang mengikuti harga minyak mentah dunia, kondisi pemasaran kendaraan, preferensi konsumsi masyarakat yang dipengaruhi tingkat daya beli masyarakat daerah hingga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Intensifikasi yang dilakukan seluruh perangkat daerah untuk pelampaunan penerimaan pendapatan asli daerah, tidak diikuti oleh penerimaan dana transfer yang secara nasional hanya merealisasikan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 91,06% dari pagu APBN Tahun 2020, yang dipengaruhi oleh ketidakcapaian penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan Negara bukan pajak, sehingga target pendapatan daerah Tahun 2020 dapat terlalisasikan sebesar **Rp.36,315 triliun** atau **100,52%** dibandingkan dengan penetapan target perubahan sebesar **Rp.36,127 triliun**.

Berdasarkan jenis penerimanya, pencapaian target PAD tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar **Rp21.797 triliun** atau tercapai sebesar **86,23%**, Dana Perimbangan hanya mencapai **Rp.14,715 triliun** atau sebesar **97,35%** serta Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah yang mencapai Rp16,279 miliar atau sebesar **97,55%**.

Pencapaian pendapatan daerah Tahun 2020, secara lebih teknis dapat disampaikan sebagai berikut :

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pencapaian PAD sebesar **Rp18,795 triliun** atau sebesar **86,23%** dari target perubahan Tahun 2020 sebesar Rp21,797 triliun, terkontribusi dari realisasi Pajak Daerah sebesar **Rp.17,036 triliun**, Retribusi Daerah sebesar **Rp40,235 miliar**, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp401,703 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar **Rp1,317 triliun**.

1. PAJAK DAERAH

a. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya mencapai 75,01% atau sebesar Rp.7.610.388.642.717,- dari target sebesar Rp.10.146.043.771.250,-. Target yang tidak tercapai tersebut dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid-19 yang masih berlangsung.

Terganggunya program intensifikasi pajak daerah, mengingat diberlakukannya pembatasan jam layanan, penerapan *social distancing* saat pelayanan, pemberlakukan PSBB, penutupan sementara beberapa titik layanan secara otomatis mempengaruhi aktivitas intensifikasi seperti penagihan *door to door*, penelusuran dan operasi gabungan dengan Kepolisian serta banyaknya pegawai yang terpapar virus covid-19.

Upaya meningkatkan pendapatan dari sektor PKB adalah mendorong pemanfaatan e-samsat dengan sejumlah penyempurnaan aplikasi dan bisnis proses, Memperpanjang program triple untung sampai dengan akhir tahun 2020, Penyediaan fasilitas protokol kesehatan pencegahan covid-19 di setiap unit layanan pajak.

Program Pembebasan PKB Sanksi Administratif yang digulirkan pemerintah provinsi jawa barat tidak dapat meningkatkan pendapatan dari sektor PKB dikarenakan menurunnya tingkat perekonomian dan konsumsi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak menurun.

Capaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per P3DW se-Jawa Barat adalah sebagai berikut :

NO	CABANG	PKB		
		TARGET	REALISASI	%
1	KOTA BANDUNG III SOETA	446,612,932,000	382,450,791,725	85.63%
2	KOTA BANDUNG II KWLYN	492,673,426,000	420,454,525,950	85.34%
3	KOTA BANDUNG I PJRPN	485,169,055,250	413,542,928,500	85.24%
4	KOTA CIMAHI	182,338,488,500	151,636,942,000	83.16%
5	KOTA CIREBON	135,296,200,500	107,208,702,100	79.24%
6	KOTA BOGOR	360,239,276,500	283,573,337,700	78.72%
7	KOTA BEKASI	1,340,842,274,750	1,046,676,391,950	78.06%
8	KOTA BANJAR	26,153,857,500	20,290,592,600	77.58%
9	KOTA TASIKMALAYA	123,285,754,250	95,449,422,700	77.42%
10	KAB. BANDUNG II SOREANG	292,483,416,500	224,603,672,375	76.79%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	CABANG	PKB		
		TARGET	REALISASI	%
11	KAB. BANDUNG BARAT PDLG	332,672,037,500	254,824,821,100	76.60%
12	KOTA DEPOK II CINERE	284,827,206,500	216,778,018,900	76.11%
13	KAB. BANDUNG I RC.EKEK	271,339,298,500	206,473,491,200	76.09%
14	KOTA DEPOK I	547,283,629,750	415,521,517,150	75.92%
15	KAB. CIAMIS I	107,781,977,500	81,798,013,500	75.89%
16	KOTA SUKABUMI	77,271,319,500	58,520,244,000	75.73%
17	KAB. KUNINGAN	135,179,822,750	102,031,451,300	75.48%
18	KAB. TASIKMALAYA	117,010,410,500	87,135,924,275	74.47%
19	KAB. CIAMIS II PGDRN	36,569,164,750	26,926,803,450	73.63%
20	KAB. SUMEDANG	122,280,604,000	89,785,688,300	73.43%
21	KAB. MAJALENGKA	146,837,804,000	107,713,956,600	73.36%
22	KAB. CIREBON I SBR	224,610,502,750	164,456,303,500	73.22%
23	KAB. BEKASI CKRG	1,088,053,794,500	772,674,066,900	71.01%
24	KAB. CIREBON II CLDG	93,976,004,750	65,547,421,717	69.75%
25	KAB. KARAWANG	485,339,334,750	336,207,200,150	69.27%
26	KAB. CIANJUR	210,008,560,500	145,378,278,125	69.22%
27	KAB. INDRAMAYU I	169,912,897,500	117,345,834,300	69.06%
28	KAB. BOGOR (CIBINONG)	934,612,594,000	632,690,426,800	67.70%
29	KAB. GARUT	185,911,017,000	125,255,834,400	67.37%
30	KAB. PURWAKARTA	165,730,361,250	111,649,479,200	67.37%
31	KAB. SUKABUMI I CBDK	175,180,192,000	117,778,173,300	67.23%
32	KAB. SUBANG	201,871,737,250	134,255,618,350	66.51%
33	KAB. INDRAMAYU II HRGLS	70,511,208,750	45,661,394,400	64.76%
34	KAB. SUKABUMI II P.RATU	76,177,609,250	48,091,374,200	63.13%
Grand Total		10,146,043,771,250	7,610,388,642,717	75.01%

Dari seluruh P3DW yang melakukan pungutan Pajak Kendaraan tidak ada satu P3DW pun yang mencapai target 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

b. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Capaian realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai 86,04% atau sebesar Rp.3.902.583.887.500,- dari target sebesar Rp.4.535.600.000.000,- terdiri dari realisasi BBNKB-I sebesar Rp.3.867.588.009.400,- dari target sebesar Rp.4.501.252.000.000,- atau 85,92% dan dari realisasi BBNKB-II sebesar Rp.34.995.878.100,- dari target Rp.34.348.000.000,- atau sebesar 101,89%.

Ketidaktercapaian BBNKB berdasarkan data yang diperoleh dari Gaikindo, pasar otomotif mengalami penurunan disebabkan menurunnya permintaan akan kendaraan baru dan adanya penyesuaian kapasitas produksi dan beberapa APM menghentikan produksi untuk menjaga tingkat ketersediaan.

Pemberlakuan pembatasan jam layanan, penerapan *social distancing* saat pelayanan, pemberlakukan PSBB, penutupan sementara di beberapa titik layanan, secara otomatis mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Baru.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa pengurangan sebagian pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) masih belum optimal dikarenakan daya beli masyarakat menurun dari tahun-tahun sebelumnya dampak pademi covid-19.

Capaian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) per P3D se-Jawa Barat adalah sebagai berikut :

NO	CABANG	BBNKB I		
		TARGET	REALISASI	%
1	KOTA BANDUNG III SOETA	117,323,000,000	167,238,265,500	142.55%
2	KOTA BANDUNG II KWLYN	126,376,000,000	160,024,590,300	126.63%
3	KOTA BANDUNG I PJRN	129,809,000,000	156,659,858,800	120.68%
4	KOTA CIREBON	40,381,000,000	46,832,316,100	115.98%
5	KOTA BEKASI	449,761,000,000	492,304,777,200	109.46%
6	KOTA SUKABUMI	26,368,000,000	26,324,392,400	99.83%
7	KOTA BOGOR	134,431,000,000	132,485,929,500	98.55%
8	KOTA CIMAH	63,765,000,000	60,905,068,700	95.51%
9	KOTA DEPOK I	211,930,000,000	193,277,942,900	91.20%
10	KOTA DEPOK II CINERE	112,913,000,000	102,808,880,700	91.05%
11	KAB. BANDUNG II SOREANG	129,517,000,000	111,473,056,200	86.07%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	CABANG	BBNKB I		
		TARGET	REALISASI	%
12	KAB. BEKASI CKRG	502,221,000,000	430,380,703,800	85.70%
13	KAB. BANDUNG I RC.EKEK	122,638,000,000	104,822,543,400	85.47%
14	KAB. SUKABUMI II P.RATU	40,774,000,000	34,081,030,000	83.59%
15	KAB. PURWAKARTA	79,865,000,000	62,204,894,200	77.89%
16	KAB. BANDUNG BARAT PDLG	156,537,000,000	121,137,522,700	77.39%
17	KAB. KARAWANG	273,191,000,000	209,834,966,600	76.81%
18	KAB. CIREBON I SBR	122,172,000,000	92,719,547,600	75.89%
19	KOTA TASIKMALAYA	49,195,000,000	37,066,854,100	75.35%
20	KAB. SUKABUMI I CBDK	91,381,000,000	68,673,196,800	75.15%
21	KAB. INDRAMAYU I	107,758,000,000	79,941,408,900	74.19%
22	KAB. CIANJUR	113,019,000,000	82,073,921,300	72.62%
23	KAB. INDRAMAYU II HRGLS	48,367,000,000	35,075,186,600	72.52%
24	KAB. SUBANG	145,214,000,000	104,629,756,400	72.05%
25	KAB. BOGOR (CIBINONG)	561,859,000,000	399,449,977,500	71.09%
26	KAB. CIAMIS I	47,403,000,000	32,834,718,000	69.27%
27	KAB. GARUT	103,266,000,000	71,480,442,900	69.22%
28	KAB. SUMEDANG	68,648,000,000	46,067,107,800	67.11%
29	KAB. KUNINGAN	72,151,000,000	46,988,952,200	65.13%
30	KAB. MAJALENGKA	85,746,000,000	54,760,697,300	63.86%
31	KAB. CIAMIS II PGDRN	20,876,000,000	13,254,169,400	63.49%
32	KAB. TASIKMALAYA	72,508,000,000	45,217,533,100	62.36%
33	KOTA BANJAR	12,769,000,000	7,910,804,600	61.95%
34	KAB. CIREBON II CLDG	61,120,000,000	36,646,995,900	59.96%
Grand Total		4,501,252,000,000	3,867,588,009,400	85.92%

Capaian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) per P3D se-Jawa Barat adalah sebagai berikut :

NO	CABANG	BBNKB II		
		TARGET	REALISASI	%
1	KOTA TASIKMALAYA	349,000,000	572,531,000	154.91%
2	KAB. CIAMIS I	336,000,000	511,574,700	139.73%
3	KOTA CIREBON	394,000,000	569,032,400	135.72%
4	KOTA BANJAR	86,000,000	123,907,000	131.94%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	CABANG	BBNK II		
		TARGET	REALISASI	%
5	KAB. KUNINGAN	405,000,000	540,569,000	124.89%
6	KAB. CIAMIS II PGDRN	124,000,000	162,648,700	121.03%
7	KOTA DEPOK I	1,965,000,000	2,419,710,000	117.10%
8	KOTA BEKASI	4,776,000,000	5,696,895,000	114.37%
9	KOTA DEPOK II CINERE	1,081,000,000	1,242,240,900	110.70%
10	KAB. BANDUNG II SOREANG	890,000,000	1,032,250,500	108.96%
11	KAB. TASIKMALAYA	347,000,000	399,453,500	108.34%
12	KOTA BOGOR	1,144,000,000	1,260,652,500	106.34%
13	KOTA CIMAHII	533,000,000	584,948,700	104.51%
14	KAB. CIREBON I SBR	731,000,000	804,396,800	104.31%
15	KAB. BEKASI CKRG	4,029,000,000	4,370,206,300	102.98%
16	KOTA BANDUNG III SOETA	1,297,000,000	1,436,861,100	102.11%
17	KAB. MAJALENGKA	451,000,000	468,461,700	98.57%
18	KAB. BANDUNG I RC.EKEK	846,000,000	861,025,900	95.16%
19	KAB. SUMEDANG	373,000,000	371,921,000	91.31%
20	KAB. CIREBON II CLDG	328,000,000	334,243,700	91.17%
21	KOTA BANDUNG I PJRN	1,348,000,000	1,214,014,000	85.91%
22	KOTA BANDUNG II KWLYN	1,467,000,000	1,327,522,800	85.06%
23	KAB. BANDUNG BARAT PDLG	1,017,000,000	899,537,500	84.23%
24	KOTA SUKABUMI	267,000,000	235,783,500	83.16%
25	KAB. INDRAMAYU I	588,000,000	529,941,400	81.58%
26	KAB. PURWAKARTA	628,000,000	524,521,000	81.01%
27	KAB. GARUT	661,000,000	559,751,200	79.65%
28	KAB. BOGOR (CIBINONG)	3,447,000,000	2,803,467,200	78.62%
29	KAB. CIANJUR	693,000,000	572,909,500	78.36%
30	KAB. KARAWANG	1,709,000,000	1,337,263,000	72.06%
31	KAB. SUKABUMI I CBDK	660,000,000	456,047,000	65.81%
32	KAB. SUBANG	760,000,000	484,922,100	58.74%
33	KAB. INDRAMAYU II HRGLS	286,000,000	135,215,000	43.86%
34	KAB. SUKABUMI II P.RATU	332,000,000	151,452,500	42.24%
Grand Total		34,348,000,000	34,995,878,100	96.51%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

a. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR



Capaian realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 2.274.681.301.388,- atau 87,71% dari target sebesar Rp. 2.593.277.978.000,- ketidakcapaian target tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah, termasuk

Wilayah Jawa Barat, kebijakan larangan mudik lebaran, kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru, tutupnya beberapa Perusahaan Industri, sehingga berdampak menurunnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 9,85% dari tahun 2019 sebesar 8.406 kilo liter menjadi sebesar 7.578 kilo liter tahun 2020.

NO	CABANG	PBBKB		
		TARGET	REALISASI	%
1	KOTA TASIKMALAYA	52,384,213,990	47,051,258,090	89.82%
2	KOTA SUKABUMI	35,635,683,550	31,900,769,480	89.52%
3	KAB. CIAMIS I	46,679,003,000	41,673,076,219	89.28%
4	KAB. CIANJUR	78,432,325,300	69,971,811,680	89.21%
5	KAB. PURWAKARTA	87,290,743,090	77,636,620,750	88.94%
6	KAB. MAJALENGKA	58,867,408,990	51,986,049,060	88.31%
7	KAB. BANDUNG II SOREANG	137,517,911,720	121,436,460,880	88.31%
8	KAB. SUMEDANG	62,238,671,000	54,929,143,720	88.26%
9	KAB. SUBANG	83,503,550,000	73,592,107,740	88.13%
10	KOTA CIMahi	45,641,690,990	40,191,619,400	88.06%
11	KAB. KARAWANG	195,573,602,480	172,178,778,950	88.04%
12	KAB. BOGOR (CIBINONG)	275,406,119,990	242,342,722,290	87.99%
13	KOTA BEKASI	220,987,727,490	194,226,028,550	87.89%
14	KOTA CIREBON	30,341,352,000	26,654,012,810	87.85%
15	KAB. CIREBON I SBR	110,746,147,120	97,243,085,730	87.81%
16	KAB. TASIKMALAYA	44,345,045,930	38,890,047,980	87.70%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	CABANG	PBBKB		
		TARGET	REALISASI	%
17	KAB. BANDUNG BARAT PDLG	55,236,822,020	48,437,632,070	87.69%
18	KAB. INDRAMAYU I	82,059,119,250	71,880,572,700	87.60%
19	KAB. KUNINGAN	37,343,202,000	32,681,669,500	87.52%
20	KAB. GARUT	69,250,574,790	60,560,942,550	87.45%
21	KAB. CIAMIS II PGDRN	21,034,786,990	18,379,507,858	87.38%
22	KOTA BOGOR	76,077,230,300	66,434,857,830	87.33%
23	KOTA DEPOK I	132,571,836,760	115,701,381,290	87.27%
24	KOTA BANJAR	16,098,544,740	14,037,533,180	87.20%
25	KAB. SUKABUMI I CBDK	72,969,692,370	63,609,360,260	87.17%
26	KOTA BANDUNG III SOETA	229,598,028,690	199,865,660,560	87.05%
27	KAB. BEKASI CKRG	235,446,943,450	201,080,411,770	85.40%
28	KAB. SUKABUMI II P.RATU	-	-	0.00%
29	KAB. CIREBON II CLDG	-	-	0.00%
30	KAB. INDRAMAYU II HRGLS	-	-	0.00%
31	KOTA BANDUNG I PJRN	-	-	0.00%
32	KOTA BANDUNG II KWLYN	-	-	0.00%
33	KAB. BANDUNG I RC.EKEK	-	-	0.00%
34	KOTA DEPOK II CINERE	-	-	0.00%
Grand Total		2,593,277,978,000	2,274,573,122,897	87.71%

Capaian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) per P3D se-Jawa Barat adalah sebagai berikut :

b. PAJAK AIR PERMUKAAN

Realisasi Pajak Air Permukaan sebesar Rp.58.799.874.798,- dari target sebesar Rp.50.000.000.000,- atau 117,60%, Ketercapaian Pajak Air Permukaan yang signifikan dipengaruhi oleh penyesuaian target perubahan yang semula Rp.100.000.000.000,-. Adanya penambahan potensi wajib pajak baru hasil koordinasi dengan dinas teknis.

Capaian Pajak Air Permukaan per P3DW se-Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	CABANG	P.A.P		
		TARGET	REALISASI	%
1	KAB. CIREBON II CLDG	7.232.000	126.796.600	1753,27%
2	KAB. MAJALENGKA	94.719.000	191.350.500	202,02%
3	KOTA CIMAHII	231.240.000	354.027.000	153,10%
4	KOTA DEPOK I	137.061.000	200.781.000	146,49%
5	KOTA BANDUNG I PJRN	22.916.000	31.709.200	138,37%
6	KAB. CIAMIS II PGDRN	5.723.000	7.740.200	135,25%
7	KOTA TASIKMALAYA	6.353.000	8.567.500	134,86%
8	KOTA BOGOR	211.148.000	306.609.400	131,38%
9	KAB. BOGOR (CIBINONG)	3.396.597.000	4.442.915.200	130,80%
10	KOTA BANJAR	34.924.000	45.328.000	129,79%
11	KAB. SUMEDANG	790.250.000	1.025.286.950	129,74%
12	KAB. TASIKMALAYA	116.427.000	150.782.300	129,51%
13	KAB. SUBANG	392.296.000	505.019.700	128,73%
14	KOTA BANDUNG II KWLYN	295.637.000	375.934.525	127,16%
15	KAB. CIAMIS I	69.179.000	87.953.100	127,14%
16	KAB. BANDUNG I RC.EKEK	1.440.760.000	1.808.209.500	125,25%
17	KAB. KUNINGAN	444.362.000	555.549.500	125,02%
18	KAB. BEKASI CKRG	5.112.632.000	6.356.440.700	124,33%
19	KOTA BANDUNG III SOETA	25.188.000	31.299.500	124,26%
20	KAB. GARUT	495.941.000	641.167.300	123,13%
21	KAB. BANDUNG II SOREANG	1.848.758.000	2.264.674.630	122,50%
22	KAB. SUKABUMI I CBDK	885.699.000	1.081.052.300	122,06%
23	KAB. INDRAMAYU I	276.884.000	335.744.600	121,26%
24	KOTA BEKASI	634.656.000	762.555.100	120,15%
25	KAB. BANDUNG BARAT PDLG	13.015.655.000	15.571.499.426	119,64%
26	KOTA DEPOK II CINERE	58.367.000	69.575.600	119,20%
27	KAB. SUKABUMI II P.RATU	498.500.000	629.130.395	115,66%
28	KAB. CIREBON I SBR	124.965.000	142.713.600	114,20%
29	KAB. KARAWANG	5.155.568.000	6.397.419.100	111,83%
30	KAB. CIANJUR	3.250.820.000	3.609.408.986	111,03%
31	KAB. PURWAKARTA	10.918.928.000	10.682.413.386	97,83%
32	KOTA SUKABUMI	615.000	220.500	35,85%
33	KOTA CIREBON	-	-	0,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	CABANG	P.A.P		
		TARGET	REALISASI	%
34	KAB. INDRAMAYU II HRGLS	-	-	0,00%
Grand Total		50.000.000.000	58.799.875.298	116,10%

c. PAJAK ROKOK

Capaian realisasi penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2020 mengalami over target, dimana dari target (perubahan APBD) sebesar Rp.3.079.397.271.000,- terealisasi sebesar Rp.3.189.509.530.015,- atau 103,58%, serta melampaui estimasi sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan No. Kep-53/PK/2019 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok masing-masing Provinsi Tahun 2020, dimana Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi Rp.2.905.091.765.286,-. Faktor yang mempengaruhi capaian dimaksud, didorong oleh dampak kebijakan dari adanya kenaikan tarif efektif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2021 yang berdampak pada percepatan pembelian pita cukai di bulan Oktober 2020 oleh produsen rokok.

Capaian Pajak Rokok per P3D se-Jawa Barat adalah sebagai berikut

NO	CABANG	ROKOK		
		TARGET	REALISASI	%
1	KOTA TASIKMALAYA	48.248.309.360	65.098.262.666	134,92%
2	KOTA CIREBON	22.917.437.455	24.583.061.476	107,27%
3	KOTA SUKABUMI	23.492.655.978	25.200.086.496	107,27%
4	KAB. INDRAMAYU I	125.419.907.104	134.535.342.036	107,27%
5	KAB. CIAMIS II PGDRN	28.519.002.347	30.591.744.356	107,27%
6	KAB. CIREBON I SBR	147.406.832.099	158.120.262.028	107,27%
7	KOTA BANDUNG III SOETA	166.534.062.662	178.637.646.910	107,27%
8	KAB. BOGOR (CIBINONG)	317.118.025.600	340.165.951.520	107,27%
9	KOTA DEPOK I	124.968.855.883	134.051.508.713	107,27%
10	KAB. BEKASI CKRG	179.985.835.292	193.067.085.374	107,27%
11	KOTA BANJAR	13.840.740.200	14.846.675.937	107,27%
12	KAB. SUKABUMI I CBDK	173.082.133.303	185.661.626.943	107,27%
13	KOTA BOGOR	70.309.802.219	75.419.871.600	107,27%
14	KOTA CIMAH	37.239.123.504	39.526.932.211	106,14%
15	KAB. CIANJUR	154.262.419.259	163.383.903.993	105,91%
16	KOTA BEKASI	164.757.525.493	174.001.268.995	105,61%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO	CABANG	ROKOK		
		TARGET	REALISASI	%
17	KAB. SUBANG	105.927.462.716	110.525.185.815	104,34%
18	KAB. SUMEDANG	77.754.036.865	80.908.865.224	104,06%
19	KAB. MAJALENGKA	87.795.055.178	90.810.809.965	103,43%
20	KAB. GARUT	153.870.414.989	157.529.490.473	102,38%
21	KAB. PURWAKARTA	63.814.840.093	64.079.277.354	100,41%
22	KAB. KUNINGAN	78.643.857.541	76.962.548.495	97,86%
23	KAB. BANDUNG BARAT PDLG	112.203.107.597	109.343.083.284	97,45%
24	KAB. KARAWANG	156.336.215.648	150.091.986.398	96,01%
25	KAB. BANDUNG II SOREANG	239.809.573.895	228.952.764.619	95,47%
26	KAB. CIAMIS I	84.219.914.150	78.882.250.703	93,66%
27	KAB. TASIKMALAYA	120.920.124.570	104.532.036.426	86,45%
28	KAB. SUKABUMI II P.RATU	-	-	0,00%
29	KAB. CIREBON II CLDG	-	-	0,00%
30	KAB. INDRAMAYU II HRGLS	-	-	0,00%
31	KOTA BANDUNG I PJRN	-	-	0,00%
32	KOTA BANDUNG II KWLYN	-	-	0,00%
33	KAB. BANDUNG I RC.EKEK	-	-	0,00%
34	KOTA DEPOK II CINERE	-	-	0,00%
Grand Total		3.079.397.271.000	3.189.509.530.010	103,58%

2. RETRIBUSI DAERAH

Capaian pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah telah melampaui target perubahan yang telah ditetapkan yaitu 116,36 % yang bersumber dari :

- a. Retribusi Jasa Usaha dikarenakan terdapat penerimaan yang cukup signifikan di masa pandemi Covid-19 yaitu dari layanan :

- ❖ Sewa peralatan laboratorium/jasa pengujian yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, dikarenakan layanan di BPMKP/BP Cikole sudah terakreditasi sehingga menjadi rujukan untuk laboratorium pakan dalam memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) di Indonesia.
- ❖ Selain itu terdapat sewa lahan untuk tiang pancang reklame di jalan milik provinsi yang dikelola Dinas Bina Marga dan Perumahan Rakyat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

b. Retribusi Perijinan Tertentu, yaitu tergambaran pada dilampauinya penerimaan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang diasumsikan pada saat Pandemi jumlah tenaga kerja asing akan mengalami penurunan sejalan dengan kebijakan Pemerintah negara lain yang memulangkan TKI, sehingga target penerimaannya diturunkan dari Rp.7 Miliar menjadi Rp.3 Miliar. Namun demikian pada kenyataannya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tetap tinggi.

3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Capaian sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 100,05 % dari target Rp.399.717.085.961,- terealisasi Rp.401.703.315.844,-. Faktor yang mempengaruhi ketercapaian dikarenakan adanya penerimaan Deviden merupakan hasil usaha tahun 2019. Adapun kontributornya Bank bjb sebesar Rp.353.178.212.106,- dan PT. Migas Hulu sebesar Rp.38.556.503.226,-.

4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Capaian realisasi Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.2.459.249.118.171 atau 247,56% dari target sebesar Rp.993.397.424.018,- over target tersebut diperoleh dari pendapatan jasa giro sebesar Rp.36.378.787.436,-, pendapatan denda pajak sebesar Rp.55.844.811.766,-, pendapatan dari pengembalian sebesar Rp.393.587.081.459,-, pendapatan jasa pengelolaan sampah regional sebesar Rp.35.509.719.000,- serta Lain-lain PAD yang sah lainnya sebesar Rp.1.684.425.055.714,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

5. DANA PERIMBANGAN

Capaian Dana Perimbangan sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan pada APBN Tahun Anggaran 2020 yang dalam pelaksanaannya terdampak oleh Pandemi Covid-19 sejak bulan Maret s.d. Desember 2020. Hal ini berakibat pada capaian realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat sampai dengan November 2020 mencapai Rp15,881 triliun atau 97,55 % dari pagu perubahan sebesar Rp16,279 Triliun yang dihitung dari pagu alokasi sebagaimana Perpres 72/2020 dan PMK No.113/PMK.07/2020 terkait dengan Kurang/Lebih Bayar, sebagai upaya dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Jika dirinci setiap komponen Dana Perimbangan capaianya bervariatif yang meliputi :

- ❖ Bagi Hasil Pajak mencapai 92,85 %
- ❖ Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA mencapai 126,77 %
- ❖ DAU mencapai 99,01 %
- ❖ DAK mencapai 96,92 % yang dalam capaiannya sangat tergantung progress penggunaan.

Terkait dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan melalui koordinasi yang intensif dengan instansi vertikal yaitu Kementerian Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pajak/Kanwil DJP Jabar I/II/III, Ditjen Bea dan Cukai/Kanwil Bea dan Cukai), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hasil dari koordinasi ini dapat dilihat tren pendapatan dari Dana Perimbangan selalu meningkat setiap tahunnya, meskipun pada pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, lifting migas serta harga minyak mentah Indonesia.

6. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Ketercapaian realisasi sampai dengan penghujung tahun 2020 sebesar 97,64 % dimana dari target sebesar Rp.103.418.334.722,- terealisasi sebesar Rp.100.978.338.005,-. Hal ini dampak dari adanya Bantuan Keuangan untuk bidang pendidikan dari Kabupaten Pangandaran sebesar Rp.4.642.000.000,- terealisasi Rp.2.000.000.000,- atau 43,08% dan dari Kota Bandung sebesar Rp.33.750.000.000,- terealisasi Rp.33.106.000.000,-.

Untuk Hibah dari target Rp.35.613.062.722 terealisasi Rp.36.459.066.005 atau 102,38% dan Dana Insentif Daerah dari target Rp.29.413.272.000 terealisasi 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3.6.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian IKM Bapenda sampai dengan Tahun 2020 dapat dicapai hal ini terjadi karena level pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) sudah diupayakan untuk di penuhi (aspek peningkatan kompetensi SDM, sarana dan prasarana kantor pelayanan) di P3DW, dilengkapi dengan berbagai inovasi optimalisasi pendapatan .

Kendala yang masih di hadapi adalah masih terdapat P3D yang berkantor di Ruko sehubungan dengan belum tuntasnya pembangunan kantor P3D akibat refocusing anggaran akibat Covid 19.Tercapainya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ditunjang sepenuhnya oleh kinerja Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) se-Jawa Barat yang secara operasional dilakukan oleh Kantor-Kantor Sistem Administrasi Manunggal Saui Atap (SAMSAT) yang tersebar di 34 Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat dengan alamat dibawah ini :

NO.	P3D	ALAMAT
1	Wilayah Kota Depok I	Jl. Merdeka Raya No. 2 Depok 16411,No.Telp (021) 7717528 / No.Fax : (021) 7717528
2	Wilayah Kota Depok II Cinere	Jl. Limo Raya No. 60 Cinere, No.Telp (021) 753729 / No.Fax : (021) 753729
3	Wilayah Kab. Bogor	Jl. Raya Jakarta – Bogor KM. 50 Desa Cimandala, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor. No. Telp (021) 8758925 / No.Fax : (021) 8758924
4	Wilayah Kota Bogor	Alamat :Jl. Ir. Djunda No 4 Bogor, No.Telp (0251) 8322283 / No.Fax : (0251) 8322283
5	Wilayah Kota Sukabumi	Alamat: Jl. Masjid No. 22, Kota Sukabumi, No.Telp (0266) 215394 / No.Fax : (0266) 221911
6	Wilayah Kab. Sukabumi I Cibadak	Alamat: Jl.Raya Sukabumi-Bogor KM 20, Cibadak -Sukabumi,No.Telp : (0266)536780 / No.Fax : (0266)536780
7	Wilayah Kab. Sukabumi II Palabuhan Ratu	Jl. Jend.Sudirman Komplek Perkantoran Pemda — Pelabuhan Ratu, Sukabumi, No.Telp : (0266) 434225 / No.Fax : (0266) 434225
8	Wilayah Kab. Cianjur	Jl. DR. Murwadi No. 118 Cianjur, No.Telp: (0263) 260463 / No.Fax : (0263) 260463.
9	Wilayah Kota Bekasi	Jl. Ir.H. Juanda No. 302 (Bulak Kapal) Bekasi 17113, No.Telp: (021)82651666, (021)82651669/Fax : (021) 86251667
10	Wilayah Kab. Bekasi — Cikarang	Jl. Industri No. 14, Pasir Gombong, Cikarang Bekasi 17550, No.Telp: (021) 89109169 / No.Fax : (021) 89109169.
11	Wilayah Kab. Karawang	Jl. A. Yani By Pass No. 98, Karawang 41312, No.Telp : (0267) 402656 / No.Fax : (0264) 402656.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	P3D	ALAMAT
12	Wilayah Kab. Purwakarta	Jl. mekarsari I no .33 kel. Purwamekar kec. Purwakarta
13	Wilayah Kab. Subang	Jl. KS. Tubun No. 19 Subang, No.Telp : (0260) 411026 / No.Fax : (0260) 41102.
14	Wilayah Kota. Cirebon	Jl. Pemuda No. 44, Cirebon, No.Telp : (0231) 247706 / No.Fax : (0231) 24706
15	Wilayah Kab. Cirebon I Sumber	Jl. Sunan Drajat No.11, Cirebon, No.Telp: (0231) 321434 / No.Fax : (0231) 321434
16	Wilayah Kab. Cirebon II Ciledug	Jl. Raya Kuningan – Losari KM 39,5 Bojongnegara, Ciledug, No.Telp: (0231) 8665144 / No.Fax : (0231) 8665144
17	Wilayah Kab. Indramayu I	Jl.Gatot Subroto, Indramayu, No.Telp: (0234) 274301 / No.Fax : (0234) 274301
18	Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis	Jl.Jend.Sudirman No.01, Indramayu, No.Telp: (0234) 742750/ No.Fax : (0234) 742750.
19	Wilayah Kab. Kuningan	Jl. Aruji Kartawinata No. 8, Kuningan, No.Telp : (0232) 876071/ No.Fax : (0232) 871576
20	Wilayah Kab. Majalengka	Jl. KH. Abdul Halim No. 88 Majalengka, No.Telp: (0233) 281410/Fax. (0233) 281410.
21	Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	Jl. Pajajaran No.88 Bandung, No.Telp (022) 6021802/ No.Fax : (022) 6021879/6021887
22	Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	Jl. Kawaluyaan Raya Jatisari, Bandung, No.Telp : (022) 732 0869/ No.Fax : (022) 732 0869.
23	Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	Jl.Soekarno Hatta No.528 Bandung, No.Telp : (022)-7563998 / No,Fax : (022) 7500240.
24	Wilayah Wil.Kab. Bandung Barat	Jl. Raya Cimareme No. 203 B, Bandung Barat, No.Telp: (022) 6621010 / No.Fax : (022) 6621010
25	Wilayah Kab. Bandung I Rancaekek	Jl. K.H. Ahmad Syadili No. 66, Cipasir, Rancaekek, No.Telp: (022) 7793817 Fax : (022) 7793817
26	Wilayah Kab.Bandung II Soreang	Jl.Gading Tutuka No.01, No.Telp (022) 85870534 / No.Fax : (022) 85870585/ 85870498
27	Wilayah Kab.Sumedang	Jl. Pari Lama RT.04 RW. 08 Kel. Situ Kec. Sumedang UTARA KAB. SUMEDANG
28	Wilayah Kab.Garut	Jl. Suherman No. 65 Tarogong Kidul, Garut, No.Telp: (0262) 233816/ No.Fax : (0262) 233816
29	Wilayah Kota Tasikmalaya	Jl. Ir. H. Juanda (By Pass) Tasikmalaya, No.Telp : (0265) 335107 / No.Fax : (0265) 335107
30	Wilayah Kab. Tasikmalaya	Jl. Raya Cikatomas Sukaraja Tasikmalaya, No.Telp : (0265) 566917/ No.Fax : (0265) 566917
31	Wilayah Kab.Ciamis	Jl. Jendral Sudirman No. 231, Ciamis, No.Telp: 0265 – 771573/ No.Fax : (0265) 773656

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	P3D	ALAMAT
32	Wilayah Kab.Pangandaran	Jl. Raya Pangandaran Parigi KM. 2 Pangandaran, No.Telp: (0265) 639331 / No.Fax : (0265) 639331
33	Wilayah Kota Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.331A,Cimahi, No.Telp : (022) 6645095 / No.Fax : (022) 6645095
34	Wilayah Kota Banjar	Jl. Gerilya Pamongkoran Telp (0265) 744627 Fax (0265) 744627 / 747133

Selain Samsat Induk yang tersebar di seluruh Jawa Barat pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga dilakukan melalui sentra – sentra layanan lainnya yang dari tahun ke tahun terus berinovasi untuk semakin memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Innovasi Layanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Samsat Keliling

Layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat.

Maksud :

Mengembangkan Teknologi Informasi Komunikasi sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat 2006-2010.

Tujuan :

Meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Manfaat Pelayanan SAMSAT Keliling :

- Memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLL)
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat atau Wajib Pajak sehingga mengurangi biaya .



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

Samsat Outlet

Layanan pengesahan STNK setiap tahun , pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaanya di sentra-sentra perbelanjaan/pusat kegiatan masyarakat yang memungkinkan pemilik kendaraan/wajib pajak melakukan transaksi sambil berbelanja/rekreasi.

Samsat Outlet Melayani :

1. Pengesahan STNK setiap tahun, Pembayaran PKB, SWDKLLJ bagi wajib pajak yang berdomisili di Jawa Barat.
2. Kendaraan yang dilayani adalah kendaraan pribadi (bukan umum) baik roda 4 maupun roda 2.



Samsat Online 3 Provinsi

Pelayanan prima sangat erat hubungannya dengan pemberian jasa pelayanan yang dilakukan dalam upaya untuk memberikan rasa puas dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pelanggan atau masyarakat, sehingga Wajib Pajak / Masyarakat merasa dipentingkan atau diperhatikan dengan baik dan ditempatkan pada posisi yang benar. Kita tidak cukup hanya memberikan rasa terhadap pelanggan adalah bagaimana keinginan Wajib sehingga dapat positif dari Wajib Kepuasan dicapai apabila yang terlibat pelayanan, dapat menghayati serta melaksanakan



puas dan perhatian saja, lebih dari itu cara merespon Pajak / Masyarakat, menimbulkan kesan Pajak / Masyarakat. masyarakat dapat aparatur pemerintah langsung dalam mengerti dan berkeinginan untuk pelayanan lebih prima.

Samsat selaku penyelenggara pelayanan publik harus ikut berkontribusi positif didalam melaksanakan pelayanan prima untuk mewujudkan Good Governance.

Maksud dan Tujuan

Maksud:

Memberikan kemudahan pelayanan dalam pembayaran PKB Untuk Pengesahan STNK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

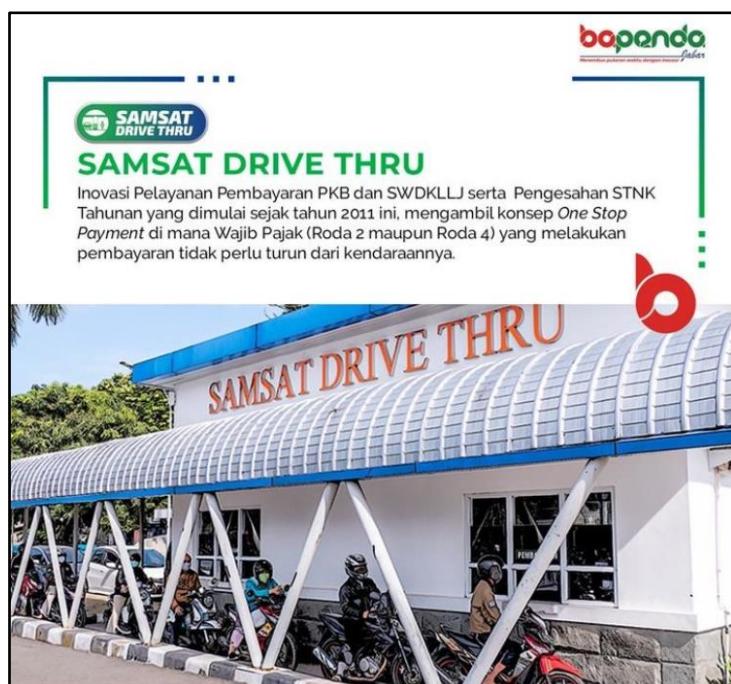


Setiap Tahun secara Online 3 Provinsi (Dispensa Jabar, DKI Jakarta dan Banten) yang Berada di Wilayah Polda Metro).

Tujuan :

Untuk memberikan kemudahan bagi para wajib pajak yang berdomisili di 3 Provinsi (Jabar, DKI Jakarta dan Banten) dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berada di Wilayah Polda Metro.

Samsat Drive Thru



Layanan pengesahan STNK setiap tahun , pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaanya memungkinkan pemilik kendaraan/wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya seperti pelayanan restoran cepat saji. Samsat Drive Thru telah beroperasi dan diadakan launching pada bulan Maret 2008 oleh Bapak Gubernur Jawa Barat di halaman Badan Pendapatan

Provinsi Jawa Barat. Bersamaan dengan penerimaan sertifikat ISO 9001:2000 oleh menteri pendayagunaan aparatur negara untuk pelayanan SAMSAT kota Bandung (SAMSAT BANDUNG BARAT, TENGAH DAN TIMUR).

SMS Infor Pajak

SMS Info Pajak Jawa Barat adalah layanan pesan sms untuk wajib pajak yang berkeinginan untuk memperoleh informasi jatuh tempo kewajiban registrasi ulang dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

E-Samsat

E-Samsat Jabar merupakan salah satu inovasi dari **Tim Pembina Samsat Jawa Barat** dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah Indonesia.



Keuntungan menggunakan E-Samsat Jabar

E-Samsat Jabar memberikan banyak keuntungan serta kemudahan, pembayaran yang dilakukan langsung oleh Wajib Pajak via ATM, diharapkan dapat menghindarkan percaloan, menghilangkan korupsi penerimaan pajak, ketepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan, serta tentunya memberikan kenyamanan bagi para Wajib Pajak.

Samsat Gendong

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Tim Pembina Samsat Jawa Barat kembali melakukan terobosan baru yang inovatif sebagai alternatif pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

'SAMDONG' kependekan dari Samsat Gendong, terobosan inovatif ini berawal dari diperlukannya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dapat menjangkau daerah ataupun wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Samsat Induk maupun Samsat Keliling, untuk melayani keinginan komunitas warga yang ingin melakukan pembayaran PKB.

Seperti layanan inovatif layanan jemput bola sebelumnya (Samsat Keliling), Samdong melayani pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) setiap tahun, pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Apabila dibandingkan dengan pelayanan Samsat lainnya, Samdong memiliki mekanisme yang jauh lebih sederhana yakni; Jarak yang ditempuh lebih dekat, karena dua petugas Samsat (1 petugas Polri dan 1 petugas Samsat) membuka *stand* (meja registrasi) di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang ada di satu wilayah, seperti Balai RW dan sebagainya.



Samsat Stiker Barcode

Sticker Barcode Samsat merupakan implementasi dari upaya untuk mengurangi jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) dengan memberikan Tanda Pelunasn kewajiban pembayaran dan registrasi ulang yang ditempel pada kendaraan sehingga lebih mudah teridentifikasi pada saat diperlukan.



SAMSAT STICKER BARCODE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Tabungan Samsat (T-Samsat)

T-Samsat atau Tabungan Samsat adalah layanan tabungan yang diselenggarakan oleh Bank BJB selaku bank persepsi Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya melaksanakan pengesahan STNK tahunan, membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) serta membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).



Keuntungan menggunakan T-Samsat

1. Terhubung secara *online* dengan Sistem Samsat Jabar
2. Bebas biaya administrasi dan bebas biaya penalti
3. Pajak kendaraan dapat dibayarkan dengan cara dicicil
4. Lebih leluasa dalam menentukan tanggal dan nominal cicilan
5. Pembayaran pajak dilakukan secara otomatis dengan sistem *autodebet* rekening secara tepat waktu dan tepat jumlah

Sipandu

Sistem Pelayanan Terpadu (Sipandu) merupakan hasil integrasi Ntata Bank BJB dan Bapenda yang dapat melakukan pembayaran retribusi secara online melalui ATM, Internet Banking ataupun Teller Bank BJB sehingga uang yang diterima dapat ditampilkan secara real time,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Sambara – Samsat Mobile Jawa Barat

Sambara, Samsat Mobile Jawa Barat merupakan sebuah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Tim Pembina Samsat Jawa Barat.

Khususnya Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Kepolisian, dan Jasa Raharja, dalam meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat Jawa Barat.

Melalui Inovasi ini Masyarakat bisa secara cepat dan mudah dalam melakukan kewajiban dalam membayar Pajak Kendaraan Tahunan.

Samsat Mobile Jawa Barat atau Sambara merupakan Inovasi Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan yang berupa Aplikasi Smartphone berbasis Android.

SAMBARA
SAMSAT MOBILE JAWA BARAT
Inovasi Layanan ini dimulai tahun 2017, aplikasi mobile berbasis Android dari Bapenda Jabar ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi layanan Samsat di Jawa Barat.

Fitur Aplikasi Sambara antara lain berisi :

- Informasi dan Transaksi Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan
- Update Status Kepemilikan
- Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan
- Pelayanan Pengaduan



Dengan hadirnya Sambara, Wajib Pajak dapat mengakses Layanan Pembayaran Pajak Tahunan di mana saja dan kapan saja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

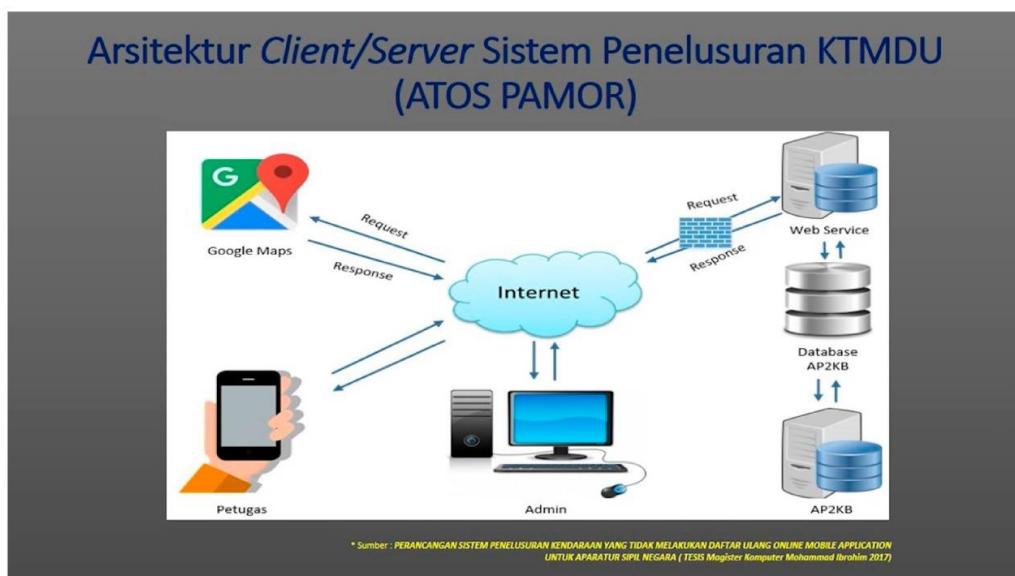
Bahkan di luar negeri pun, Wajib Pajak masih dapat melakukan Pembayaran Pajak Tahunan. Terlebih di rumah, sambil bekerja, sambil berolahraga, dan aktivitas lainnya.

Fitur Aplikasi Sambara salah satunya adalah berisi informasi dan transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan.

Dengan Aplikasi Sambara Wajib Pajak dapat melaporkan Kendaraannya yang sudah dijual untuk memperoleh Update Status Kepemilikan. Selain itu Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor Tahunan pun dapat dilakukan melalui Aplikasi Sambara, dengan terlebih dahulu melakukan Pendaftaran secara online untuk memperoleh Kode Bayar, hingga melakukan pembayaran. Wajib Pajak juga dapat menyampaikan Saran dan Pengaduan melalui Aplikasi Sambara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Aplikasi Penelusuran Pajak Kendaraan Bermotor (AP2KB)



APLIKASI TELUSUR OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

EDC Samsat



GERAKAN NASIONAL NON TUNAI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Samping Ketepel



pertama kali digunakan tahun 2018

Samsat Taping KTP Elektronik (Samping Katepel) merupakan sebuah alat dimana dengan mentaping KTP Elektronik pada alat scan reader maka akan tampil info pajak kendaraan beserta nilai pajak dan status kepemilikan/progresif yang terdaftar pada kantor samsat sesuai dengan nama yang tertera pada KTP. Samping Ketepel mengintegrasikan Database yang ada di kementerian dalam negeri melalui Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dengan database yang ada pada bapenda Provinsi Jawa Barat dan

Samsat Online Nasional (Samolnas)



SAMSAT ONLINE NASIONAL

Samsat J'bret

Samsat J'bret merupakan salah satu dari Inovasi Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat yang dikemas dalam Perjanjian Kerjasama antara Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Banten Tbk. tanggal 29 November 2018, dengan Tag Line **Samsat J'Bret (Samsat Jawa Barat Ngabret)**.

Adapun bentuk programnya adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di **Gerai Modern** (minimarket) seperti **Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret** sebagaimana telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat/wajib pajak dan pembayaran melalui **Aplikasi Belanja Online** seperti **Bukalapak, Tokopedia dan Kaspro** juga melalui **Teller Bank BJB** dan **PPOB** (Payment Point Online Bank).

Inovasi-inovasi layanan Samsat J'Bret selengkapnya adalah :

- Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Teller Bank BJB;
- Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui Financial Technologi (Fintech) Industri Startup seperti Tokopedia, Kaspro, Bukalapak, melalui Payment Point Online Bank (PPOB) dan melalui Gerai Modern seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret.

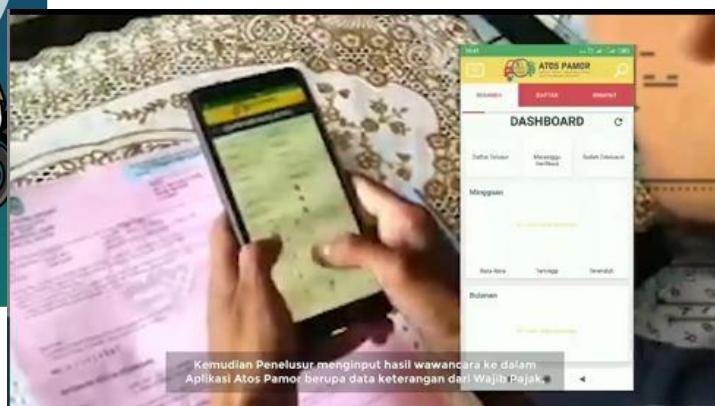
Semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses Layanan Samsat hingga pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak lagi dilakukan secara konvensional di Kantor Bersama Samsat, akan tetapi bisa dilakukan di Minimarket (Gerai Modern) terdekat, di cabang-cabang pelayanan Bank BJB ataupun wajib pajak cukup melakukannya di rumah dengan cara melakukan pembayaran melalui Aplikasi Belanja Online yang transaksinya sangat mudah dilakukan.

Untuk Pengesahan STNK Tahunan dapat dilakukan di seluruh Sentra Layanan Samsat Daerah Hukum Polda Jabar. Dokumen yang dikeluarkan adalah Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) yang berfungsi sebagai Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Atos Pamor & Zonita Pamor



Aplikasi telusur objek dan subjek pajak kendaraan bermotor (Atos Pamor), merupakan aplikasi penelusur pajak KTMDU berbasis android



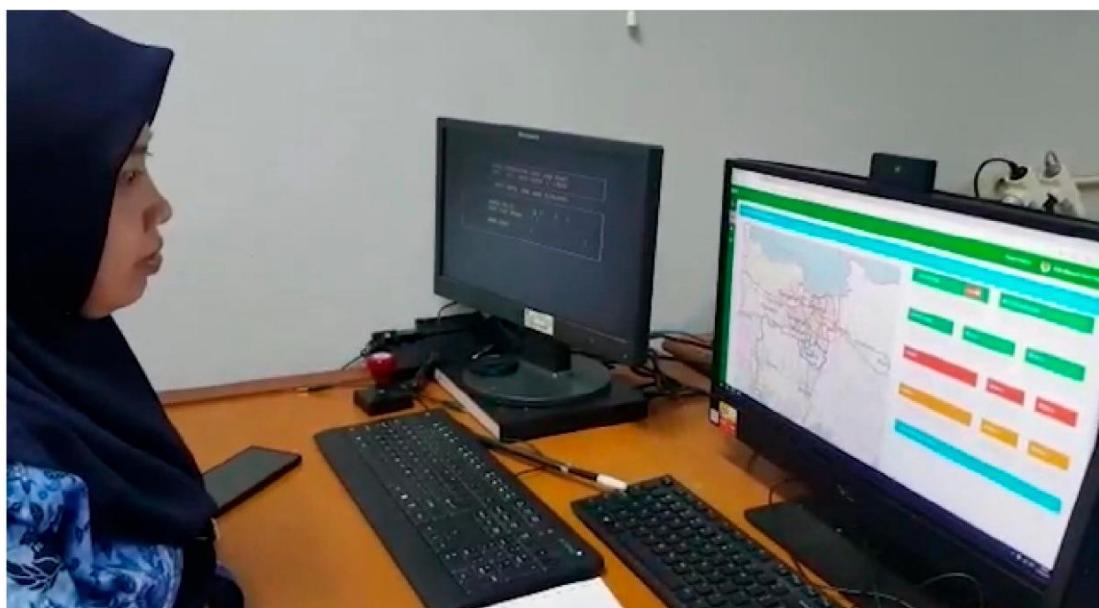
sehingga memudahkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

penelusur dalam menelusur kendaraan bermotor serta hasil update telusur dapat dilihat secara realtime

Zonita Pamor adalah Pakta Integritas antara pemerintah kota/kabupaten dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ketaatan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan yang dimiliki oleh pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN)

Pesta Online



APLIKASI PESTA ONLINE “ PEMETAAN SEBABARAN DATA BERBASIS ONLINE ”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

NO.	SASARAN	INDIKATOR	URAIAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAHAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI EFISIENSI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah	107.24	97.23	9.34
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Pendapatan Daerah	107.24	95.01	11.40
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Uptd Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	107.24	84.43	21.27
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Bandung Barat	107.24	92.70	13.56
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Bandung I Rancaekek	107.24	97.08	9.47
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Bandung II Soreang	107.24	97.78	8.82
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Bekasi	107.24	96.33	10.18
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Bogor	107.24	90.43	15.68
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Ciamis	107.24	95.89	10.58
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Cianjur	107.24	93.93	12.41
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Cirebon I Sumber	107.24	96.52	9.99
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Cirebon II Ciledug	107.24	92.65	13.60
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen	107.24	97.47	9.11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN	INDIKATOR	URAIAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAHAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI EFISIENSI
			Perkantoran UPTD P3DW Kab. Garut			
14	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Indramayu I	107.24	96.84	9.70
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Indramayu II Haurgeulis	107.24	98.60	8.06
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Karawang	107.24	94.59	11.80
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Kuningan	107.24	90.55	15.57
18	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Majalengka	107.24	96.11	10.38
19	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Pangandaran	107.24	98.57	8.09
20	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Purwakarta	107.24	98.54	8.12
21	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Subang	107.24	94.60	11.79
22	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Sukabumi I Cibadak	107.24	97.14	9.41
23	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Sukabumi II Pelabuhan Ratu	107.24	92.99	13.29
24	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Sumedang	107.24	92.44	13.80
25	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kab. Tasikmalaya	107.24	88.75	17.24
26	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD	107.24	99.51	7.21

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN	INDIKATOR	URAIAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAHAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI EFISIENSI
			P3DW Kota Bandung I Pajajaran			
27	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Bandung II Kawaluyaan	107.24	95.72	10.74
28	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Bandung III Soekarno Hatta	107.24	97.60	8.99
29	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Banjar	107.24	94.41	11.96
30	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Bekasi	107.24	94.02	12.33
31	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Bogor	107.24	94.27	12.09
32	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Cimahi	107.24	98.69	7.98
33	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Cirebon	107.24	95.99	10.49
34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Depok I	107.24	85.34	20.43
35	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Depok II Cinere	107.24	93.61	12.71
36	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Sukabumi	107.24	98.93	7.75
37	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW Kota Tasikmalaya	107.24	91.86	14.34
38	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Pembinaan Dan Pengendalian Unit Kerja Bapenda	107.24	99.87	6.88
39	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah I	107.24	86.16	19.66
40	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah II	107.24	93.51	12.81
			Rata - Rata Efisiensi			11.73

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN	INDIKATOR	URAIAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI EFISIENS I
NO.	SASARAN	INDIKATOR	URAIAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI EFISIENS I
41	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Uptd Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	94.57	86.96	8.04
42	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Indramayu I	94.57	99.20	-4.90
43	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Bandung Barat	94.57	99.15	-4.84
44	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Bandung I Rancaekek	94.57	98.44	-4.10
45	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Bandung II Soreang	94.57	99.29	-4.99
46	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Bekasi	94.57	98.61	-4.27
47	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Bogor	94.57	90.34	4.47
48	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Cianjur	94.57	92.37	2.33
49	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Cirebon I Sumber	94.57	98.71	-4.37
50	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Cirebon II Ciledug	94.57	100.00	-5.74
51	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Garut	94.57	94.44	0.13
52	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Karawang	94.57	87.27	7.72
53	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Subang	94.57	-	100.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN	INDIKATOR	URAIAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAHAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI EFISIENSI
54	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Sukabumi I Cibadak	94.57	88.65	6.26
55	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Sumedang	94.57	99.41	-5.12
56	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kab. Tasikmalaya	94.57	99.37	-5.07
57	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Bandung II Kawaluyaan	94.57	95.28	-0.75
58	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Bandung I Pajajaran	94.57	98.18	-3.82
59	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Bandung III Soekarno Hatta	94.57	99.22	-4.92
60	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Banjar	94.57	98.78	-4.45
61	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Bekasi	94.57	94.36	0.22
62	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Bogor	94.57	96.41	-1.94
63	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Cimahi	94.57	98.75	-4.42
64	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Depok I	94.57	98.90	-4.58
65	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Depok II Cinere	94.57	88.32	6.61
66	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW Kota Sukabumi	94.57	99.66	-5.38
67	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Perencanaan Kinerja, Pengembangan Layanan, Regulasi Dan Kerja Sama Pendapatan Daerah	94.57	90.35	4.46

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN	INDIKATOR	URAIAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAHAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI EFISIENSI
68	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Data Dan Aplikasi Serta Infrastruktur Sistem Pendapatan Daerah	94.57	98.13	-3.76
69	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Bandung Barat	94.57	92.17	2.53
70	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Bandung I Rancaekek	94.57	97.22	-2.80
71	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Bandung II Soreang	94.57	95.68	-1.17
72	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Bekasi	94.57	90.15	4.68
73	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Bogor	94.57	98.83	-4.51
74	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Ciamis	94.57	98.28	-3.92
75	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Cianjur	94.57	95.85	-1.35
76	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Cirebon I Sumber	94.57	97.84	-3.46
77	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Cirebon II Ciledug	94.57	97.32	-2.90
78	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Garut	94.57	96.20	-1.72
79	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap	Program Teknis Operasional Pengelolaan	94.57	95.88	-1.39

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN	INDIKATOR	URAIAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAHAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI EFISIENS I
		Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Indramayu I			
80	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Indramayu II Haurgeulis	94.57	93.17	1.48
81	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Karawang	94.57	97.31	-2.90
82	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Kuningan	94.57	80.04	15.37
83	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Majalengka	94.57	93.23	1.41
84	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Pangandaran	94.57	100.00	-5.74
85	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Purwakarta	94.57	90.58	4.22
86	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Subang	94.57	96.13	-1.65
87	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Sukabumi I Cibadak	94.57	95.72	-1.21
88	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Sukabumi II Pelabuhan Ratu	94.57	93.47	1.16
89	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Sumedang	94.57	96.67	-2.22

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN	INDIKATOR	URAIAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAHAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI EFISIENSI
90	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kab. Tasikmalaya	94.57	75.37	20.31
91	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	94.57	95.61	-1.10
92	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	94.57	93.95	0.65
93	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	94.57	97.96	-3.58
94	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	94.57	94.81	-0.25
95	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	94.57	92.24	2.46
96	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	94.57	97.16	-2.74
97	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	94.57	98.42	-4.07
98	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	94.57	98.97	-4.66
99	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	94.57	95.25	-0.72
100	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	94.57	84.47	10.68
101	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan	94.57	99.75	-5.48

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SASARAN	INDIKATOR	URAIAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI EFISIENSI
			Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi			
102	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	94.57	92.91	1.75
			Rata - Rata Efisiensi			1.13

No .	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	93,95	93,39	0,60
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda	107,24	94,92	11,49

Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” dengan indikator “Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah” didukung oleh Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp141.874.463.460 terealisasi sebesar Rp134.593.695.158 atau sebesar 94,87% dapat menghasilkan output capaian kinerja sebesar 93,95% sehingga berdasarkan perhitungan tabel analisis efisiensi sumber daya jumlah efisiensinya adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Penyerapan Anggaran})}{\% \text{ Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{93,95 - 93,39}{93,95} \times 100\% \\ = 0,60\%$$

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapenda” didukung oleh Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD P3DW se-Jawa Barat dan Kantor Pusat dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur UPTD P3DW se-Jawa Barat, Program Pembinaan Dan Pengendalian Unit Kerja Bapenda, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah I,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah II dengan anggaran sebesar Rp. 6.582.840.341,00 terealisasi sebesar Rp. 6.216.720.592,00 atau sebesar 94,67% dapat menghasilkan output capaian kinerja sebesar 107,24% sehingga berdasarkan perhitungan tabel analisis efisiensi sumber daya jumlah efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= \frac{(\% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Penyerapan Anggaran})}{\% \text{ Capaian Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{107,24 - 94,92}{107,24} \times 100\% \\ &= 11,49\%\end{aligned}$$

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Pendapata Daerah Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan efektif dan efisien, karena capaian kinerjanya sudah melampaui target tetapi penyerapan anggaran masih terdapat efisiensi.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori sangat memuaskan meskipun capaiannya tidak berada di atas 100%. Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung oleh kerjasama yang sinergis dari seluruh unit kerja baik yang ada di Kantor Pusat, Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) se-Jawa Barat dan Kantor Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah (PLOPD)

Namun demikian di balik keberhasilan tersebut masih banyak permasalahan yang berkaitan langsung dengan pencapaian pendapatan daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dimana harus dicarikan solusinya secara terus menerus diantaranya adalah :

1. Terjadinya Pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian nasional yang berimbas pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat sehingga lebih memprioritaskan kebutuhan primer;
2. Beberapa Sentra Layanan tidak dapat beroperasi dikarenakan pemberlakuan kebijakan PSBB dan banyak terdapat personil layanan yang terpapar Covid-19 meskipun sudah diberlakukan Protokol Kesehatan secara ketat;
3. Tingkat penjualan kembali kendaraan bermotor oleh masyarakat yang terkena dampak Covid-19 meningkat untuk memenuhi kelangsungan hidup berkelanjutan;
4. Tingkat kendaraan yang dikembalikan ke dealer/leasing meningkat karena ketidakmampuan masyarakat dalam membayar angsuran;
5. Tingkat penjualan dari asosiasi kendaraan atas daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor berkurang;
6. Kesadaran wajib pajak akan tertib administrasi terhadap kepemilikan kendaraan masih kurang untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
7. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu masih perlu ditingkatkan;
8. Pemanfaatan layanan kemudahan seperti e-Samsat ataupun PPOB dalam membayar pajak belum merata di setiap daerah;
9. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan perpajakan di Samsat belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan;
10. Anggaran Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor belum optimal dimana jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) yang dilakukan penelusuran masih di bawah 10%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

11. Belum optimalnya Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan baik yang berasal bagi hasil pajak (PBB, PPH, DBHCHT) dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam (PSDH, Landrent, Royalty, Migas dan Panas Bumi).

Upaya Penyelesaian

1. Mengintensifkan sosialisasi terhadap seluruh pemilik kendaraan bermotor salah satunya melalui operasi gabungan dengan mitra Bapenda (Kepolisian, Jasa Raharja dan Bank Jabar Banten);
2. Mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak melalui Program Triple Untung dan Triple Untung Plus;
3. Mengupayakan layanan diluar Samsat Induk dengan lebih terukur dengan memperhatikan protokol kesehatan dan kebijakan zonasi penyebaran Covid-19 serta mendorong pembayaran pajak melalui layanan digital (e-Samsat dan Samsat J-bret);
4. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Rokok, meliputi koordinasi dan konsolidasi lebih intensif dengan Instansi Pusat dan Kabupaten/Kota, terutama berkaitan dengan data jumlah penduduk di SIAP Kepmendagri, yang menjadi bahan perhitungan DBH. Data yang belum masuk ke SIAP Kementerian Dalam Negeri belum menjadi bahan perhitungan DBH, sehingga untuk pajak rokok acuannya tergantung dari data kependudukan di SIAP Kementerian Dalam Negeri;
5. Melakukan Penelusuran terhadap Badan Usaha yang bergerak dalam Penjualan BBM, namun demikian belum terdaftar sebagai WAPU di Jawa Barat. Untuk selanjutnya dilakukan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten dan Kota terkait PBBKB, serta Koordinasi/Rapat Teknis dengan BPH Migas;
6. Upaya meningkatkan Pendapatan dari Sektor Lain-lain PAD yang Sah, dengan melakukan Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil, kemudian Optimalisasi Tim Pendapatan dari Sektor retribusi dan Lain-lain PAD Yang sah. Serta Melakukan monitoring dan Survey Potensi lain-lain PAD Yang sah;
7. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pemungutan Retribusi Daerah, dan Penyusunan regulasi penerimaan retribusi daerah merupakan upaya Optimalisasi terhadap Perangkat Daerah Penghasil dan Objek retribusi yang menjadi potensi baru pendapatan dari retribusi daerah yang belum bisa dipungut;
8. Melakukan koordinasi dengan badan usaha milik daerah, untuk meningkatkan Pendapatan dari perusahaan daerah yang belum optimal.
9. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana pelayanan di seluruh Samsat se Jawa Barat;
10. Mengoptimalkan anggaran yang ada dan mengupayakan sinergitas kolaborasi dengan Kabupaten/Kota untuk bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui perjanjian Kerjasama untuk terlibat secara aktif baik dari sisi anggaran dan sumber daya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

11. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan melalui koordinasi yang intensif dengan instansi vertikal yaitu Kementerian Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pajak/Kanwil DJP Jabar I/II/III, Ditjen Bea dan Cukai/Kanwil Bea dan Cukai), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hasil dari koordinasi ini dapat dilihat tren pendapatan dari Dana Perimbangan selalu meningkat setiap tahunnya, meskipun pada pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, lifting migas serta harga minyak mentah Indonesia;
12. Melakukan integrasi data antara Bapenda dengan DJP, yang menjadi salah satu strategi untuk mendongkrak pendapatan negara dari Pph pasal 25 dan 29.

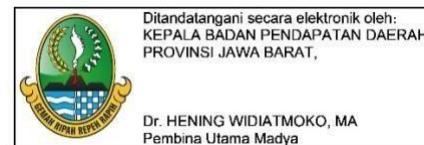
Dengan terpetakannya permasalah tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat akan melakukan langkah – langkah strategis sebagai wujud peningkatan kinerja secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 disusun, kiranya penyusunan LKIP ini dapat memberikan informasi yang memadai mengenai kondisi dan pencapaian yang telah dilakukan serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk masa yang akan datang.

Bandung,

2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara